MASA SENJA PLTU BATU BARA

THE INDONESIA ENERGY & MINING MAGAZINE

TAMBANG

JEMBATAN SOLUSI

Volume 16 No. 161 20 Juni - 20 Juli 2021

www.tambang.co.id

PATGULIPAT IZIN TAMBANG

PULUHAN TAMBANG DI KALIMANTAN SELATAN IZINNYA DIDUGA BODONG

ISSN 1907-6525

linknet

ICT SOLUTION NIRKABEL
MENDUKUNG REMOTE WORKING DI RURAL AREA

Solusi teknologi efektif untuk melacak, memelihara, dan mempermudah operasional bisnis di area terpencil

FLEET MANAGEMENT SYSTEM

Membantu perusahaan dalam optimalisasi produktivitas melalui cloud

RADIO MESH

Infrastruktur yang fleksibel memudahkan penggunaan konektivitas di segala jaringan nirkabel

MAN-PACK

Kemudahan konektivitas dengan device yang praktis dan mudah dibawa kemana saja

SEGERA HUBUNGI KAMI UNTUK PENAWARAN MENARIK

Wujudkan Transformasi Digital Bisnis Anda Bersama Link Net

SALES CENTER: **(021) 2953 6838**

SCAN QR CODE

WWW.LINKNET.ID | **enterprise.inquiry@linknet.co.id**

ZOOMLION

CRAWLER EXCAVATOR

ZE60E-10 / ZE75E-10 / ZE135E-10 / ZE215E / ZE370E / ZE485E-10

Mesin bertenaga dengan penyempurnaan teknologi untuk meningkatkan produktivitas
Konsumsi bahan bakar efisien dengan teknologi terkini
Jaringan layanan Servis dan Suku Cadang tersedia di kota besar di Indonesia

PT. Zoomlion Indonesia Heavy Industry
Kirana Two Tower, Level 18C
Jl. Boulevard Timur No. 88, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading
Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14250
+62 21 2245 9467
info.indonesia@zoomlion.com
en.zoomlion.com

zoomlionid

THE INDONESIAN ENERGY & MINING MAGAZINE
TAMBANG
JEMBATAN SOLUSI

SIUPP:
No. 149/SK/Menpen/SIUPP/1999
Pemimpin Umum:
Herman Afif Kusumo
Wakil Pemimpin Umum:
Juangga Mangasi
Dewan Redaksi:
Dr. Ir. S. Witoro Soelarno
Suyartono
Yusuf
A. Nugraha Juanda
Tino Ardhyanto
Hendra Sinadia
Andre Alis
Sidik Pramono
Pemimpin Perusahaan:
Atep Abdurofiq
Direktur Bisnis & Pengembangan:
Rakhmadi A. Kusumo
Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab:
Iwan Qodar Himawan
Redaksi:
Egenius Soda
Ragil K Wibowo
Muflihun Hidayatullah
Rahma Sari
Produksi:
Ragil K Wibowo
Iklan & Promosi:
Indah Wahyu Wati
Wulan Destiningsih
Sirkulasi & Distribusi:
Amiludin, Soleh
Keuangan:
Anna Diana

Penerbit:
PT Media Bakti Tambang
Rekening:
a.n PT. Media Bakti Tambang
Bank Mandiri KCP JKT Mampang Prapatan
A.C. 070-00-05573055
Alamat Redaksi:
Graha TAMBANG
Jl. Kapten Tendean No. 15
Jakarta Selatan 12790
Telp.: 021 - 7998823
Fax.: 021 - 7992616
E-mail: redaksi@tambang.co.id
iklan@tambang.co.id
sirkulasi@tambang.co.id
Website: www.tambang.co.id

tambang.majalah
MajalahTambang

Redaksi menerima artikel dan foto kegiatan seputar dunia pertambangan dan hal yang berkaitan, maksimal 5.000 karakter

CBC.ca

PATGULIPAT IZIN TAMBANG

Anggota DPR mengendus adanya puluhan izin tambang yang diduga bodong di Kalimantan Selatan. Ada indikasi praktik culas di Kementerian ESDM yang memanipulasi sistem *online* Minerba *One Data* atau Modi. Izin bodong itu berdalih menerima pelimpahan konsesi dari pemilik lama yang kontraknya sudah mati. Kemudian dihidupkan kembali lewat putusan Pengadilan Negeri.

Majalah TAMBANG memperdalami salah satu tambang yang berada di Kabupaten Banjar, PT Damai Mitra Cendana. Kini, tambang tersebut disegel Bareskrim Mabes Polri.

TAMBANG mewawancarai sejumlah narasumber inti, mulai dari Bupati, Dinas ESDM, dan Dinas Lingkungan Hidup. Mereka kompak menyebut izin-izin tersebut asal-usulnya bermasalah.

Ulasan tersebut disajikan dalam rubrik Laporan Utama pada edisi yang Anda pegang kali ini. Sedangkan rubrik lainnya, membahas sejumlah topik tengah hangat jadi perbincangan. Mulai soal perekembangan aturan turunan UU Minerba, dan masa depan batu bara di tengah dorongan transisi energi.

Selamat membaca. Selebihnya, semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, dan dapat bertahan melewati badai pagebluk yang makin mengganas ini.

MASA MENGAMBANG MENUNGGU PP TERBIT

DALAM beberapa kunjungan ke daerah, tim Majalah TAMBANG bertemu dengan beberapa *stakeholder* pertambangan. Baik dari kalangan pemerintah daerah, Dinas ESDM, maupun pelaku usaha. Dari mereka terungkap bagaimana pihaknya saat ini sangat menantikan hadirnya aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang ini merupakan revisi atas UU Nomor 4 Tahun 2009.

Dari sisi pemerintah daerah, yang ditunggu adalah kewenangan apa saja yang didelegasikan ke daerah. Maklum UU minerba yang baru telah mengalihkan kewenangan perizinan pertambangan dari daerah ke pemerintah pusat. Sehingga Dinas ESDM di daerah menjadi tidak memiliki tugas dan peran lagi. Namun ada sebagian dari kewenangan yang diambil alih ke pusat tersebut akan didelegasikan ke daerah. Sedianya hal ini akan diatur dalam peraturan presiden (perpres).

Di awal berlakunya otonomi daerah, yang mengalihkan perizinan tambang dari pemerintah pusat ke kabupaten, izin merupakan komoditas gurih tempat para pejabat mencari bekal untuk kantong pribadi. Ribuan izin diterbitkan, yang kadang-kadang tidak dilengkapi alas hak yang jelas. Sering terjadi tumpang tindih baik antar-IUP maupun antar tata guna lahan. Ada kalanya izin terbit di atas IUP yang sudah ada. Ada pula izin yang terbit di atas lahan berstatus hutan lindung, hutan produksi, maupun area yang sudah diplot untuk perutukan lain.

Tak jarang masalah perizinan berujung ke pengadilan, atau bahkan menyeret pejabat dan swasta masuk penjara. Maret lalu, dua pejabat di Provinsi Kepulauan Riau kena vonis 9 tahun dan 12 tahun, karena dinyatakan oleh pengadilan menerbitkan IUP Operasi Produksi tambang bauksit dengan melanggar hukum. Sepuluh orang lain juga dinyatakan bersalah.

Di Sulawesi Tenggara, Jambi, Kalimantan Tengah, juga terjadi kasus hukum akibat izin pertambangan. Para pejabat, dan swasta yang terlibat, sama-sama masuk bui.

Para pejabat daerah tak ingin, tindakan yang mereka lakukan berujung perkara. Oleh karena itu, mereka menunggu dengan seksama kewenangan apa saja yang dialihkan ke daerah, serta bagaimana mekanisme pengawasan kegiatan pertambangan ke depan. Sejauh ini baru izin pertambangan rakyat (IPR) dan surat izin pertambangan batuan (SIPB) yang sudah dialihkan ke pemerintah daerah.

Pelaku usaha juga terus menunggu dalam ketidakpastian. Sudah jelas bahwa perizinan dialihkan ke pusat, namun seperti apa pelaksanaannya, belum jelas buat mereka. Banyak dari mereka yang selama ini mengurus perizinan di provinsi. Banyak pemilik IUP yang selama ini mendirikan kantor di daerah, karena proses perizinan adanya di daerah.

Pemindahan perizinan ke pusat belum tentu membuat proses perizinan menjadi lebih cepat. Kemampuan pemerintah pusat memproses semua permohonan dari pemegang IUP yang ribuan ini masih terbatas. Tidak heran jika kemudian banyak juga yang mengeluh prosesnya menjadi sangat lambat.

Semua itu semakin sulit ketika aturan turunan dari UU minerba ini tidak kunjung terbit. Padahal itulah beleid yang lebih rinci dan teknis yang menjadi panduan bagi pemerintah dan pelaku usaha. Sudah lebih dari setahun UU minerba disahkan, satu dari tiga PP tidak kunjung terbit. Meleset dari target paling lama enam bulan setelah UU minerba disahkan, PP akan keluar.

Berdasar informasi dari pihak-pihak di lingkaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, satu PP segera dirilis. Naskahnya, ketika majalah ini terbit di awal Juli 2021, saat ini sudah berada di meja Presiden Joko Widodo. Setelah ditandatangani, naskah itu bisa menjadi pedoman bagi kalangan bisnis dalam menjalankan usahanya. Industri pertambangan dikenal sebagai industri yang sangat dipenuhi dengan aturan.

Kalangan dunia usaha menyambut kehadiran beleid itu dengan sikap mendua. Di satu sisi, mereka bersyukur, aturan yang ditunggu segera hadir. Di sisi lain, mereka deg-degan, menebak isi peraturan itu seperti apa. Asosiasi-asosiasi yang mewakili kepentingan dunia tambang itu, kepada TAMBANG mengaku tidak dilibatkan dalam perumusan beleid ini.

THE INDONESIAN ENERGY & MINING MAGAZINE
TAMBANG
BRIDGING SOLUTION

Volume 16 No. 161/20 Juni-20 Juli 2021

Judul Cover :
Patgulipat Izin Tambang
Design :
Tim Artistik Majalah TAMBANG
Sumber: Istimewa

Dari Redaksi	4
Visi	5
Bingkai	8
Arsip	10
Teknologi	50-51
Korporaksi	68-69
Logbook	70-76
Galeri	80-81

ORBITUARI 48

Berpulangnya Sosok Kritis Pertambangan

JENDELA CSR 58

Dorong Desa Binaan Jadi Contoh Desa Kreatif Tingkat Nasional

LAPORAN UTAMA

Main Curang Izin Tambang 12

Diduga ada sindikat pemalsu izin di lingkaran Kementerian Energi. Memanfaatkan lemahnya pengawasan selama masa transisi kewenangan. Anggota Komisi Hukum di Senayan buka-bukaan soal tambang bodong di Kalimantan Selatan.

Bertumpu Putusan Banjarbaru 16

Wawancara Bupati Banjar, Saidi Mansyur
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banjar, Mursal

Izin Itu Bodong, Tak Tercatat 20

NASIONAL

Menunggu Aturan Pencegah si Abal-abal 24

Komit Di Tengah Harga Global Melambung 30

Pabrik HPAL Pertama Mulai Produksi 32

Setahun Gosowong Di Tangan Indotan 36

LAPORAN KHUSUS

Saat-saat Batu Bara Tidak Lagi Membara 40

Negara-negara kaya mempercepat dekarbonisasi. Pemakaian batu bara sebagai sumber energi segera berakhir. Lembaga keuangan tidak mau lagi membiayai bisnis batu bara. Pemerintah Indonesia sedang menyusun *Grand Strategy Energy*. Sampai kapan batu bara bertahan.

Meredupnya Pembangkit Batu Bara 44

KOMODITI

Melejit Dipacu Kendaraan Listrik 50

Litium, salah satu komponen penting dalam produksi baterai kendaraan listrik. Permintaan terus meningkat. Konon, Indonesia memiliki cadangan besar. Tapi belum ada datanya. Australia dan negara-negara Amerika Latin sudah bersaing di Pasar Dunia.

OIL & GAS 52

Banjir Insentif untuk Investor gar Minyak Terus Menggelontor

BURSA 62

Emas Peter Di Lantai Bursa

LINGKUNGAN 64

Menambang Di Jantung Pariwisata

MINING SERVICES 66

Lini Produk untuk Memaksimalkan Profit

INFO PRODUK

Drone Penyemprotan Area Reklamasi 77

Truk Baru, Era Baru Seri Listrik 78

Volvo Construction Equipment
Building Tomorrow

MESIN HANDAL PRODUKSI MAKSIMAL

Volvo Rigid Hauler R100E

Rigid hauler R100E, partner terbaik dalam semua tugas penambangan dan penggalian. Berbekal kabin bersertifikasi ROPS/FOPS, sistem keamanan yang dapat dipercaya, akses servis mudah, serta nyaman saat dikendarai membuat rigid R100E dari Volvo tidak perlu diragukan lagi kehebatan dan keamanannya. Kapasitas loading yang besar membuat mesin ini sukses memaksimalkan produksi sekaligus meningkatkan profit bisnis Anda.

PT INDOTRUCK UTAMA
Your Reliable Business Partner

Indotruck Utama
Jl. Raya Cakung Cilincing KAV. 3A
Semper Timur, Jakarta Utara
Tel. (+6221) 4412168
www.indotruck-utama.co.id

Authorized dealer for Volvo Construction Equipment

VOLVO

SCANDIUM

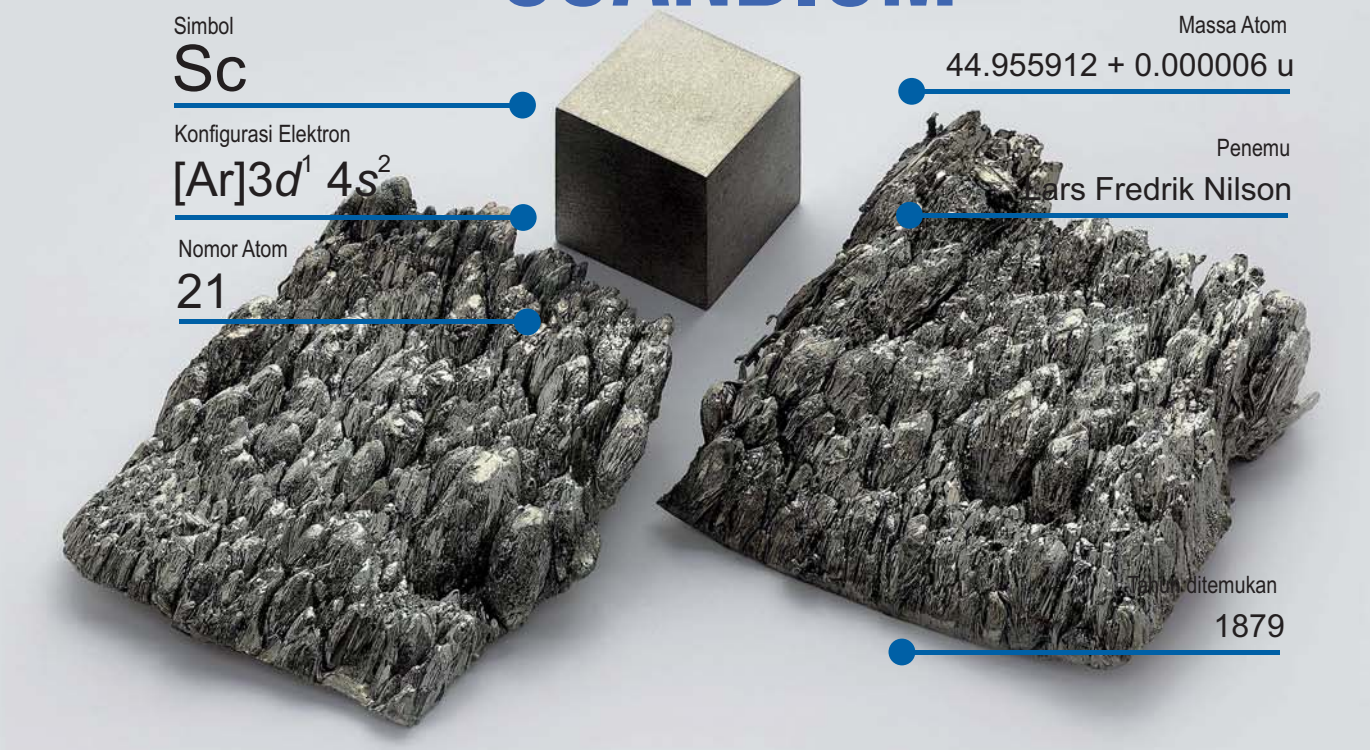

Scandium merupakan mineral yang terbilang sangat langka. Dalam setahun, dunia hanya menghasilkan 2 ton dalam bentuk scandium oksida. Produksi dari tambang sebanyak 400 kg, sisanya diambil dari sisa stok zaman perang dingin Rusia. Pada 2003, hanya ada tiga tambang yang menghasilkan scandium: tambang uranium dan besi di Zhovti Vody, Ukraina; tambang mineral langka di Bayan Obo, Cina; dan tambang di semenangjung Kola, Rusia. Di ketiga tempat itu, scandium merupakan produk sampingan.

Adapun scandium dalam bentuk logam hanya 10 kilogram setahun. Dari sini, scandium kemudian diubah menjadi scandium fluorida.

Lars Fredrik Nilson

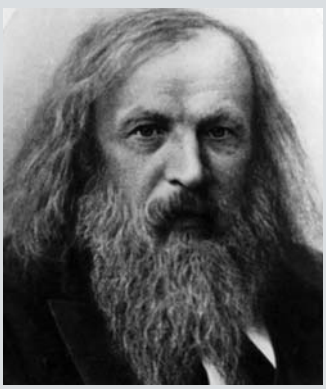

Dimitri Mendeleev

Jalan menuju tambang scandium di New South Wales.

Dari Scandinavia

Adalah Dmitri Mendeleev, ahli kimia dari Rusia yang kondang dengan tabel periodiknya, yang pada 1869 meramalkan adanya ekakarbon: unsur yang mempunyai massa atom antara 40-48. Lars Fredrik Nilson (27 Mei 1840-14 Mei 1899), ahli kimia dari Swedia dan timnya dalam penelitian terpisah menemukan unsur itu pada 1879. Ia menamakannya scandium, dari Scandinavia. Nilson mendapatkannya di mineral euxenite dan gadolinite, dan membuat scandium yang dimurnikan sebanyak 2 gram. Lars Fredrik Nilson ketika itu memang tengah meneliti mineral langka.

Kegunaan

Penambahan scandium ke aluminium membatasi bertambahnya butiran yang muncul akibat pengelasan. Ini membuat aluminium lebih kuat. Akan tetapi, lembaran titanium, yang sama ringan dan sama kuat, lebih banyak digunakan karena lebih murah. Lembaran aluminium yang memiliki unsur Al20Li20Mg10Sc20Ti3 disebut sekeras keramik, seringan aluminium, dan sekuat titanium.

Bila Anda melihat pesawat canggih MiG-21 dan MiG-29, kokohnya badan pesawat itu dibuat dari lembaran aluminium-scandium. Sejumlah produsen sepeda dan peralatan baseball, juga menggunakan campuran aluminium dan scandium.

MiG 21—badannya menggunakan scandium.

Efek bagi Tubuh

Elemen scandium disebut sebagai tak beracun, bila masuk tubuh dalam jumlah sedikit. Namun uji terhadap tikus menunjukkan, bila scandium disuntikkan ke saluran darah dengan dosis 4 mg tiap kilogram berat badan, atau lewat mulut sebanyak 755 mg tiap kilogram berat badan, akan menimbulkan keracunan tingkat menengah.

Sepeda dengan rangka Scandium

Tambang Scandium

Para pemain scandium

Inilah tiga negara yang dikenal sebagai produsen utama penghasil scandium: Cina, Kazakhstan, Rusia, dan Ukraina. Namun, negara bagian New South Wales, Australia, akan muncul sebagai pemain baru. Nyngan Scandium Project, di New South Wales, kini dikembangkan sebagai tambang scandium. Kawasan yang terletak sekitar 500 kilometer dari Sydney, Australia, itu luasnya 2.925 hektare. Direncanakan mulai berproduksi pada 2017, menghasilkan 35 ton setahun. T

Senckenberg.de

VON KOENIGSWALD

Hampir 39 tahun lalu, tepatnya pada 10 Juli 1982, seorang ahli geologi dan paleontologi bernama Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald wafat di Bad Homburg, Jerman. Koenigswald sangat tenar namanya dalam jagad perfosilan di dunia. Ia adalah sosok yang memiliki pekerjaan sesuai hobinya.

Ketertarikannya pada bidang paleontologi sudah terlihat tatkala ia baru mulai mengawali sekolah di Heppenheim an der Bergstrasse. Koenigswald lahir pada 13 November 1902 di Berlin, Jerman, kuliah geologi dan paleontologi di Berlin, Tubingen, Cologne, dan Munich. Di usia 26 tahun, ia menyelesaikan gelar doktornya di Erich Kaiser, Munich. Disertasinya mengenai studi geologi kawasan Weidener Bucht, area yang terletak di timur laut Bavaria.

Keterlibatannya pada kegiatan survei peleontologi di Jawa berawal dari ajakan yang disampaikan dosennya, Ferdinand Broili, yang mempunyai hubungan bagus dengan ahli di bidang yang sama dari Belanda. Koenigswald, ketika itu tahun 1930, ditawari ke Jawa untuk ikut proyek survei paleontologi. Itulah yang membuatnya tenar, hingga kini.

Koenigswald segera berlayar ke Jawa, yang ketika itu menjadi salah satu wilayah jajahan Belanda. Salah satu tugasnya adalah untuk mempelajari lapisan batuan di Jawa era *pleistocene*. Jawa ketika itu terkenal sebagai tempat penemuan fosil *pithecanthropus* oleh ahli purbakala Eugene Dubois, 40 tahun sebelumnya. *Pithecanthropus* dianggap sebagai rantai yang hilang antara monyet dan manusia.

Kerja keras Koenigswald dan konco-konconya membuahkan hasil. Antara 1931-1933, salah satu anggota tim, Cornelius ter Haar menemukan 11 potongan tengkorak dan tulang kering. Itulah untuk pertama kalinya Koenigswald melihat penemuan fosil.

Tiga tahun kemudian, pada 1936, potongan tengkorak lainnya ditemukan di dekat Ngandong, Boyolali. Pada 1936, tengkorak lainnya ditemukan di dekat Mojokerto, Jawa Timur. Tengkorak itu milik seorang bocah.

J. Duijfjes, geologis yang bertanggungjawab dalam hal pemetaan menyerahkan penemuan itu kepada Koenigswald. Semula ia mengira tulang tengkorak itu milik Homo sapiens. Namun setelah melihat struktur geologi Mojokerto lebih tua daripada tempat penemu-

an tengkorak di Ngandong, ia menyimpulkan tulang tengkorak Mojokerta merupakan Pithecantropus.

Koenigswald tak ragu bahwa semua fosil yang ditemukan merupakan peninggalan Pithecantropus. Namun untuk mempertahankan gagasan ini, ia harus berselisih pendapat dengan paleontolog yang ketika itu tenar, yakni Eugene Dubois. Ia bahkan marah kepada Dubois, karena ia nilai mengutip tulisannya di jurnal ilmiah, tanpa izin.

Koenigswald terus melakukan penelitian. Ia menemukan sejumlah fosil gigi di Sangiran, dan tulang dari enam Pithecantropus. Pada 1939, Koenigswald mengunjungi Franz Weidenreich, ahli paleontologi dari Jerman yang ketika itu memimpin Laboratorium Riset Cenozoic, Beijing. Ia membawa serta empat contoh fosil *Pithecantropus*. Weidenreich mendukung penelitian Koenigswald. Sejak itu, mereka berdua menjadi kawan akrab, yang saling mengakui keahlian masing-masing.

Masa pendudukan Jepang merupakan era buruk bagi Koenigswald. Ia ditahan sejak 1941, hingga akhir masa pendudukan Jepang di Indonesia. Weidenreich meninggalkan Cina untuk pindah ke Amerika Serikat. Dua sahabat ini kehilangan kontak. Begitu perang usai, mereka bertemu. Dengan bantuan sejumlah yayasan dari Amerika, Weidenreich mengajak Koenigswald ke Amerika Serikat.

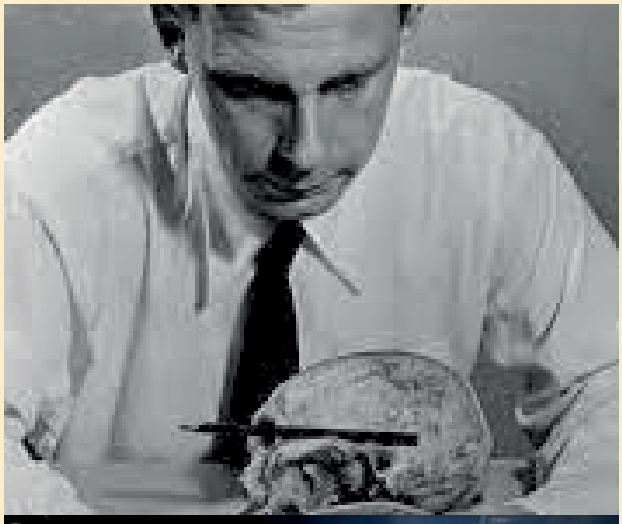

Bagian atas tengkorak Sangiran II (Homo erectus, asli, 1,5 juta tahun), koleksi von Koenigswald di Museum Senckenberg, Frankfurt.

Dr. Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald (lahir di Berlin, 13 November 1902 – meninggal di Bad Homburg vor der Höhe, 10 Juli 1982 pada umur 79 tahun) adalah paleontolog dan geolog berkebangsaan Jerman-Belanda yang melakukan penelitian terhadap hominin. G.H.R. von Koenigswald memberikan banyak kontribusi terhadap paleontologi selama kariernya. Penemuannya dan penelitiannya mengenai fosil manusia purba di Jawa dan penelitiannya mengenai fosil penting lainnya di Asia Tenggara memberinya reputasi sebagai salah satu figur paleoantropologi terpenting abad ke-20.

Koenigswald pergi ke Amerika dengan membawa fosil dari Jawa, yang ia bawa dengan rapat, dan ia bungkus erat-erat agar tidak hancur, pada 1946. Setahun kemudian, Koenigswald diangkat menjadi guru besar paleontologi di Rijksuniversiteit, Utrecht, Belanda. Di sinilah ia mengajar, hingga 1968, dan melahirkan beberapa ahli paleontologi. Salah satu di antaranya Profesor T. Jacob (almarhum), bekas rektor UGM yang juga guru besar Fakultas Kedokteran UGM.

Pada 1968 Koenigswald pulang ke tanah airnya, Jerman. Ia mengajar di Senckenberg Institute, Frankfurt. Ia mengelola departemen riset paleoantropologi, yang di-dirikan untuknya, dan masih berjaya hingga kini. Modal utama departemen itu adalah fosil dari Jawa, yang ditemukan Koenigswald dan timnya, sekitar 30 tahun sebelumnya. T

MAIN CURANG IZIN TAMBANG

MUFLIHUN HIDAYAT
muflihhidayat@tambang.co.id

Diduga ada sindikat pemalsu izin di lingkaran Kementerian Energi. Memanfaatkan lemahnya pengawasan selama masa transisi kewenangan. Anggota Komisi Hukum di Senayan buka-bukaan soal tambang bodong di Kalimantan Selatan.

Suasana rapat kerja Anggota Komisi Hukum di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia semula tampak tenang. Kemudian berubah jadi tegang saat Wakil Ketua Komisi, Pangeran Khairul Saleh terang-terangan mengungkap kecurigaannya soal praktik mafia izin tambang di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pada pertengahan Juni lalu, dalam agenda pertemuan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Khairul menyebut sejumlah nama perusahaan yang diduga izinnya bodong.

Senator asal Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan itu, mencatat ada 20 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayahnya yang dinilai bermasalah. Kasus ini sudah dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Ia mendesak Kapolri untuk menitahkan anak buahnya segera melakukan tindakan.

Khairul geram lantaran tiga IUP dari 20 IUP itu mencatut namanya. Mengaku mendapat legalitas dokumen dengan tanda tangan atas nama Khairul sebagai Bupati Banjar. Sebelum duduk di Senayan, pria trah Raja Kutai Kartanegara dengan gelar Sultan Haji Khairul Saleh Almu'tashim Billah ini, pernah menjabat sebagai Bupati Banjar selama dua periode, sejak tahun 2005 hingga 2015.

Di masa itu, ia punya kuasa menerbitkan izin sebelum kewenangan dialihkan ke level provinsi, mengikuti mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Tiga IUP tersebut di antaranya PT Damai Mitra Cendana yang menduduki lahan bekas PT Cenko Prima Ferro International, dan CV Das Profico Utama yang menempati eks konsesi CV Basthomy. Dua perusahaan ini bergerak di bidang batu bara. Lalu CV Hendra Wijaya atau PT Vico Tamara dengan komoditas tambang pasir kuarsa. Ketiganya beroperasi di Banjar, di daerah basis politik Khairul.

Pangeran Khairul Saleh, Wakil Ketua Komisi

Menurutnya, selama menjawat Bupati, ia tidak pernah mengeluarkan izin untuk perusahaan-perusahaan tersebut. Awal kecurigaan Khairul muncul saat mengetahui nama Damai Mitra masuk dalam data Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, terdaftar di sistem administrasi *online*, Minerba One Data alias Modi.

Dalam sistem tersebut, Damai Mitra tercatat aktif sejak tahun 2014, dengan landasan legalitas Surat Keputusan Bupati Nomor 11408. Surat itu menyebutkan Damai Mitra memperoleh persetujuan Bupati terkait pelimpahan IUP dari Cenko Prima.

Mundur ke belakang, pada tahun 2009, Khairul memang pernah menerbitkan IUP eksplorasi untuk Cenko Prima, perusahaan yang terafiliasi dengan PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk. Izinnya sempat diperbaharui pada tahun 2011. Kontrak Cenko Prima habis pada tahun 2015 dengan status masih eksplorasi.

Namun menjelang tutup tahun 2020, Khairul kaget lantaran sistem Modi mencatat Damai Mitra dengan status sudah operasi produksi di lahan bekas Cenko. Padahal menurutnya, ia tidak pernah memproses, IUP Cenko tidak pernah dilimpahkan ke Damai Mitra, juga tidak pernah ditingkatkan statusnya dari eksplorasi ke produksi. Artinya, dokumen surat yang dipegang Damai Mitra dengan mendompleng nama Khairul itu, palsu.

Khairul mencurigasi adanya sindikat pemalsu izin di lingkaran Kementerian ESDM. Modusnya memanfaatkan masa transisi rezim kebijakan setelah terbit Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau UU Minerba baru, di mana IUP yang semula dikeluarkan oleh pemerintah daerah ditarik jadi kewenangan Kementerian ESDM.

Sindikat ini menggunakan dokumen palsu dalam pengajuannya. IUP langsung diproses masuk ke sistem Modi tanpa pengecekan ke lapangan, dan mengabaikan koordinasi dengan pemerintah daerah.

”Damai Mitra ini eks Cenko, dulu saya terbitkan tapi sudah berakhir, mati. Tiba-tiba ada tanda tangan saya,” Ujar politisi Partai Amanat Nasional itu. ”Ada sindikat pemalsu IUP di Kementerian ESDM. saya minta Kapolri untuk menangkap, termasuk juga perusahaan yang menggunakan dokumen palsu ini yang sudah bekerja,” tegasnya.

Di tingkat daerah, mantan Kepala Dinas ESDM Kabupaten Banjar di masa kepemimpinan Khairul, Mursal membenarkan tentang kejanggalan izin Damai Mitra. Sepanjang ia kerja merekonsiliasi data perusahaan tambang di Banjar, tidak pernah dijumpai ada nama Damai Mitra. Mursal duduk di kursi Dinas ESDM Banjar pada periode 2012 hingga 2017.

Saat ini, Mursal menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar,

Wakil Ketua Komisi, Pangeran Khairul Saleh terang-terangan mengungkap kecurigaannya soal praktik mafia izin tambang di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Khairul menyebut sejumlah nama perusahaan yang diduga izinnya bodong, tercatat ada 20 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayahnya yang dinilai bermasalah.

Diduga ada sindikat pemalsu izin di lingkaran Kementerian Energi. Memanfaatkan lemahnya pengawasan selama masa transisi kewenangan.

ditunjuk oleh Bupati terkini, Saidi Mansyur. Menurut Mursal, berdasarkan basis data Dinas LH, Damai Mitra tidak pegang izin lingkungan.

Jika merujuk pada prosedur, dengan status Damai Mitra yang berada di tahap operasi produksi, sedangkan Cenko sebagai pemilik sebelumnya terakhir berstatus masih eksplorasi, mestinya ada izin lingkungan terlebih dahulu dari level kabupaten yang wajib dipenuhi sebagai syarat peningkatan status IUP dari eksplorasi ke produksi.

"Mereka tidak punya izin lingkungan. Belum ada dokumen yang dikeluarkan Dinas LH Kabupaten Banjar," jelas Mursal saat ditemui Majalah TAMBANG di kantornya, pertengahan Juni lalu.

Majalah TAMBANG menelusuri sistem data Modi, tercatat pemegang saham Damai Mitra terdiri dari tiga orang, yaitu Sugeng Basroni yang memiliki porsi 70 persen saham sebagai komisaris utama, Muhammad Iqbal Sulistyandaru yang memegang saham 20 persen sebagai direktur, dan Juni Eka Wardana yang mengantongi kepemilikan 10 persen sebagai komisaris.

Tahun ini, Damai Mitra mendapat persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB). Diberi jatah produksi batu bara sebanyak 100 ribu ton.

Damai Mitra tak sendirian, nama CV Das Profico Utama juga terdaftar di Modi. Dinyatakan berstatus operasi produksi dengan durasi izin berlaku sejak tahun 2014 hingga 2023. Saham Das Profico dimiliki oleh perseorangan, yaitu Rachmi dengan porsi saham sebanyak 85 persen, Fitri Istiawan sebanyak 10 persen, dan Noor Ichsan Isnaini sebanyak 5 persen.

Menurut Khairul, Das Profico juga memalsukan tanda tangan, mengaku legal dengan mengantongi Surat Keputusan Bupati Banjar. Isinya menyetujui pelimpahan IUP dari CV Basthomy yang sebenarnya sudah mati sejak tahun 2015.

Data pimpinan dan pemegang saham Damai Mitra dan Das Profico diperoleh TAMBANG saat mengakses Modi, Jumat (18/6). Namun berselang empat hari kemudian, keduanya sudah tidak ada, hilang dari Modi. Berdasarkan informasi dari sumber TAMBANG di Kementerian ESDM, IUP yang namanya mencuat dalam rapat di Komisi Hukum DPR RI, sudah dihapus dari Modi.

Perihal kejanggalan tersebut, Majalah TAMBANG menghubungi Humas sekaligus Pelaksana Tugas Bidang Hukum Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Sony Heru Prasetyo. Pertanyaan dari TAMBANG melalui pesan singkat elektronik dibaca namun tak dibalas.

Balik ke rapat kerja di Komisi Hukum, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendengarkan Khairul Saleh yang blak-blakan soal praktik curang di Kementerian ESDM. Perwira tinggi polisi itu menyanggupi bakal menelusuri 20 IUP bermasalah di Kalimantan Selatan, termasuk Damai Mitra dan Das Profico.

"Kami akan proses dan cek bagaimana asal usulnya," tegas Jenderal Bintang Empat kelahiran Ambon itu. T

BERTUMPU PUTUSAN BANJARBARU

MUFLIHUN HIDAYAT
muflihhidayat@tambang.co.id

Sejumlah pemegang IUP ramai-ramai menggugat Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan. Melawan dibilang bodong. Pengadilan Negeri Banjarbaru jadi tumpuan. Menteri ESDM tetap berwenang mencabut izin jika ditemukan indikasi akal-akalan.

Para pekerja yang semula lalu lalang, mengupas tanah, mengeruk galian, dan mengangkut batu bara, seketika terpaksa berhenti. Pada akhir Juni lalu, aktivitas penambangan di PT Damai Mitra Cendana disatroni aparat berseragam coklat. Persis di tengah gelanggang tambang atau *pit*, dipasangi spanduk berkelir kuning yang dipancang dengan balok kayu. Tulisannya, areal ini dalam penyelidikan Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri.

Perintah penyegelan turun sepekan setelah isu soal puluhan izin bodong di Kalimantan Selatan mengemuka dalam rapat kerja di Parlemen, Senayan, antara Komisi Hukum DPR RI dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Wakil Ketua Komisi asal Fraksi Partai Amanat Nasional, Pangeran Khairul Saleh menyebut Damai Mitra sebagai salah satu dari deretan tambang bodong itu.

Mundur beberapa bulan sebelumnya, pada akhir Maret lalu, bertempat di salah satu kedai kopi di Banjarmasin, Damai Mitra sempat menggelar konferensi pers. Melalui kuasa hukumnya, Wanto A Sahlan, Damai Mitra menyanggah tuduhan soal izinnya yang dinilai bermasalah.

Wanto menanggapi surat Bareskrim dengan nomor B/662/II/2021/Ditpidum, yang memuat daftar 20 Izin Usaha Pertambangan (IUP) terduga bodong di Kalsel. Damai Mitra masuk dalam daftar. Wanto membantah isi surat itu.

"Kami telah memiliki IUP operasi produksi sejak beberapa tahun lalu, diterbitkan oleh pejabat berwe-

Sejumlah pemegang IUP ramai-ramai menggugat Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan, melawan dibilang bodong.

nang, dan telah memenuhi prosedur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku," ujar Wanto.

Menurutnya, Damai Mitra tidak tercatat di basis data Dinas ESDM Kalsel karena tidak menerima sosialisasi saat pelimpahan kewenangan dari kabupaten ke provinsi, mengikuti terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Akibatnya, Damai Mitra tidak masuk basis data di level provinsi.

"Tidak ada pemberitahuan ke perusahaan kami. Perusahaan kami dinyatakan bodong. Hal ini juga sudah kami gugat ke pengadilan dan permohonan kami dikabulkan," tutur Wanto.

Pada November 2020, Damai Mitra menuntut Dinas ESDM Kalsel ke meja hijau, melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Banjarbaru. Sebulan kemudian, pengadilan mengeluarkan putusan. Isinya menyatakan izin Damai Mitra sah secara hukum, dan menitahkan Dinas ESDM Kalsel mengakui legalitas Damai Mitra.

Damai Mitra menang gugatan secara *verstek*, tanpa kehadiran pihak tergugat. Dinas ESDM Kalsel tidak datang ke persidangan yang dipimpin Hakim Ketua Ary Wahyu Irawan dan Panitera Pengganti Rudi Prayitno itu.

Damai Mitra disebut sah dengan mengantongi Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor 11408 Tahun 2014, yang memuat persetujuan pelimpahan izin operasi produksi dari pemegang konsesi sebelumnya, PT Cenko Prima Ferro International. Surat tersebut diteken oleh Pangeran Khairul Saleh, ketika itu masih menjadi bupati Banjar. Khairul, kini Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI, menjabat sebagai bupati pada tahun 2005 hingga 2015.

Setelah Bareskrim menyegel areal Damai Mitra, Majalah TAMBANG menghubungi Wanto untuk meminta tanggapan. Namun ternyata, pengacara veteran di Kalsel ini meninggal selang sebulan selepas konferensi pers di kedai kopi di Banjarmasin itu. Ia tutup usia pada akhir April lalu.

TAMBANG menelepon kantor Orin-Wanto dan Rekan, firma hukum tempat Wanto bekerja. Petugas kantor yang menjawab, membenarkan bahwa Damai Mitra masih berstatus sebagai kliennya. Namun saat ditanya soal penyegelan tambang, ia enggan berkomentar. Hanya menyanggupi bakal mengutus pengacara anyar untuk memberi jawaban. Meski beberapa kali dikontak, tak pernah lagi ada respon.

Wanto bukan hanya menangani kasus Damai Mitra di PN Banjarbaru, ada PT Kogar Perdana Murni, PT Damai Bintang Abadi, CV Titian Utama Tanah Bumbu, PT Das Profico Utama, CV Hendra Wijaya, dan lima perusahaan lain. Semuanya menggugat Dinas ESDM Kalsel lantaran tidak diregister dalam basis data, dianggap dokumennya abal-abal. Gugatan mereka dikabulkan, serentak keluar pada penghujung tahun 2020.

Tiga perusahaan pertama tercatat dipimpin oleh orang yang sama, Rizwan Rozali sebagai direktur. Layaknya Damai Mitra, gugatan Rizwan dikabulkan secara *verstek*. Hingga dinyatakan sah berdasarkan surat

keputusan bupati yang memuat persetujuan pelimpahan IUP dari pemilik konsesi sebelumnya. Lokasi tambang Rizwan berada di Tapin dan Tanah Bumbu.

TAMBANG mendatangi kantor Dinas ESDM Kalsel. Menemui seorang sumber yang menangani urusan informasi dan data. Ia mengatakan, Dinas ESDM Kalsel tidak menghadiri sidang gugatan di PN Banjarbaru itu karena tidak diundang. Pihaknya tidak dilibatkan dalam peradilan. Dinas ESDM Kalsel dikabari setelah putusan keluar.

"Tiba-tiba kami disuruh mengakui izin yang tadinya bermasalah," tutur sumber tersebut.

Mengerucut soal Damai Mitra, namanya tidak tercatat dalam rekonsiliasi data dari Dinas ESDM Banjar, saat peralihan rezim izin dari kabupaten ke provinsi. Sehingga Dinas ESDM Kalsel tidak meregister Damai Mitra dalam basis data yang diserahkan kepada Ditjen Minerba Kementerian ESDM.

Pada Agustus 2018 hingga Desember 2019, Dinas ESDM Kalsel menghadiri pertemuan dengan Ditjen Minerba bersama pejabat daerah lainnya. Forum tersebut diselenggarakan dalam rangka sinkronisasi data tambang se-Indonesia, digelar bergilir di Batam, Balikpapan, Semarang, Lombok, hingga Palembang.

"Dalam pertemuan-pertemuan itu kami menyerahkan pembaharuan *database*, dan Damai Mitra tidak pernah ada," ungkap sumber itu.

Dinas ESDM Kalsel mengirim surat ke Ditjen Minerba agar menolak jika ada pengajuan izin dari Damai Mitra. Pengurusan izin berpindah ke Ditjen Minerba mengikuti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atau UU Minerba baru, yang disahkan pada Juni 2020.

Kata sumber itu, Ditjen Minerba mengabaikan surat dari instansinya, justru Damai Mitra diregister masuk dalam sistem Minerba One Data atau Modi. Demikian pula dengan IUP lain yang diduga abal-abal, masuk ke data *online* Kementerian ESDM itu.

Pada pertengahan Juni lalu, TAMBANG mengakses Modi, data Damai Mitra terdaftar lengkap dengan komposisi pemegang sahamnya. Namun saat dicek ulang hanya berselang hari, Damai Mitra hilang dari sistem. Menurut informasi dari sumber TAMBANG di Kementerian ESDM, Damai Mitra dan puluhan IUP lain yang namanya mencuat dalam rapat di DPR, sudah dihapus dari Modi.

Dugaan izin Damai Mitra bodong menguat saat mantan Bupati Banjar Khairul Saleh mengaku tidak pernah memproses izin. Selama menjabat, ia tidak pernah meneken surat pelimpahan IUP dari Cenko Prima kepada Damai Mitra. Ia mengklaim tanda tangannya disabotase.

Hal tersebut diperkuat lagi oleh keterangan mantan pimpinan Cenko Prima, Andri Cahyadi. Ia menegaskan pihaknya tidak pernah memindahkan IUP ke

Kantor Dinas ESDM Kalimantan Selatan.

siapa pun, termasuk ke Damai Mitra. Pengusaha asal Solo, Jawa Tengah ini, melayangkan surat pengaduan soal kejanggalan Damai Mitra kepada Menteri ESDM, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kepolisian RI, pada April lalu.

Izin Cenko Prima habis pada tahun 2015, dan tidak diperpanjang karena saat itu sedang berada di ambang kebangkrutan. Belakangan, Andri tersingkir dari kursi Komisaris Utama PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk, perusahaan payung yang terafiliasi dengan Cenko Prima. Pencopotan Andri merupakan buntut dari tindakannya melaporkan petinggi PT Sinarmas Sekuritas ke Bareskrim atas dugaan penipuan, penggelapan, pemalsuan surat dan pencucian uang.

Pada tahun 2014, Exploitasi Energi memegang kontrak memasok batu bara ke PT Perusahaan Listrik Negara sebesar tujuh juta ton per tahun, selama 20 tahun. Exploitasi Energi berkongsi dengan Sinarmas. Dalam perjalanannya, Andri bukan meneguk untung, malah perusahaannya dililit hutang. Ia merasa ditipu, dan melaporkan petinggi Sinarmas ke polisi.

Konflik bisnis Andri dan Sinarmas disinyalir berdampak pada tambang Cenko Prima di Mataraman, Kabupaten Banjar. Konsesi yang dieksplorasi dengan luas sekitar 250 hektare dan kalori batu bara kadar menengah ini, tak terurus, terbengkalai, hingga habis izinnya tak diperpanjang lagi. Ia angkat suara saat mendengar perusahaan yang ia pimpin waktu itu, disebut-sebut melimpahkan izin ke Damai Mitra.

Berikut ini daftar perusahaan tambang diduga bodong yang ramai-ramai menggugat Dinas ESDM Kalsel ke Pengadilan Negeri Banjarbaru. Gugatan dikabulkan secara verstek dan dinyatakan berhak masuk ke dalam database Ditjen Minerba.

No	Nama Perusahaan	Nomor Register Perkara
1	PT Damai Mitra Cendana	64/Pdt.G/2020/PN Bjb
2	PT Kogar Perdana Murni	84/Pdt.G/2020/PN Bjb
3	PT Das Profico	70/Pdt.G/2020/PN Bjb
4	CV Hendra Wijaya	91/Pdt.G/2020/PN Bjb
5	PT Efri Jaya Family	83/Pdt.G/2020/PN Bjb
6	CV Latanza	81/Pdt.G/2020/PN Bjb
7	PT Rezeki Samudra Jaya	68/Pdt.G/2020/PN Bjb
8	CV Titian Utama Tanah Bumbu	75/Pdt.G/2020/PN Bjb
9	PT Setadi Perdana Putra	69/Pdt.G/2020/PN Bjb
10	CV Panorama	90/Pdt.G/2020/PN Bjb
11	PT Damai Bintang Abadi	65/Pdt.G/2020/PN Bjb
12	PT Visag Mandiri Prima	86/Pdt.G/2020/PN Bjb
13	PT Rio Gina Muliya	87/Pdt.G/2020/PN Bjb
14	PT Fatiha Karya Nusantara	88/Pdt.G/2020/PN Bjb
15	CV Daya Cipta Guna	89/Pdt.G/2020/PN Bjb
16	CV Selagai Jaya	80/Pdt.G/2020/PN Bjb
17	CV Niagatama Multi	82/Pdt.G/2020/PN Bjb
18	PT Berkah Bumi Banua	76/Pdt.G/2020/PN Bjb

Pengalihan IUP hanya boleh dilakukan di lingkaran afiliasi, mininal ke anak perusahaan yang sahamnya 51 persen dipegang pemilik IUP lama.

Pakar Hukum Pertambangan Universitas Tarumanegara, Ahmad Redi menilai ada kerancuan dalam putusan PN Banjarbaru. Praktik pemindahan IUP dari Cenko Prima ke Damai Mitra, terindikasi melanggar ketentuan UU Minerba lama yang semestinya jadi acuan di masa itu.

Pengalihan IUP hanya boleh dilakukan di lingkaran afiliasi, mininal ke anak perusahaan yang sahamnya 51 persen dipegang pemilik IUP lama. Sementara Cenko Prima dan Damai Mitra adalah dua perusahaan yang sama sekali berbeda.

Kata Redi, Menteri ESDM dapat mencabut izin Damai Mitra karena ada indikasi pelanggaran UU, meskipun sudah diikat putusan pengadilan. Selain itu, yang lebih penting, Menteri ESDM juga perlu melakukan evaluasi ke pejabat internal, mengingat adanya sejumlah izin diduga bodong yang masuk ke Modi.

Saat ini, penyelewengan di lingkaran Kementerian ESDM semakin rentan terjadi, sebab revisi UU Minerba terbaru menghapus pasal ancaman pidana bagi pejabat yang bermain culas. Padahal, UU Nomor 4 Tahun 2009 alias UU Minerba lama, tepatnya pada pasal 165 menyebutkan, setiap orang yang menerbitkan izin namun bertentangan dengan UU dan menyalahgunakan kewenangannya, diancam sanksi penjara dan denda.

”Penghapusan pasal 165 jadi celah bagi pejabat bisa menerbitkan izin secara seporadis,” tegasnya.

WAWANCARA

BUPATI BANJAR, SAIDI MANSYUR
PLT. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP BANJAR, MURSAL

IZIN ITU BODONG, TAK TERCATAT

MUFLIHUN HIDAYAT
muflihhidayat@tambang.co.id

Pejabat di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan menjelaskan asal-usul IUP yang diduga palsu. Selama rekonsiliasi data dari kabupaten ke tingkat provinsi, IUP tersebut tidak terdaftar. Ada yang berani menambang padahal tidak pegang izin lingkungan.

Hasil rapat kerja antara Komisi Hukum DPR RI dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mengungkap adanya 20 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalimantan Selatan yang diduga bodong. Sebanyak tiga IUP dari 20 IUP tersebut berada di Kabupaten Banjar, memalsukan tanda tangan Wakil Ketua Komisi dari Fraksi PAN, Khairul Saleh sebagai pemberi izin atas nama Bupati pada tahun 2014. Sebelum bertengger di Senayan, Khairul pernah menduduki kursi Bupati Banjar selama dua periode, sejak tahun 2005 hingga 2015.

Pada pertengahan Juni lalu, TAMBANG menemui Bupati Banjar saat ini, Saidi Mansyur. Tujuannya untuk meminta penjelasan soal pengawasan di lapangan terkait dugaan tambang bodong tersebut. Saidi berkuasa persis setelah Khairul Saleh lengser, dimulai jadi Wakil Bupati hingga kini naik ke pucuk pimpinan wilayah Banjar.

TAMBANG juga menemui Mursal, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar. Di masa Khairul Saleh memimpin, Mursal menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM, sejak tahun 2012 hingga 2017.

Mursal tahu asal-usul PT Damai Mitra Cendana, salah satu perusahaan yang masuk dalam daftar IUP terduga bodong. Damai Mitra mengklaim izinnya sah dengan mengacu pada hasil putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru.

Dalam putusan itu, Dinas ESDM Kalsel digugat, dinyatakan kalah, dan dituding abai karena tidak me-

ngakui legalitas Damai Mitra. Dinas ESDM Kalsel menolak mengakui legalitas Damai Mitra berdasarkan keterangan Mursal. Ia merupakan pejabat yang memimpin rekonsiliasi data IUP di Banjar saat peralihan kewenangan dari kabupaten ke tingkat provinsi, beberapa tahun silam.

Wawancara Saidi dan Mursal berlangsung secara bersamaan di Kantor Bupati Banjar. Selama mengobrol hampir satu jam, Saidi hanya menjawab pertanyaan TAMBANG secara singkat. Selebihnya diambil alih oleh Mursal. Berikut ini cuplikan wawancaranya.

Anggota DPR yang juga mantan Bupati Banjar menyebut, ada tiga IUP bodong yang beroperasi di wilayah Anda. Bagaimana Anda menanggapinya?

Saidi :

Detailnya bisa disampaikan oleh Pak Mursal yang mengerti dan berpengalaman di bidang pertambangan.

Yang jelas, meskipun sekarang kewenangan perizinan sudah ditarik ke pusat, setelah terbit Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atau UU Minerba terbaru, kami masih punya tanggung jawab pengawasan dalam hal dampak lingkungan. Ke depan, pengawasan akan kami perketat.

Mursal :

Kasus ini mulai ramai jadi perbincangan saat kami menerima panggilan dari Badan Reserse Kriminal Polri. Kami beberapa kali dipanggil, sejak akhir tahun 2020 hingga awal 2021. Kami dimintai keterangan mengenai dugaan IUP bodong.

Jumlah izin bodong di Banjar menurut Bareskrim bukan hanya tiga IUP, tapi ada sembilan IUP.

Kasus ini ditangani Bareskrim, siapa yang melapor?

Mursal :

Awalnya, para pemegang IUP tersebut minta pengakuan legalitas ke Dinas ESDM Kalsel, namun tidak disanggupi karena asal-usulnya tidak jelas, tidak lengkap dokumennya.

Ketika kami menyerahkan rekonsiliasi data IUP ke tingkat provinsi, saat peralihan kewenangan dari kabupaten ke provinsi, nama mereka tidak teregister di Dinas ESDM dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar. Tidak terdaftar di basis data atau *database* kami. Ini jadi acuan bagi Dinas ESDM Kalsel untuk menolak pengajuan mereka.

IUP yang ditolak itu melakukan perlawanan, menggugat ke pengadilan, salah satunya PT Damai Mitra Cendana.

Dinas ESDM Kalsel tidak menghadiri sidang gugatan dan dinyatakan kalah. IUP menang. Atas landasan itu, Damai Mitra menjadi ”legal” sehingga berani melakukan eksploitasi, menambang dan menjual batu bara. Dinas ESDM Kalsel melawan balik, melapor ke Polda Kalsel kemudian ke Bareskrim, dan kami dimintai keterangan oleh Bareskrim.

Saidi Mansyur, Bupati Banjar.

Menurut sumber TAMBANG di Dinas ESDM Kalsel, mereka tidak menghadiri sidang gugatan karena tidak diundang. Apakah Anda tahu?

Mursal :

Iya benar. Dinas ESDM Kalsel tidak dilibatkan dalam persidangan, tidak ada undangan atau pemberitahuan bahwa mereka sebagai pihak tergugat. Proses peradilan di PN Banjarbaru tampak sekali ”diatur”. Saya sebagai Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar juga tidak tahu kalau ada persidangan, mestinya saya ikut dipanggil sebagai pihak yang bertanggung jawab di wilayah operasi IUP tersebut.

Persidangan berlangsung secara diam-diam, sampai akhirnya keluar putusan, kemudian diumumkan ke mana-mana.

Lantaran tidak dilibatkan di sidang, Dinas ESDM Kalsel tidak menuruti hasil putusan. Tetap menganggap jika ada aktivitas dari Damai Mitra di lapangan, maka tergolong praktik ilegal, dan polisi wajib menindak.

Kenapa tidak menempuh langkah banding jika merasa sidangnya cacat?

Mursal :

Kalau itu lebih tepatnya tanyakan langsung ke Dinas ESDM Kalsel sebagai pihak tergugat.

Penjelasan Anda mengarah pada penilaian sidang tersebut cacat secara formil. Kalau dari sisi materiil, ada yang janggal?

Iya. PN Banjarbaru menyatakan izin Damai Mitra sah karena memegang Surat Keputusan Bupati Banjar

yang diterbitkan pada tahun 2014. Surat itu diteken oleh mantan Bupati Banjar, Khairul Saleh. Yang bersangkutan, menyatakan tidak pernah mengeluarkan surat tersebut. Artinya surat itu palsu.

Kalau pun benar mantan Bupati Khairul Saleh menerbitkan surat itu, tetap saja janggal. Sebab isinya menyebutkan Damai Mitra menerima pelimpahan IUP dari pemegang konsesi sebelumnya, PT Cenko Prima Ferro International.

Praktik pelimpahan IUP semacam ini, menyalahi UU Nomor 4 Tahun 2009 atau UU Minerba lama. Dalam pasal 93 disebutkan, pemegang IUP tidak dapat memindahkan izin ke pihak lain.

Di luar itu, saya bisa pastikan selama saya menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM Banjar di periode Pak Khairul Saleh, saya tidak pernah memproses surat pelimpahan IUP tersebut.

Hal ini juga diperkuat oleh pengakuan mantan pimpinan Cenko Prima, yang sempat melayangkan surat pengaduan ke Kementerian ESDM, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Mabes Polri. Isinya menyatakan bahwa Cenko Prima tidak pernah melakukan pelimpahan IUP ke pihak manapun.

Masa berlaku IUP milik Cengko Prima habis pada tahun 2015, dan Damai Mitra mengklaim mendapat pelimpahan IUP pada tahun 2014. Klaim itu muncul setelah dilegalkan melalui putusan PN Banjarbaru pada akhir tahun 2020.

Lahan bekas Cenko sudah mati. Jika diusahakan kembali, semestinya prosedurnya bagaimana?

Mursal :

Saat berakhir, status Cenko Prima masih eksplorasi. Itu tercatat saat kami serahkan data rekonsiliasi IUP ke tingkat provinsi. Semestinya tambang itu jadi milik negara, lalu dilelang, kemudian bisa diusahakan lagi.

Damai Mitra ini aneh, kok bisa tiba-tiba muncul dari IUP yang sudah mati, apalagi statusnya langsung naik jadi operasi produksi, dan masuk di Minerba One Data atau Modi, sistem data perusahaan tambang Ditjen Minerba Kementerian ESDM.

Selama ini, prosedur untuk naik status menjadi operasi produksi, harus ada dokumen studi kelayakan, izin lingkungan, analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan sebagainya. Sementara kami di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar, tidak pernah mencatat ada nama Dama Mitra pegang izin lingkungan.

Apa langkah yang akan Anda lakukan terhadap Damai Mitra dan IUP lainnya yang diduga bodong itu?

Saidi :

Kami akan coba cari jalan yang terbaik dengan memaksimalkan pengawasan di bidang lingkungan. Namun pada prinsipnya, kami ingin pihak yang sudah berinvestasi tidak rugi. Tapi apabila ada hal-hal lain di luar pengetahuan kami, kiranya bisa disampaikan apa adanya. Supaya kami bisa semaksimal mungkin menjaga agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik masyarakat atau pengusaha.

Mursal :

Saat ini, kewenangan kabupaten hanya sebatas pengawasan lingkungan. Kalau ternyata ada IUP yang melakukan kegiatan tanpa dokumen lingkungan, mereka harus diberi sanksi administrasi, sampai ujungnya dicabut. Kita akan menggandeng inspektur tambang.

Badan Pengurus Nasional ASPINDO
Masa Bakti 2021 - 2024
Berdasarkan Hasil Munas V ASPINDO 30 Juni 2021

MUSYAWARAH NASIONAL V
ASPINDO - IMSA

Bpk. Frans Kesuma

Sebagai Ketua Umum Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia
masa bakti 2021 - 2024

Badan Pengurus Nasional :
Wakil Ketua Umum : Ari Sutrisno, Indra K, Darwin Abas
Sekretaris Umum : Bimantoro A
Bendahara Umum : Judy S. Kartadikaria
Ketua Bidang : Boy G. Kalauserang, Jeffrey Kounang, Lucas Tetardy K, Feriwan Sinatra, Abidin DP, A. Kharis, Titus Purba
Anggota : Julismi, Ardi Ishak K, Joko Satianto, M. Hata, Chandra K, Nanang Rizal Achyar, Anang Adnan, Meidi Wibowo, Supriyono, Yenny Koean, Joko Triraharjo, Sony Homsani

Direktur Eksekutif : Bambang Tjahjono

Badan Penasehat :
Bambang Setiawan, Sudiarso Prasetio, Tjahyono Imawan, Irwandy Arif, Durban L. Ardjo, Boy G. Thohir, Iman Nurwahyu

Grup Ahli:
Ketua : S. Witoro Soelarno

Dewan Etik :
Ketua : Irwandy Arif
Anggota : Sumardiman DW, Herman Kasih

PAMA member of ASTRA
KOMATSU 100th Anniversary
PETROSEA Member of Indika Energy Group
BUMA
Mobil Performance by ExxonMobil
PPA
MADHANI
THIESS
DPIB
adaro SERVICES
KALOPER Your Partner to Combat the Wear
INARA PT INDOPARTA NUSANTARA
MINEPARTA

WWW.ASPINDO-IMSA.OR.ID

SETAHUN PP UU MINERBA

MENUNGGU ATURAN PENCEGAH SI ABAL-ABAL

EGENIUS SODA
egen@tambang.co.id

Setahun lebih UU Minerba hasil amandemen disahkan. Aturan turunannya tak kunjung dikeluarkan. Dijanjikan dalam waktu dekat ditandatangani satu peraturan pemerintah. Berharap menjawab kebutuhan industri pertambangan saat ini.

SETAHUN sudah UU Nomor 3 Tahun 2020 disahkan sebagai UU Minerba yang baru, sebagai revisi atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Sesuai amanat undang-undang, aturan turunan harus diselesaikan paling lambat satu tahun. Sayangnya sampai tulisan ini rampung *beleid* tersebut belum juga disahkan.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Ridwan Djamaluddin memastikan, satu peraturan pemerintah (PP) segera disahkan. "Yang paling maju adalah PP tentang pengusahaan. Statusnya semua menteri sudah paraf dan sudah ada di tangan Presiden. Tinggal tunggu Bapak Presiden tanda tangan," terang Ridwan dalam diskusi kelompok terarah berjudul "Satu Tahun UU Minerba: RPP Minerba Dan Kepastian Berusaha Pertambangan".

Kegiatan ini selenggarakan Majalah TAMBANG bekerja sama dengan Kantor Penasihat Hukum Armila & Rako, Jakarta. Armila banyak menangani klien perusahaan pertambangan.

Pemerintah menargetkan tiga peraturan pemerintah dan satu peraturan presiden sebagai aturan turunan dari UU Minerba yang baru. Ridwan mengakui, perumusan PP sebagai regulasi turunan terbilang lambat. Ia mengatakan, pada November 2020, pihaknya sudah siap menerbitkan satu PP. Ternyata ada tiga butir yang belum disepakati. "Tapi sekarang sudah selesai semua," tandasnya.

Satu isu yang menjadi bahan diskusi alot adalah mengenai apakah perusahaan yang baru masuk ke

Setahun lebih UU Minerba hasil amandemen disahkan. Aturan turunannya tak kunjung dikeluarkan. Dijanjikan dalam waktu dekat ditandatangani satu peraturan pemerintah.

industri tambang harus punya keterkaitan dengan perusahaan yang sudah lama berkecimpung di dunia pertambangan.

"Alasannya kita tidak ingin agar perusahaan abal-abal masuk industri pertambangan. Itu agak lama diskusinya karena sebagian orang menganggap ini seperti menutup peluang pemain baru masuk ke industri pertambangan," lanjut Ridwan.

Sementara dua RPP lain sedang dalam proses pembahasan. PP Wilayah Pertambangan sedang dalam proses harmonisasi. "Substansi sudah dibicarakan antar-kementerian. Harusnya tidak ada masalah yang substansial. RPP ketiga, RPP Pembinaan dan Pengawasan, sedang dibahas panitia antar-kementerian," lanjut Ridwan.

Ridwan mengakui bahwa diskusi memakan waktu lama karena pembahasannya sangat detail, dipelototi kata demi kata. Sehingga yang awalnya optimistis selesai Desember 2020, ternyata sampai lewat patokan satu tahun (10 Juni 2021) belum selesai juga. "Tapi semangatnya positif, agar tidak merugikan usaha kita," kata Ridwan.

Peraturan presiden (Perpres) juga sedang dibahas. "Di sini nantinya diatur pendelegasian kewenangan perizinan ke pemerintah provinsi yang mencakup dua topik besar, yakni galian C dan izin pertambangan rakyat (IPR). Sudah selesai harmonisasi, namun yang agak alot karena ada materi yang terkait dengan Kementerian Dalam Negeri," lanjut Ridwan.

Hal ini juga diperkuat Staf Khusus Menteri ESDM, Irwandy Arif. Guru Besar Pertambangan dari ITB ini mengatakan, proses RPP membutuhkan waktu sangat lama karena harus mendapat paraf dari semua kementerian terkait. Paraf terakhir sudah didapat dari Menteri Keuangan pada 9 Juni 2021. "Proses semua paraf tersebut sempat diulang, karena ada perubahan dari Sekretariat Negara (Setneg), meskipun perubahannya minor," terang Irwandy yang juga adalah Ketua Indonesia Mining Institute (IMI).

Ridwan Djamaluddin, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Meski terlambat, namun RPP sebagai aturan turunan UU Minerba sangat dibutuhkan industri pertambangan. Ia menyebut setidaknya ada empat klaster dalam UU Minerba yang baru.

Klaster pertama mengenai perbaikan tata kelola pertambangan nasional. Ini mengurusi lebih dari 5.637 izin, dari sebelumnya lebih dari 10.000 izin. Kehadiran UU Minerba yang baru ini mendorong untuk perbaikan tata kelola.

Klaster kedua, keberpihakan pada kepentingan nasional. "Apabila ada perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) atau kontrak karya (KK) yang dilepas, kesempatan pertama ditawarkan pada BUMN dan BUMD, kemudian baru pada swasta. Klaster ketiga, kepastian hukum dan kemudahan berinvestasi," tandas Irwandy.

Di sini Presiden langsung turun tangan untuk masalah *smelter*. Untuk masalah royalti, masalahnya bukan di UU tapi pada penetapan besarannya oleh Kementerian Keuangan. Klaster keempat adalah pengelolaan lingkungan hidup, termasuk aturan sanksi pidana di dalamnya.

Irwandy juga menegaskan bahwa pertambangan di Indonesia harus berkelanjutan dan transparan. Berkelanjutan secara tata kelola cadangan, eksploitasi/produksi, lingkungan, sosial, ekonomi serta ketersediaan dan kebutuhan jangka panjang. Transparan artinya publik dapat mengakses informasi mengenai cadangan, kandungan mineral dan pemanfaatan hasil tambang untuk pasar atau sektor lainnya.

****

Setidaknya ada dua hal yang menjadi sorotan terhadap PP dan perpres sebagai aturan turunan dari UU Minerba. Pertama, setahun pasca UU Minerba disahkan, aturan turunan baik PP maupun Perpres tidak kunjung diterbitkan.

Sejumlah asosiasi mengaku belum mendapat naskah RPP final, sehingga tidak mengetahui apa saja yang diatur dalam RPP tersebut. Padahal masukan dari para pemangku kepentingan, termasuk asosiasi,

Rizal Kasli, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI), menyoroti beberapa hal yang menjadi isu strategis. Ia melihat ada beberapa perubahan yang dibawa UU Nomor 3 Tahun 2020. Kewenangan perizinan kini beralih, dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Meski, lewat perpres, akan didelegasikan sebagian perizinan ke pemerintah daerah.

Ia berharap, beberapa hal mulai terurai, dari permasalahan tumpang tindih lahan, tata guna ruang, serta sengketa tanah pertambangan. Berbagai keruwetan itu ia harapkan ditangani lebih tepat, serta mendorong hilirisasi mineral, peningkatan nilai tambah, dan penyederhaan perizinan.Investor, katanya, membutuhkan jaminan investasi, keamanan berusaha.

Di bidang geologi dan eksplorasi, PERHAPI melihat terjadi penurunan daya tarik investasi eksplorasi minerba di lahan baru – istilah lain dari *green field* dalam 10 tahun terakhir. Tidak ada penemuan yang signifikan untuk menambah neraca sumber daya minerba, kecuali dari para pemegang izin usaha pertambangan.

PERHAPI merekomendasikan usulan kebijakan untuk isu hilirisasi, mulai dari percepatan penyusunan strategi nasional pengelolaan minerba, insentif untuk smelter terintegrasi, monitoring perkembangan proyek nasional dan percepatan pertumbuhan industri hilir berbasis logam dasar dan olahan batu bara.

PERHAPI mengajukan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kegiatan eksplorasi dan investasi. Mulai dari aturan kewajiban divestasi yang tetap menjamin pengembalian modal; alternatif pembiayaan untuk perusahaan tambang yunior agar bisa mendapatkan pendanaan eksplorasi.

PERHAPI mengajukan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kegiatan eksplorasi dan investasi. Mulai dari aturan kewajiban divestasi yang tetap menjamin pengembalian modal; alternatif pembiayaan untuk perusahaan tambang yunior agar bisa mendapatkan pendanaan eksplorasi, baik melalui penjualan saham di bursa maupun penerbitan obligasi privat, dengan didukung oleh standarisasi Kode Cadangan Mineral Indonesia (KCMI).

Untuk hilirisasi, PERHAPI melihat beberapa hal harus diperhatikan. Strategi besar pengelolaan sumber daya minerba, saat ini dinilai belum ada. Infrastruktur energi juga tidak ada. Maka, PERHAPI merekomendasikan usulan kebijakan untuk isu hilirisasi.

Mulai dari percepatan penyusunan strategi nasional pengelolaan minerba, insentif untuk *smelter* terintegrasi, monitoring perkembangan proyek nasional dan percepatan pertumbuhan industri hilir berbasis logam dasar dan olahan batu bara.

Ketua Umum Indonesia Mining Association (IMA) Ido Hutabarat menyampaikan beberapa isu terkini di pertambangan. Perubahan dari PKP2B atau KK menjadi IUPK terganjal dengan aturan royalti. Karena belum ada peraturan pemerintah, maka ada pertentangan antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan menyangkut urusan royalti. Padahal PT Arutmin Indonesia sudah mendapat perpanjangan menjadi IUPK. Saat ini besaran royalti PKP2B adalah 13,5%, jauh di atas IUP.

Ido juga mengangkat nasib wilayah PKP2B yang sudah dilepas, seperti lahan milik PT Tanito Harum dan PT Arutmin Indonesia. Menurut Ido, wilayah tersebut kini menjadi daerah tidak bertuan. ”Pemerintah harus memberi perhatian serius karena sesuai Pasal 169 UU Nomor 4/2009, apapun yang berubah dari PKP2B, pendapatan negara harus lebih tinggi,” tandas Ido.

Ido juga menanggapi isu nasib batu bara, yang penggunaannya oleh negara-negara G7 tak didukung lagi. Ia menyarankan, Indonesia terus saja berjalan bersama China dan India, yang jumlah penduduknya lebih dari setengah populasi dunia. Ia mengusulkan dibuat lembaga penelitian supaya bisa dibuat teknologi murah penangkap karbon, sehingga pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) bisa menghasilkan energi yang lebih bersih.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengapresiasi kehadiran UU Minerba yang baru. Meski, menurutnya, banyak detail yang masih perlu diatur.

Hendra menyebutkan, selain UU Minerba, kehadiran UU Cipta Kerja di akhir tahun 2020 juga memberi kepastian berusaha di sektor pertambangan. Aturan lintas sektoral, yang selama ini mengganggu, ketemu jalan keluarnya. ”Beberapa tahun terakhir ini kita lebih banyak disibukkan oleh aturan-aturan di luar lingkup Kementerian ESDM. Paling urgen saat ini adalah aturan royalti di bawah Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, serta aturan lahan pinjam pakai

di bawah Kementerian Kehutanan. Sudah ada PP No. 43/2021 tentang penyelesaian tumpang tindih lahan, jadi kita bisa coba cari solusi dengan memanfaatkan aturuan ini," tandas Hendra.

Hendra juga menyinggung soal hilirisasi. Ia mengaitkannya dengan tekanan negara-negara besar terkait transisi energi. "Kita sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir karena batu bara kita sebagian besar diekspor ke negara-negara Asia Pasifik. Tapi kita perlu bersama-sama mendukung menyuarakan kepentingan industri kita. Perlu menyamakan persepsi terkait visi energi, meskipun sebenarnya sudah banyak hal yang dilakukan perusahaan tambang untuk berkontribusi mengurangi emisi gas rumah kaca," tandasnya lagi.

Dalam nada yang hampir sama Singgih Widagdo dari Indonesia Mining and Energi Forum (IMEF) menyampaikan beberapa hal terkait industri batu bara. Saat ini 54% ekspor batu bara Indonesia hanya ke China dan India. "Sementara China di tahun 2026 juga akan mengurangi pemakaian batu bara, sehingga akan ada ribuan IUP yang terganggu. Kalau pengendalian tidak dilakukan, nanti akan ada investasi berlebih. Mereka sudah menyiapkan tapi tidak bisa berproduksi. PP juga harus mengendalikan IUP," tandas Singgih.

Ia juga mengingatkan bahwa Kesepakatan Paris sudah diratifikasi lewat UU Nomor 16/2016 tentang Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim. Emisi PLTU juga diatur di situ.

Namun, katanya, bukan berarti kita melawan penggunaan batu bara. Hal yang penting menurutnya adalah bagaimana kita sebagai pelaku usaha bisa menaikkan potensinya, menekan emisinya. "Ini sesuai dengan orientasi kita untuk mencari solusi dan melayani, karena apapun yang ditetapkan tetap masalah akan selalu ada," tandas Singgih.

Pentingnya Kegiatan Eksplorasi

Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) M. Burhannudinnur menegaskan pentingnya kegiatan eksplorasi. "Semua diawali dari investasi dan kegiatan eksplorasi sehingga kita harus mendorong ke sana. Arah dan peta investasi eksplorasi akan menentukan peta industri pertambangan. PP diharapkan memudahkan kegiatan eksplorasi".

Ia kemudian membedah beberapa hal yang ada dalam UU Minerba yang baru terkait eksplorasi. Burhannudinnur menilai pasal 17B UU Minerba adalah sebuah pasal terobosan dalam rangka menggalakkan kembali kegiatan eksplorasi karena termasuk mencakup wilayah-wilayah baru, melalui mekanisme penugasan dengan cara melakukan "penyelidikan dan penelitian" dalam rangka penyiapan WIUP Mineral Logam dan WIUP Batubara.

Namun IAGI memberi masukan beberapa hal. Pertama mekanisme penentuan wilayah untuk penugasan haruslah meliputi wilayah-wilayah *green fields*. Mekanisme penggunakan *right to match*, diatur sede-

China di tahun 2026 juga akan mengurangi pemakaian batu bara, sehingga akan ada ribuan IUP yang terganggu. Kalau pengendalian tidak dilakukan, nanti akan ada investasi berlebih, juga sudah menyiapkan tapi tidak bisa berproduksi.

Setiap kegiatan eksplorasi dilakukan pelaporan hasil eksplorasi dan estimasi sumber daya, dan harus dilakukan oleh orang yang kompeten, dengan standar dan norma yang berlaku secara nasional dan diakui secara internasional seperti SNI dan Kode KCMI.

mikian rupa untuk memperlakukan pihak yang melakukan penugasan secara *fair*.

Kedua, perumusan kembali mekanisme dan persyaratan lelang utamanya tentang besaran dan format penentuan nilai kompensasi data dan informasi (KDI). Ketiga, mekanisme penugasan ini dipercaya mampu membuka peluang investasi di sub sektor hulu atau eksplorasi, namun masih adanya mekanisme lelang bagi pihak yang melakukan penugasan untuk mendapatkan WIUP atas daerah tersebut bisa jadi kontra produktif.

Pasal lainnya terkait Pasal 36A yang menjamin keberlanjutan industri pertambangan melalui konsep konservasi**.** Namun IAGI memberi beberapa masukan. Pertama, dari setiap kegiatan eksplorasi dilakukan pelaporan hasil eksplorasi dan estimasi sumber daya, dan harus dilakukan oleh orang yang kompeten, dengan standar dan norma yang berlaku secara nasional dan diakui secara internasional seperti SNI dan Kode KCMI.

"Hal kedua semua terminologi tentang sumber daya dan cadangan perlu mengacu pada standar dan norma yang beralaku secara nasional dan diakui secara internasional. Kemudian penentuan besaran dana untuk kegiatan eksplorasi lanjutan supaya berkelanjutan," tandas Burhannudinnur.

IAGI juga mempertanyakan kebijakan untuk perusahaan yang masa berlaku izinnya akan berakhir dan tidak mungkin diperpanjang lagi, apakah masih diharuskan melakukan kegiatan eksplorasi lanjutan. Ini tentu harus dijawab dalam aturan turunan.

KOMIT DI TENGAH HARGA GLOBAL MELAMBUNG

EGENIUS SODA
egen@tambang.co.id

Bertempat di Bali, para pemasok batu bara dikumpulkan. Di kesempatan itu ditandatangani komitmen untuk memenuhi kebutuhan batu bara bagi pembangkit milik PLN.

BERTEMPAT di Bali, para pemasok batu bara untuk PLTU berkumpul. Ada 48 mitra yang selama ini menjadi pemasok batu bara untuk pembangkit listrik. Dalam kesempatan itu dilaksanakan penandatanganan Komitmen Pemenuhan Pasokan Batu Bara untuk Ketenagalistrikan Umum. Ini dilakukan karena kepastian pemenuhan batu bara sangat penting bagi PLN demi menjaga keberlanjutan dan keandalan pasokan listrik ke masyarakat.

"Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dirjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM atas dukungannya untuk memastikan ketersediaan batu bara untuk PLN, serta kepada mitra pemasok yang memenuhi komitmennya dalam mengutamakan kepentingan pasokan batu bara dalam negeri," demikian Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini.

Mantan Direktur Utama Bank Mandiri ini mengatakan sebanyak 48 mitra pemasok telah berkomitmen untuk memenuhi alokasi pasokan batu bara sesuai kontrak dan menambahkan alokasi sesuai kemampuan tambang. Bahkan dari koordinasi yang telah disepakati tambahan pasokan batu bara lebih dari 4,6 juta ton untuk periode Juli-Desember 2021.

"Kami sangat menghargai peran serta Ditjen ESDM dan semua mitra pemasok dalam mendukung kontinyuitas pasokan tenaga listrik di Indonesia," lanjut Zulkifli.

Hingga kini upaya mencari tambahan juga akan terus dilakukan PLN, demi terpenuhinya kebutuhan pasokan batu bara untuk pembangkitan tenaga listrik.

Bertempat di Bali, para pemasok batu bara dikumpulkan. Di kesempatan itu ditandatangani komitmen untuk memenuhi kebutuhan batu bara bagi pembangkit milik PLN.

Untuk diketahui, sejak Desember 2020 telah terjadi penurunan pasokan batu bara untuk sektor ketenagalistrikan. Sebabnya kondisi cuaca ekstrem, penurunan produksi tambang, serta kenaikan harga batu bara di pasar Internasional.

Kondisi keterbatasan pasokan batu bara tersebut telah menyebabkan terjadinya penurunan stok batu bara di seluruh PLTU PLN. Namun, keterbatasan pasokan batu bara untuk PLTU PLN pada awal tahun 2021 diatasi dengan melakukan penambahan pasokan dari para pemasok eksisting maupun pemasok baru.

"Kami berharap sinergitas antara PLN mitra pemasok dan Ditjen Minerba dapat terus berlanjut dengan baik demi menjaga keandalan listrik di Tanah Air," harapnya.

Saat ini kepastian pasokan batu bara merupakan quick win dalam pemenuhan kebutuhan listrik nasional. PLN tetap berkomitmen untuk memprioritaskan bauran energi baru terbarukan (EBT) sebagai wujud nyata dari transformasi PLN.

Pasokan batubara untuk PLTU PLN mengalami penurunan pasokan pada awal tahun 2021, disebabkan antara lain karena kondisi cuaca ekstrem, penurunan produksi tambang karena banjir, dan adanya kenaikan harga batubara di pasar internasional.

Di bulan Mei pasokan batu bara ke PLTU PLN turun sekitar 10% dari realisasi bulan sebelumnya. Sementara realisasi pasokan bulan sebelumnya hanya tercapai sekitar 78% dari rencana. Harga batu bara di pasar Internasional yang melonjak tinggi, menyebabkan adanya perbedaan harga yang cukup signifikan dengan harga batubara dalam negeri.

Hal ini menjadi insentif bagi pemasok/trader batu bara untuk melakukan ekspor, sehingga pasokan batu bara di dalam negeri menjadi semakin terbatas. Sementara kebutuhan pasokan untuk PLTU PLN dipenuhi dengan cara memastikan pemasok untuk memenuhi kewajiban sesuai alokasi kontraknya, dan meminta penambahan pasokan batu bara pada pemasok yang masih memiliki kelebihan DMO. T

Zulkifli Zaini, Direktur Utama PLN

PABRIK HPAL PERTAMA MULAI PRODUKSI

EGENIUS SODA
egen@tambang.co.id

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut B Pandjaitan bersama sejumlah Menteri hadir dan menyaksikan produksi perdana pabrik bahan baku baterai. Smelter ini mengolah nikel menjadi produk MHP dengan kapasitas 365 ribu ton per tahun. Ini merupakan *smelter* pertama yang memproduksi bahan baku baterai kendaraan listrik.

TONGGAK penting berhasil ditorehkan PT Halmahera Persada Lygend (HPL) seiring mulai produksinya *smelter* yang memproduksi bahan baku baterai kendaraan listrik. Ini merupakan *smelter* pertama yang mengolah nikel kadar rendah menjadi produk Mixed Hydroxide Precipitate (MHP). Produk MHP ini merupakan bahan baku baterai untuk kendaraan listrik.

Smelter ini dibangun di Kawasan Industri Pulau Obi yang dikelola Harita Group. *Smelter* milik PT Halmahera Persada Lygend ini memurnikan nikel lewat proses hidrometalurgi *High Pressure Acid Leaching* (HPAL) dan menghasilkan 365 ribu ton per tahun. Ke depan bakal terus ditingkatkan.

Sebagaimana diketahui *MHP* merupakan produk antara dari proses pengolahan dan pemurnian nikel kadar rendah. Dari produk ini kemudian akan diproses lebih lanjut menjadi nikel sulfat dan kobalt sulfat. Untuk hal ini, Group Harita juga sedang mengembangkan fasilitas produksi lanjutan untuk menghasilkan nikel sulfat dan kobalt sulfat. Keduanya merupakan material utama baterai kendaraan listrik.

"Halmahera Persada Lygend merupakan fasilitas pengolahan dan pemurnian bijih nikel kadar rendah (*Limonite*) dengan teknologi *hydrometallurgy* yang dikenal dengan *High Pressure Acid Leach* (*HPAL*). Konstruksi *HPAL* dimulai pada Agustus 2018 dan siap berproduksi secara komersial. Ini menjadi pabrik *HPAL* pertama di Indonesia," jelas Stevi Thomas selaku Komisaris Utama Halmahera Persada Lygend.

Stevi juga menjelaskan kehadiran pabrik pemurnian nikel kadar rendah pertama di Indonesia ini telah masuk sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) akan sangat bermanfaat. Di antaranya terkait peningkatan

Peresmian smelter ini ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatangan prasasti. Prosesi ini juga menandai ekspor perdana MHP dari Indonesia.

Menko Luhut memastikan Pemerintah akan mendukung pengembangan industri berbasis nikel. Diharapkan menjadi titik awal pengembangan hilirisasi ke depan dan mendukung industri kendaraan listrik.

pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Peresmian *smelter* ini ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatangan prasasti oleh Mesko Luhut B Pandjaitan. Prosesi ini juga menandai ekspor perdana MHP dari Indonesia. Usai peresmian, para menteri berkeliling pabrik meninjau proses produksi *HPAL*, seperti ruang kontrol utama dan bagian produksi lainnya.

Menko Luhut memastikan Pemerintah akan mendukung pengembangan industri berbasis nikel. "Ini akan menjadi titik awal pengembangan hilirisasi ke depan dan mendukung industri kendaraan listrik. Pemerintah akan mendukung pengembangan *HPAL* di Indonesia. Industri ini ikut berkontribusi untuk mewujudkan cita-cita dalam upaya penurunan kadar emisi dari penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil," tandas Luhut.

Pemurnian nikel dengan teknologi hidrometalurgi *HPAL* menghasilkan produk yang sangat bermanfaat dalam upaya mengurangi emisi. Teknologi ini juga sangat mendukung konservasi mineral khususnya nikel. Teknologi *HPAL* mampu mengolah nikel kadar rendah yang selama ini tidak diolah. Kini material nikel kadar rendah di Indonesia telah memiliki nilai tambah dan menjadi produk yang sangat strategis.

Ia dalam sambutannya mengatakan pihaknya sangat mendukung langkah perusahaan yang mendorong hilirisasi produk tambang khusus nikel. Ia pun meminta semua pihak untuk mendukung langkah ini. "Industri ini harus kita dukung bersama. Halmahera Persada Lygend adalah pabrik pertama bahan baku baterai kendaraan listrik di Indonesia dan nantinya akan muncul di wilayah lainnya. Tidak kalah penting, industri ini akan menyerap lebih dari 20 ribu tenaga kerja nantinya. Pembangunan daerah akan lebih cepat. Ini adalah aset bangsa. Kita harus lindungi. Namun lingkungan juga harus dijaga," tandas Luhut.

Sebagaimana diketahui, teknologi *HPAL* mampu mengolah nikel kadar rendah yang selama ini tidak diolah menjadi produk *Mixed Hydroxide Precipitate* (MHP). Dari MHP kemudian diolah lagi menjadi Nikel Sulfat ($NiSO_4$) dan Kobalt Sulfat $CoSO_4$) yang merupakan bahan baku baterai kendaraan listrik. Material bijih nikel didapat dari tambang yang dioperasikan oleh PT Trimegah Bangun Persada dan PT Gane Permai Sentosa.

"Indonesia memiliki sumber daya dan cadangan nikel serta kobalt yang cukup, didukung oleh mineral lain seperti tembaga, aluminium dan timah. Ini akan menjadi modal besar untuk bermain dalam industri kendaraan listrik," ungkap Luhut.

Apalagi pengolahan nikel yang menggunakan ja-

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut B Pandjaitan bersama sejumlah Menteri hadir dan menyaksikan produksi perdana pabrik bahan baku baterai.

lur HPAL akan banyak memanfaatkan nikel kadar rendah (limonit). Nikel limonit ini masih cukup melimpah di Indonesia karena selama ini tidak banyak dimanfaatkan. Oleh karenanya *smelter* HPAL ini juga menjadi bagian dari peningkatan nilai tambah dari sumber daya yang dimiliki Indonesia.

"Untuk itu kita perlu dukung dan terus didorong untuk terjadi peningkatan investasi agar ada penambangan *line* (jalur) produksi, sehingga kita mendapat sebesar-besarnya manfaat dari proses produksi ini," terang Luhut.

Tidak hanya produknya yang akan menjadi cikal bakal industri kendaraan listrik di Indonesia. Kehadiran *smelter* ini diharapkan menimbulkan dampak ganda bagi masyarakat. Investasi yang digelontorkan untuk tahap pertama lebih dari USD 1 miliar. Ini diharapkan akan menjadi faktor pendorong dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan daerah mulai dari peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Indonesia sendiri tengah mendorong pengembangan kendaraan listrik. Diperkirakan pada 2030, masyarakat secara global sadar untuk mengurangi emisi dan akan mendorong kenaikan permintaan kendaraan listrik yang nilainya dapat mencapai 31,1 juta unit. Di Indonesia, Pemerintah menargetkan dapat memproduksi 600 ribu unit kendaraan listrik roda empat dan 2,45 juta unit roda dua. Dalam hal ini, peningkatan permintaan kendaraan listrik dalam meningkatkan permintaan listrik terutama jeni Nickel-Cobalt-Mangan (NCM).

Di kesempatan itu, Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik mengungkapkan dengan sumber daya yang dimiliki, dan berkembangnya industri nikel di Halmahera Selatan, akan membantu pembangunan dae-

Pemerintah mendukung langkah perusahaan yang mendorong hilirisasi produk tambang khusus nikel.

Usai peresmian, para menteri berkeliling pabrik meninjau proses produksi HPAL, seperti ruang kontrol utama dan bagian produksi lainnya.

rah. Usman berharap, perkembangan industri ini di dorong dengan percepatan pembangunan dan pengembangan industri lainnya, tidak hanya nikel.

Ada sejumlah Menteri yang turut hadir. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Investasi/Kepala Badan Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba, Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik, serta sejumlah pejabat lainnya.

Untuk diketahui, Harita Group adalah perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan PT Harita Jayaraya yang bergerak dalam bidang pertambangan. Keseluruhan operasi diintegrasikan dalam bentuk Kawasan Industri dan merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional sesuai dengan Perpres Nomor 109 Tahun 2020. PT Trimegah Bangun Persada bertindak selaku pengusul dan pelaksana.

Harita Group memiliki 2 Izin Usaha Pertambangan (IUP), pabrik peleburan *(smelter)* dan pabrik pemurnian di Pulau Obi. Sejak 2016 sudah membangun smelter yang dijalankan oleh PT Megah Surya Pertiwi (MSP) dan PT Halmahera Jaya Feronikel. Kedua perusahaan ini membangun *smelter* yang mengolah nikel dengan teknologi pirometalurgi *RKEF* untuk menghasilkan feronikel.

Kegiatan *smelter* perusahaan didukung dua perusahaan pemegang IUP nikel yakni PT Gane Permai Sentosa dan PT Trimegah Bangun Persada.

"Diharapkan kawasan ini menjadi pusat pengembangan dan pusat pertumbuhan wilayah di Pulau Obi khususnya dan di Halmahera, serta Maluku Utara secara umum," tandas Menko Luhut.

Salah satu yang didorong oleh Pemerintah terkait kesiapan perusahaan terkait dengan tenaga kerja. Sehingga nantinya akan dibangun politeknik di kawasan Industri seperti ini menjadi penting. Hal ini berguna memberi kesempatan pada masyarakat lokal untuk menggali ilmu dan bekerja di industri *smelter*.

Guna mendukung Industri ini, kesiapan tenaga kerja menjadi penting. Perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal menjadi perhatian. Untuk itu, diperlukan fasilitas pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja yang akan bekerja di industri *smelter* ini.

Ini menjadi langkah awal bagi hilirisasi nikel untuk mendukung industri kendaraan listrik. Diharapkan ke depan Indonesia sungguh menjadi pemain penting dalam industri kendaraan listrik global.

Kehadiran pabrik pemurnian nikel kadar rendah pertama di Indonesia ini telah masuk sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) akan sangat bermanfaat.

SETAHUN GOSOWONG DI TANGAN INDOTAN

Tambang emas Gosowong resmi dipegang Indotan setahun yang lalu. Proses transisi berjalan mulus. Agenda eksplorasi dicanangkan lebih agresif, umur tambang jadi makin panjang. Tetap tangguh meskipun dihadang kendala diterpa badai pandemi.

Proses divestasi tambang biasanya selalu diwarnai dinamika yang panas. Mulai dari tarik-ulur kalkulasi harga hingga gesekan sosial dan politik. Namun tidak demikian dengan proses ambil alih blok Gosowong. Tambang emas di Indonesia yang terletak di Halmahera Utara, Maluku Utara itu, transisinya berjalan nyaris tanpa kemelut.

Sejak Maret 2020, tambang yang dioperasikan oleh PT Nusa Halmahera Minerals itu, resmi diakuisisi oleh PT Indotan Halmahera Bangkit. Anak usaha Indotan Group ini memborong 75 persen saham Nusa Halmahera Minerals dari Newcrest Singapore Holdings Pte Ltd, perusahaan tambang emas kenamaan asal Australia. Sedangkan 25 persen saham sisanya, masih dipegang pelat merah yang sedari awal ikut mengelola tambang tersebut, PT Antam.

Tahun ini menjadi tahun pertama perjalanan Gosowong dikelola Indotan, di bawah kendali pimpinan anyar, Robert Nitiyudo Wachjo sebagai Presiden Direktur Nusa Halmahera Minerals (NHM) dan sekaligus pemilik saham mayoritas. Di tangan pria yang karib disapa Haji Robert oleh para karyawannya dan masyarakat lingkar tambang itu, sejumlah perubahan terjadi. Dimulai dari hal yang amat mendasar, yang menyangkut profesionalisme dan produktivitas karyawan.

Saat capaian produksi melampaui target bulanan, karyawan diberi bonus tambahan. Nilainya tak tang-

Ramdani Sirait, Manajer Komunikasi NHM

gung-tanggung, secara akumulasi bisa mencapai puluhan miliar rupiah sekali tebar.

Karyawan dimanjakan dengan peningkatan fasilitas dan sarana penunjang. Tempat tinggal direnovasi dan jumlahnya ditambah, supaya semakin nyaman. Alokasi anggaran untuk makanan dan minuman diperbesar untuk memenuhi kebutuhan gizi. Bahkan, Indotan juga melakukan bersih-bersih peralatan. Armada tambang dan alat berat baru didatangkan, sedangkan alat yang masih layak pakai diremajakan.

Berbagai upaya tersebut dilakukan guna memacu semangat kerja karyawan. Ujungnya untuk memacu produktivitas.

"Semangat dan kerja keras diapresiasi. Kesejahteraan ditingkatkan. Bahkan lebih baik dibanding sebelumnya. Yang menarik dari kepemimpinan baru Indotan di Gosowong adalah komunikasi yang sangat menyenangkan antara pemilik perusahaan dengan seluruh karyawan," ujar Manajer Komunikasi NHM, Ramdani Sirait.

Dari aspek Manajemen Penambangan, Indotan menargetkan peningkatan umur tambang. Jika sebelumnya cadangan di Gosowong diperkirakan habis dalam kurun dua tahun, tepatnya di tahun 2022, maka kini usianya diupayakan lebih panjang lagi.

General Manager Perencanaan dan Produksi NHM, Rado Lawolo menyampaikan, di bawah kendali Robert, Nusa Halmahera Minerals gencar melakukan eksplorasi. Alokasi anggaran dibuat jauh makin gemuk. Sejumlah area yang potensial di dalam kawasan Kontrak Karya perusahaan, dijajaki tiap jengkalnya untuk menemukan ceruk emas baru.

Robert membawa semangat baru bagi Nusa Halmahera Minerals. Kesejahteraan pekerja makin diperhatikan, *upgrade* peralatan dan fasilitas, dan memperlebar kesempatan kerja bagi masyarakat lingkar tambang. Di saat yang sama, agenda eksplorasi dicanangkan lebih agresif, dan diharapkan membawa hasil peningkatan cadangan.

Di tambang Gosowong, Newcrest sebelumnya tak hanya pegang Nusa Halmahera Minerals, tapi juga mengendalikan sepenuhnya saham PT Puncakbaru Jayatama, kontraktor eksplorasi yang bekerja di sana. Dengan adanya akuisisi oleh Indotan, Puncakbaru ikut pindah tangan. Para pekerja yang semula jadi kontraktor ditetapkan naik jadi karyawan permanen di Nusa Halmahera Minerals.

"Penetapan itu mungkin tampak sederhana, namun bagi para karyawan yang bekerja di Gosowong, keputusan Indotan tersebut membawa harapan baru dan memberikan jaminan kesetaraan di antara sesama karyawan. Tentunya ini menambah motivasi seluruh karyawan untuk bekerja yang maksimal, dengan tentunya mengutamakan aspek keselamatan dan kesehatan kerja," Rado menambahkan.

Menambang dengan Hati

Tak berselang lama selepas penandatanganan akuisisi, saat Indotan resmi mengelola Nusa Halmahera Minerals, Robert Nitiyudo langsung keliling kampung, menemui pemangku kepentingan di desa-desa. Dimulai dari kepala desa hingga camat di lima kecamatan dan 83 desa lingkar tambang.

Dalam kesempatan tersebut, Robert menggali potensi dan peluang kerjasama. Tujuannya untuk meningkatkan pelaksanaan program Pengembangan dan Pemberdayan Masyarakat (PPM), yang melingkupi bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur. Yang paling utama, Robert memperlebar pintu masuk bagi penduduk lokal untuk bergabung bekerja di blok Gosowong.

"Komunikasi kami dengan masyarakat lingkar tambang jadi makin baik, Begitu juga dengan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa-Desa," Ungkap Manajer Kinerja Sosial Nusa Halmahera Minerals, Hansed Pieter Lasa.

Selain program-program yang digariskan dalam Keputusan Menteri ESDM No 1824 K/ 30/ MEM/ 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan

Rado Lawolo, *General Manager* Perencanaan dan Produksi NHM

Hansed Pieter Lasa, Manajer Kinerja Sosial NHM.

Pemberdayaan Masyarakat, Nusa Halmahera Minerals di bawah kepemimpinan Indotan saat ini melakukan program yang lebih luas lagi. Ada program bedah rumah yang saat ini sudah merenovasi dan membangun kembali 46 rumah, dan 131 rumah sedang dikerjakan. Dari targer 1000 rumah untuk tahun 2021 ini, Rumah-rumah tersebut adalah rumah-rumah penduduk di lingkar tambang yang dinilai tidak layak huni. Tim Kinerja Sosial Nusa Halmahera Minerals keliling desa-desa Bersama Pemerintah Desa untuk menentukan rumah-rumah yang akan dibantu. Ini adalah bagian dari program Haji Robert Peduli.

Selain itu, Program Robert Haji Peduli juga membantu masyarakat di seluruh lingkar tambang yang membutuhkan pertolongan kesehatan. Tim Kinerja Sosial perusahaan ini menemukan banyak sekali anggota masyarakat yang sakit, bahkan sudah sakit bertahun-tahun namun belum mendapatkan pertolongan kesehatan. Mereka yang sakit tersebut dievakuasi ke rumah sakit-rumah sakit yang ada di kota Tobelo, dan Ternate. Ada juga yang harus dievakusasi dan dirawat di rumah sakit di Kota Manado, bahkan di Jakarta. Robert Nitiyudo Wachjo memerintah seluruh Tim Kinerja Sosial untuk mencari seluruh orang sakit dan harus segera mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang seharusnya.

Program Haji Robert Peduli ini juga menyentuh masyarakat yang harus dibantu secara materi secara rutin. Ada santunan rutin yang diberikan untuk anak-anak yatim, yatim piatu dan kaum dhuafa lainnya yang membutuhkan santunan rutin tersebut. Tidak sedikit anggota masyarakat yang menitikkan air mata menerima bantuan tersebut. Terutama mereka yang tinggal di pedalaman. Tim Kinerja Sosial perusahaan tersebut merasa bahagia melihat kebahagiaan masyarakat tersebut, meskipun harus dengan sangat Lelah pergi ke pedalaman dan pulau-pulau terpencil untuk mengantar santunan tersebut.

Nusa Halmahera Minerals berwajah baru sekarang. Wajah yang mengundang senyum masyarakat dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

”Ini cara Indotan berkomunikasi dengan para pe-

Nusa Halmahera Minerals di bawah kepemimpinan Indotan saat ini melakukan program yang lebih luas lagi. Ada program bedah rumah yang saat ini sudah merenovasi dan membangun kembali 46 rumah, dan 131 rumah sedang dikerjakan.

Tim Kinerja Sosial secara rutin mencari masyarakat yang menderita sakit dan langsung segera mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang semestinya.

mimpin di daerah serta masyarakat. Lebih kekeluargaan," Ramdani menambahkan.

Bersama Hadapi Covid-19

Pandemi Covid-19 yang lebih dulu merebak di berbagai belahan dunia, mulai masuk ke Indonesia persis saat Indotan menduduki Gosowong, awal tahun 2020. Virus ini tak tebang pilih, daerah terpencil seperti tempat operasi Nusa Halmehera Minerals pun ikut terpapar.

Dengan instruksi Robert, Nusa Halmahera Minerals membantu Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pencegahan serta penanggulangan Covid-19. Diawali dengan mengirim bantuan Alat Pelindung Diri untuk paramedis, ribuan masker dan *hand sanitizer*, hingga sembako di awal virus ini meluas di sekitar Mei 2020.

Layanan kesehatan di Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Utara diperkuat. Nusa Halmahera ikut menyumbang ventilator untuk Rumah Sakit Umum Daerah di Ternate dan Tobelo dengan jumlah yang tidak sedikit. Membantu penyediaan mesin *Polymerase Chain Reaction* (PCR) untuk Pemerintah Halmahera Utara. Bahkan, Nusa Halmahera Minerals berani merogoh kocek untuk menanggung biaya operasional laboratorium PCR untuk sepanjang tahun 2021 ini, mulai dari gaji dokter, paramedis, termasuk petugas keamanan.

Intinya, perusahaan tersebut ingin bersama-sama seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Maluku Utara dan di Kabupaten Halmahera Utara untuk bersama-sama menghadapi Covid-19 ini. T

SAAT-SAAT BATU BARA TIDAK LAGI MEMBARA

MUFLIHUN HIDAYAT
muflihhidayat@tambang.co.id

Negara-negara kaya mempercepat dekarbonisasi. Pemakaian batu bara sebagai sumber energi segera berakhir. Lembaga keuangan tidak mau lagi membiayai bisnis batu bara. Pemerintah Indonesia sedang menyusun *Grand Strategy Energy*. Sampai kapan batu bara bertahan.

PARA pemimpin negara yang tergabung dalam G7 bertemu di Carbis Bay, Cornwall, Inggris pada pertengahan Juni 2021 lalu. Sekadar mengingatkan, Negara yang tergabung dalam G7 ini adalah Kanada, Prancis, Jerman, Jepang, Italia, Britania Raya dan Amerika Serikat. Kelompok negara ini dikenal sebagai kelompok negara maju.

Dalam pertemuan kali ini, pembahasan soal transisi energi menjadi salah satu agenda penting dalam pertemuan ini. Di akhir pertemuan dihasilkan komunike yang di dalamnya termasuk sektor energi. Para pemimpin negara sepakat mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang lebih ramah lingkungan.

Selain itu, di sektor energi juga disepakati meningkatkan efisiensi energi, menekan konsumsi energi yang boros dan meningkatkan inovasi sambil menjaga keamanan energi. Disebutkan, negara-negara ini berkomitmen mencapai sistem energi yang mendorong dekarbonisasi pada tahun 2030-an.

Kemudian secara internasional akan menyelaraskan pembiayaan internasional untuk mendukung tercapainya global emisi GRK nol kabron selambat-lambatnya tahun 2050. Lebih cepat 10 tahun dari yang ditargetkan masyarakat global pada 2060.

”Kami akan menghapus secara bertahap dukungan langsung pemerintah untuk energi berbahan bakar fosil sesegera mungkin. Tentu dengan pengecualian terbatas yang konsisten dengan jalur netralitas iklim yang ambisius, Perjanjian Paris, tujuan 1,5°C dan ilmu

Para pemimpin negara yang tergabung dalam G7 bertemu di Carbis Bay, Cornwall, Inggris pada pertengahan Juni 2021 lalu dengan agenda transisi energi.

Negara-negara kaya mempercepat dekarbonisasi. Pemakaian batu bara sebagai sumber energi segera berakhir. Lembaga keuangan tidak mau lagi membiayai bisnis batu bara.

pengetahuan terbaik yang tersedia. Agar kredibel, ambisi perlu didukung tindakan nyata di semua sektor ekonomi dan masyarakat kita". Demikian bunyi salah satu komunike tersebut.

Salah satu sumber energi yang mendapat perhatian serius terkait dengan pengurangan emisi karbon adalah batu bara. Disebutkan, batu bara adalah bahan bakar utama yang paling kotor di dunia. Mengakhiri penggunaan batu bara dipandang sebagai langkah besar oleh para pencinta lingkungan.

Namun para pegiat lingkungan menginginkan jaminan bahwa negara-negara kaya akan memenuhi janji sebelumnya untuk membantu negara-negara miskin mengatasi perubahan iklim. Untuk itu negara-negara G7 akan mengakhiri pendanaan pembangkitan batu bara baru di negara berkembang.

****

Tentu saja, gerakan masyarakat global yang terus mendorong pemanfaatan energi bersih, mulai menggoyang industri batu bara. Apalagi, sejumlaha negara bahkan sudah mulai meninggalkan batu bara dan menggantinya dengan energi bersih.

Tidak hanya itu, lembaga-lembaga keuangan pun mulai mundur dari pembiayaan untuk kegiatan pertambangan batu bara. Juga pembiayaan untuk pembangkit listrik berbasis batu bara. Beberapa lembaga keuangan dan perbankan mungumumkan tidak akan membiayai pembangkit listrik berbasis batu bara. Juga kegiatan pertambangan batu bara dan eksploitasi minyak bumi.

Baru-baru ini Bank Pembangunan Asia (ADB) menyampaikan rencana mengakhiri pembiayaan proyek PLTU, eksploitasi minyak dan penambangan batu bara. Rencana ini menjadi bagian dari rancangan kebijakan energi baru yang berfokus pada dukungan transisi rendah karbon di Asia

Ke depan ADB akan fokus pada pembiayaan proyek gas alam, termasuk jaringan pipa, terminal LNG, pembangkit berbahan bakar gas. Itu pun hanya jika tidak ada opsi energi lain yang lebih ramah lingkungan dengan biaya yang setara.

Bank yang sahamnya dimiliki Pemerintah Jepang dan AS ini juga berkomitmen membantu 68 negara anggotanya dalam membiayai teknologi pengendalian emisi pada pembangkit listrik yang ada. Namun tidak akan berinvestasi dalam memodernisasi atau meningkatkan pembangkit berbasis batu bara.

Lembaga ini juga akan mendukung rekayasa ulang dengan fokus pada penggunaan bahan bakar yang lebih bersih, seperti gas atau energi terbarukan. ADB selama ini membiayai proyek strategis sektor energi di beberapa negara Asia seperti India, Cina, Indonesia dan Pakistan.

Selain ADB, Bank asal Malaysia, Malayan Banking Bhd (Maybank) juga mengumumkan tidak lagi membiayai pembangkit listrik baru yang memakai baru bara. Ini dilakukan sebagai bagian dari upaya bank terbesar Negeri Jiran ini mendukung upaya menekan emisi karbon.

Maybank akan mengalokasikan pembiayaan lebih besar pada upaya pengembangan energi baru dan terbarukan yang lebih bersih. Saat ini alokasi biaya untuk sektor batu bara hanya 0,2 persen.

Ditegaskan, yang dilakukan bank ini sejalan dengan komitmen perusahaan Nol Deforestasi, Nol Gambut Baru, dan Nol Eksploitasi. Lebih penting lagi

apa yang dilakukan saat ini guna mencapai emisi karbon nol bersih pada 2050.

CIMB Group Holdings Bhd ternyata sudah lebih dulu menegaskan komitmennya untuk menghapus batu bara dari portofolionya pada 2040. CIMB Group Holding Bhd memproklamirkan diri sebagai grup perbankan pertama di Malaysia dan Asia Tenggara yang menghapus pembiayaan untuk bisnis batu bara.

Jauh sebelum itu ada juga sejumlah bank swasta di Asia yang telah mengurangi eksposur mereka ke bahan bakar termal, terutama batu bara. Seperti Singapura DBS yang bulan lalu berjanji akan menghentikan eksposur batu bara termal pada 2039. Kemudian Sumitomo Mitsui Banking Jepang dan Mizuho Bank telah menarik diri dari proyek pengembangan tenaga listrik berbahan bakar batu bara domestik dan luar negeri pada Mei dan Juni 2019.

Ada juga Bank investasi Australia Macquarie Group, juga mengumukan akan menghentikan pembiayaan proyek batu bara pada 2024. Sejauh ini eksposur bank yang berbasis di Sydney ke industri batu bara terbilang kecil. Dari catatan yang dipublikasi sampai Maret hanya menyumbang AUSD 100 juta atau setara USD 77,8 juta.

Demikian juga dengan Grup Perbankan Australia dan Selandia Baru (ANZ Bank), Commonwealth Bank of Australia dan Westpac. Ke tiga perbankan ini mengisyaratkan niat mereka menghentikan pembiayaan batu bara. Hampir seluruh perbankan di wilayah Asia Pasifik sudah menyatakan komitmen mereka menghentikan bisnis batu bara.

Hanya perbankan Indonesia belum terdengar menyatakan komitmen mereka. Mungkin hal ini disebabkan keyakinan pasar potensial batu bara ada di wilayah Asia Pasifik. Toh, komitmen perbankan Asia ini, menjadi tanda bahaya bagi masa depan industri batu bara. Mungkin bara batu bara akan lebih cepat meredup.

*****

Langkah perbankan dan lembaga keuangan Asia dalam mengurangi pembiayaan sektor energi fosil semakin memperkuat upaya negara-negara tersebut menekan emisi karbon. Di Jerman, keputusan Mahkamah Konstitusi mendorong pemerintahan Kanselir Angela Merkel mengusulkan target pengurangan emisi yang dipercepat. Pembangkit dari batu bara harus ditutup lebih cepat dari sebelumnya. Dari jadwal semula 2038 menjadi 2030.

Pemerintah Korea Selatan dalam pertemuan tingkat tinggi pada April silam telah menyatakan komitmen untuk tidak lagi membiayai pembangkit listrik batu bara.

Dalam Pertemuan tingkat tinggi para pemimpin negara bertajuk *Leaders summit on climate* yang dilaksanakan pada akhir April silam, Presiden Amerika Serikat Joe Bidden mengatakan Amerika Serikat akan mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 50% pada akhir dekade.

Bank Pembangunan Asia (ADB) menyampaikan rencana akan fokus pada pembiayaan proyek gas alam, termasuk jaringan pipa, terminal LNG, pembangkit berbahan bakar gas.

KROHNE Group

Presiden Biden menyerukan diakhirinya subsidi bahan bakar fosil.

Presiden Biden menyerukan diakhirinya subsidi bahan bakar fosil. Ia mengumumkan, pemerintahannya akan mempromosikan pengukuran, pengungkapan, dan mitigasi risiko iklim material ke sistem keuangan.

Pengganti Donald Trump ini juga menekankan pentingnya negara maju memobilisasi USD 100 miliar per tahun dalam keuangan publik dan swasta untuk mendukung negara berkembang. Dia juga mengumumkan bahwa USA berupaya menggandakan anggaran pada 2024 untuk pendanaan iklim ke negara-negara berkembang. Dibandingkan dengan tingkat rata-rata paruh kedua Pemerintahan Obama-Biden jumlah ini tiga kali lipat pembiayaan publik untuk adaptasi pada 2024.

Tak mau kalah, Cina sebagai negara paling banyak "makan" batubara, juga mengumumkan bergabung dengan Perjanjian Kigali dan mengurangi konsumsi batu bara antara 2026 dan 2030. Lalu India meluncurkan AS-India 2030 *Climate and Clean Energy Agenda* 2030 Partnership guna mendorong inovasi dan pembiayaan energi bersih.

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan, Indonesia sangat serius dalam pengendalian perubahan iklim dan mengajak dunia melakukan aksi-aksi nyata. Ia menjelaskan langkah-langkah penting yang dilakukan Indonesia. Diantaranya, mempercepat pilot percontohan *net zero emission*. Selain itu, membangun Indonesia Green Industrial Park seluas 12.500 hektare di Kalimantan Utara.

"Ini akan menjadi yang terbesar di dunia. Kami juga sedang melakukan rehabilitasi hutan *mangrove* seluas 620 ribu hektare sampai 2024, sebagai kawasan terluas di dunia dengan daya serap karbon mencapai empat kali lipat dibanding hutan tropis," kata Presiden Joko Widodo.

Menteri ESDM Arifin Tasrif turut menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen dalam penurunan emisi gas rumah kaca sebagaimana yang dituangkan dalam *Nationally Determined Contribution (NDC)*. Langkah konkrit yang dilakukan diantaranya menyusun beberapa strategi, di antaranya mandatori biodiesel, *co-firing* PLTU, pemanfaatan *Refuse Derived Fuel* (RDF), penggantian diesel dengan pembangkit listrik energi terbarukan, termasukan yang berbasis hayati. Juga pemanfaatan non listrik/non biufuel seperti briket, dan pengeringan hasil pertanian dan biogas.

Kementerian ESDM bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang menyusun komitmen *net zero emission* Indonesia. Secara khusus program penurunan emisi di bidang pembangkit ketenagalistrikan. "Implementasi program tersebut antara lain melalui penghentian pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebanyak 53 GW antara 2025- 2045," kata Menteri Arifin.

Pemerintah Indonesia saat ini juga sedang menyusun *Grand Strategy Energy* untuk pengembangan sektor energi guna mencapai target ideal dalam hal ketahanan energi, bauran energi, dan pengurangan emisi. *Grand Strategy* menekankan pemenuhan permintaan energi nasional, guna meningkatkan neraca perdagangan, serta mengembangkan infrastruktur energi.

Salah satu targetnya adalah mempercepat penggunaan pembangkit listrik energi terbarukan dengan kapasitas tambahan sekitar 38 GW pada 2035, di mana Solar PV diprioritaskan mengingat biaya investasinya yang relatif lebih murah dan durasi pemasangan yang singkat.

MEREDUPNYA PEMBANGKIT BATU BARA

MUFLIHUN HIDAYAT
muflihhidayat@tambang.co.id

Salah satu upaya menuju carbon neutral pada 2060 adalah dengan menghentikan pembangunan PLTU sebagai sumber energi. PLN telah mencanangkan sejak 2025 tidak lagi memasukkan PLTU dalam rencana pembangunan pembangkit listrik. Dalam jangka panjang, PLTU tak lagi digunakan.

Di sela-sela ramainya diskusi terkait upaya pengurangan emisi karbon, PT PLN (Persero) menyampaikan rencana untuk tidak lagi membangun PLTU baru pada 2025. Hal ini pertama kali disampaikan Wakil Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, awal Juni lalu.

Dalam kesempatan itu Darmawan mengatakan bahwa pihaknya bersama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM telah menyusun rencana bersama, antara lain, antara 2025 sampai 2030 merencanakan tidak lagi membangun PLTU. Di tahun 2025 ada rencana untuk mengganti perencanaan PLTU dan PLTMG dengan pembangkit tenaga energi baru an terbarukan. Dalam rapat dengar pendapat itu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana, juga hadir.

Peta jalan penutupan PLTU menuju carbon neutral pada 2060. Dimulai pada 2025, dengan cara menggantikan rencana pembangunan PLTU dengan pembangkit dari sumber energi baru dan terbarukan.

Ia kemudian menjelaskan peta jalan penutupan PLTU menuju *carbon neutral* pada 2060. Dimulai pada 2025, dengan cara menggantikan rencana pembangunan PLTU dengan pembangkit dari sumber energi baru dan terbarukan. Pada 2030 mulai menghilangkan PLTU *subcritical* pertama sebanyak 9 GW.

Dalam konferensi pers yang diadakan beberapa hari setelah rapat di DPR tersebut, Dirjen Rida Mulyana menjelaskan pemerintah akan menutup PLTU secara alami sesuai umur pembangkit. Ia memastikan pemerintah tidak akan melakukannya dengan paksaan.

Oleh karenanya saat ini pemerintah akan mendata PLTU dan kapan waktunya untuk ditutup. "Kami minta evaluasi terhadap PLTU yang ada, kapan dan bagaimana pensiunnya. Sudah ada data PLTU yang mendekati umur pensiun, nilai asetnya sudah nol saat berakhir. Sampai sekarang kami ambil opsi pensiun alami, nggak dipaksa pensiun," tandas Rida.

Rencana memensiunkan PLTU itu kemudian melahirkan diskusi yang cukup panjang dan beragam. Bagi pegiat lingkungan, langkah ini disambut baik. Namun bagi sebagian kalangan langkah ini masih harus dihitung secara matang, di antaranya terkait dengan aspek ketahanan energi nasional.

Sebagaimana diketahui sampai sekarang pasokan listrik nasional masih didominasi PLTU. Data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menjelaskan hingga April 2021, kapasitas PLTU masih menguasai 48% dari total pembangkit nasional. PLTU memasok 34.668 Mega Watt (MW) dari total pembangkit listrik di seluruh Indonesia sebesar 72.889 MW. Dalam komposisi bauran energi nasioal, batu bara menguasai 63,52% dari total bauran energi untuk pembangkit listrik nasional.

Ke depan, kebutuhan listrik nasional akan terus meningkat. Ini yang membuat Satya W Yudha dari Dewan Energi Nasional mengingatkan agar memperhatikan jaminan pasokan listrik bagi masyarakat. "Saya melihat bahwa ini bagian dari komitmen besar pemerintah dalam menurunkan emisi karbon kita yang 20%

Rida Mulyana, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM

Darmawan Prasodjo, Wakil Direktur Utama PT PLN

pada 2030. Kalau dengan bantuan internasional bisa sampai 40%. Itu sudah ada dalam skenario pengurangan emisi," lanjutnya.

Satya juga menjelaskan bahwa pemerintah sesungguhnya sudah tidak mengizinkan pembangunan PLTU di Pulau Jawa. Namun menurutnya, untuk menghentikan pemanfaatan PLTU harus juga diperhatikan aspek kontrak. Sebagaimana diketahui PLTU terikat kontrak dengan PLN, yang biasanya berlangsung selama 25 tahun. Ada PLTU yang berkontrak menggunakan tipe kontrak *take or pay*. Ini akan berimbas pada keuangan negara.

Hal lain yang juga menurut Satya perlu dipertimbangkan adalah pemenuhan kebutuhan listrik. Saat ini kapasitas listrik Indonesia sebesar 300 Tera Watt hours (TWh). Di tahun 2060 diperkirakan kapasitas yang dibu-tuhkan 1.380 TWh. Ke depan permintaan listrik akan semakin besar sehingga banyak ruang untuk mengem-bangkan energi bersih dikemudian hari.

Menurutnya DEN dalam membuat peta jalan energi nasional mempertimbangkan banyak aspek. Pada dasarnya yang disampaikan PLN dan pemerintah ia sambut baik. "Namun harus ada jaminan pasokan listrik terpenuhi. Karena salah satu tipikal dari sumber energi non-fosil adalah intermiten dalam pasokan, sehingga perlu dipertimbangkan secara matang," tandas Satya.

Hal penting yang dilakukan saat ini adalah menyusun peta jalan untuk menuju tahun 2030.

Ini juga yang disampaikan Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia. Menurutnya, apa yang beredar saat ini, mengenai rencana pengurangan pemakaian PLTU, belum bisa menjadi acuan untuk melihat dampaknya ke sektor pertambangan batu bara.

"Saya kira ini akan sangat tergantung bagaimana pemerintah buat *road map* ke depan," ujarnya dalam pembicaraan singkat dengan Majalah TAMBANG.

Melihat tantangan sektor pertambangan batu bara ke depan, di antaranya maraknya gerakan global untuk beralih dari energi berbasis fosil ke energi yang lebih ramah lingkungan.

APBI, kata Hendra, telah melihat tantangan sektor pertambangan batu bara ke depan, di antaranya maraknya gerakan global untuk beralih dari energi berbasis fosil ke energi yang lebih ramah lingkungan.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa perkembangan dinamika geopolitik tentang isu perubahan iklim yang begitu cepat menuntut Pemerintah Indonesia menjadi lebih cepat dalam mengejar target emisi nol. Hal ini kemudian memberi dampak pada pemanfaatan batu bara di sektor kelistrikan.

"Kami tentu masih menunggu *road map* yang akan dibuat pemerintah. Perlu kajian lebih detail, sehingga dari situ kami bisa melihat pemanfaatan batu bara ke depan dalam negeri seperti apa," tandas Hendra.

Sejauh ini pelaku usaha pertambangan batu bara pun telah mulai berbagai langkah antisipasi. Di antaranya dengan mendorong hilirisasi batu bara lewat gasifikasi dengan aneka produk seperti methanol dan DME.

Sementara Ketua Indonesia Mining and Energi Forum (IMEF) Singgih Widagdo mengatakan, rencana pengurangan peran PLTU tidak bisa ditanggapi dengan hanya sebatas khawatir. "Kita perlu merasionalkan apa yang terjadi. Dilihat dari alur waktu, penghentian penggunaan PLTU tidak dibuat tergesa-gesa. Batu bara yang menggunakan teknologi *subcritical* baru dikurangi pada 2030 dengan kapasitas 1 GW. Kemudian tahap kedua pada tahun 2035 mengurangi PLTU subcritical dengan kapasitas 9 GW," terang Singgih.

Kemudian pada 2040 ditargetkan bisa menutup PLTU *supercritical* sebesar 10 GW. Sementara untuk PLTU *ultra supercritical* tahap I ditargetkan bisa dipensiunkan pada 2045 sebesar 24 GW. Lalu PLTU *ultra supercritical* terakhir sebesar 5 GW bisa dipensiunkan pada 2055.

PLTU *subcritical* adalah pembangkit listrik berbahan bakar batu bara yang masih menggunakan teknologi lama yang tidak ramah lingkungan. Dalam beberapa tahun terakhir pelaku usaha di pembangkit listrik batu bara sudah mulai beralih ke teknogi lebih ramah lingkungan seperti *supercritical* dan *ultrasupercritical*.

Singgih mengatakan, pemerintah perlu memastikan komitmen perusahaan tambang batu bara dalam menjalankan kebijakan DMO. Singgih juga mengingatkan pemerintah mulai memperhitungkan peta terkait pertambangan batu bara setelah 2025. "Kalau perlu detail, termasuk kebijakan China dan India dengan lebih serius. Karena 54% dari produksi nasional dipasarkan ke China dan India. Kalau China dan India batuk, industri batu bara Indonesia sudah flu," ungkapnya lagi.

BERPULANGNYA SOSOK KRITIS PERTAMBANGAN

MUFLIHUN HIDAYAT
muflihhidayat@tambang.co.id

Budi Santoso, alias Disan wafat di rumah sakit, pada awal Juli lalu. Ia dikenal sebagai sosok yang kritis, terutama di sektor tambang. Dikenal sebagai sosok mudah bergaul.

Di penghujung senja, selepas azan magrib berkumandang, kabar duka menyebar memenuhi beranda media sosial dan grup-grup *Whatsapp* para penggiat pertambangan. Budi Santoso, tokoh pertambangan nasional, berpulang ke *rahmatullah*.

Setelah beberapa hari berjibaku melawan sakit dan dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut Mintohardjo Jakarta, Budi dinyatakan meninggal sekitar pukul 18.30 WIB, Senin 11 Juli 2021.

Pamor Budi cukup mentereng di kalangan praktisi pertambangan. Ia pernah mencalonkan diri sebagai ketua umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), pada kongres kesepuluh di Jakarta, tahun 2018. Pria yang karib disapa Disan ini, orang Perhapi tulen. Ia terlibat aktif sejak awal organisasinya orang tambang ini berdiri.

Ia pernah didapuk sebagai sekertaris jenderal Perhapi era kepemimpinan Latief Baky, pada tahun 2004-2006. Saat ini, Budi masih tercatat sebagai ketua Kelompok Kerja (Pokja) Kode Penilaian Mineral Indonesia (KPMI), badan sejenis Valmin Code di Australasian Institute of Mining and Metallurgy.

"Kode ini akan sangat diperlukan untuk kemajuan industri pertambangan dalam negeri, khususnya untuk menilai kesesuaian dengan standar internasional yang umum berlaku di industri," tutur Ketua Umum Perhapi, Rizal Kasli.

Budi mendedikasikan hampir seluruh pemikirannya di organisasi profesi yang menaungi para *miners* itu. Ia tercatat sebagai penggagas Competent Person Indonesia (CPI) Perhapi. Para koleganya di Perhapi, menjulukinya sebagai *Grandfather Clause* CPI Perhapi.

Di dunia pertambangan, CPI memiliki peran yang strategis. CPI merupakan penanggung jawab dalam memvalidasi laporan hasil eksplorasi atau estimasi sumberdaya serta cadangan pada mineral dan batu bara. Pembuatan laporan oleh seorang CPI memiliki standarisasi khusus.

"Perhapi kehilangan salah satu tokoh pertambangan yang sangat peduli untuk kemajuan industri pertambangan di Indonesia. Beliau sering menjadi fasilitator dalam berbagai pelatihan yang dilaksanakan oleh Perhapi maupun institusi lainnya," kenang Rizal.

Nama Budi mudah dijumpai di berbagai media massa nasional. Bertengger sebagai narasumber yang kritis merespon isu-isu terkini. Di kalangan wartawan, Budi jamak dikenal sebagai Direktur Center for Indonesian Resources Strategic and Studies (Ciruss), lembaga yang ia dirikan untuk fokus mengkaji kebijakan-kebijakan strategis pertambangan.

Budi kerap dimintai pendapat oleh wartawan yang menangani kanal energi dan tambang. Alasannya, selain karena Budi dianggap memiliki pengetahuan yang memadai, jebolan Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung tahun 1988 ini, juga dikenal ramah. Budi cepat merespon saat dikontak via pesan singkat elektronik.

Ia gamblang dalam menjelaskan masalah, lugas, ringan, dan yang paling kentara jadi ciri khas Budi, bahasanya *to the point*. Ia bukan tipikal orang yang suka basa-basi.

Sikapnya yang kritis terhadap kebijakan pemerintah, terkadang kerap menyulut kontroversi. Tapi Bu-

di tetaplah Budi, orang yang tegas berprinsip. Ketika suatu kebijakan ia anggap keliru, maka ia akan lantang bicara apa adanya, bahkan tanpa tedeng aling-aling melontarkan komentar dengan pedas, bikin kuping elite pejabat panas.

Wawasan Budi yang memadai soal teknis pertambangan, membuatnya dilibatkan dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 alias UU Minerba lama, yang jadi patokan hukum pertambangan nasional lebih dari satu dekade terakhir, sebelum direvisi lewat UU Nomor 3 Tahun 2020.

Saat revisi UU Minerba keluar, Budi dan praktisi tambang lainnya sempat melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Budi menilai ada yang salah dalam UU Minerba baru. Meskipun ujungnya gugatan tersebut kalah, namun kehadiran Budi sebagai salah satu penggugat, membuat sejumlah pejabat di Kementerian ESDM bergidik.

Terbaru, Budi mengomentari soal rencana pemerintah yang hendak mencabut ribuan izin tambang yang tidak beraktivitas. Rencana itu digulirkan untuk menghindari potensi kerugian negara.

Menurut Budi, ancaman itu menunjukkan pemerintah tidak tahu tentang apa yang dikerjakan pengusaha tambang.Hanya akibat aturan baru yang dibuat, hampir 50 persen izin usaha dapat terancam dicabut, dan ini bukan kesalahan dari pemilik izin.

Kondisi stagnan ribuan perusahaan itu, kata Budi, mungkin karena terbentur urusan birokrasi di lintas kementeriaan. Misalnya, bisa jadi izin perusahaan-perusahaan tersebut di Kementerian ESDM beres, tapi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih mandek. Sehingga belum bisa bergegas naik ke level produksi.

Selain kritis, Budi juga dikenal sebagai sosok yang memiliki idealisme tinggi. Jika sudah menyangkut kehormatan dan harga diri, tidak ada tawar-menawar.

Pernah suatu ketika, pria kelahiran Jember, Jawa Timur ini melakukan perjalanan untuk studi kelayakan sebuah tambang, bersama rekannya empat orang ekspatriat. Berlima mereka yang tergabung dalam tim, *chek in* di sebuah hotel bintang tiga.

Resepsionis kemudian memberikan empat kunci kepada rekannya yang ekspatriat, untuk menempati kamar di lantai lima. Sedangkan Budi Santoso, diberi kunci untuk menempati kamar di lantai dua.

Budi lantas bertanya. Mengapa rekannya yang ekspatriat diberi kamar di lantai lima, sedangkan ia di lantai dua. "Sudah biasa Pak, di hotel ini kalau supir memang di lantai dua," jawab sang resepsionis santai.

Tak ayal, si resepsionis hotel langsung mendapat ceramah panjang kali lebar dari Budi. "Anda sudah terbiasa ya merendahkan bangsa sendiri? Kalau berkulit coklat, lalu dianggap supir?," sergah Budi saat itu.

"Gara-gara pemerintah menerapkan standar gaji yang berbeda antara tenaga kerja asing dan lokal, jiwa inferior bangsa ini tak pernah hilang. Selalu memandang rendah diri sendiri, di hadapan orang asing," tandas Budi.

Berangkat dari kejadian itu, dalam banyak kesempatan Budi tak pernah berhenti menyuarakan kesetaraan, jangan sampai martabat diri diinjak-injak oleh bangsa lain, apalagi oleh bangsa sendiri. Budi pernah mengaku, tidak mau digaji lebih rendah dari tenaga kerja luar, yang kompetensi dan jabatannya sama.

Dalam perjalanan karirnya, Budi pernah ditunjuk sebagai Presiden Direktur SRK Consulting, konsultan kenamaan asal Inggris, melayani seluruh aspek yang terkait dengan *mining business*. SRK juga melayani penyiapan dokumen-dokumen untuk IPO perusahaan tambang di berbagai negara, seperti Australia, Hongkong, Kanada, dan Inggris.

Pesan dan pemikiran Budi yang kritis akan terus menggema, diingat oleh orang-orang yang pernah satu meja kopi dengannya, terekam di ruang-ruang publik media massa. Idealisme yang digaungkan Budi hidup abadi melampaui fisiknya yang kini sudah menyatu dengan bumi.

Dunia pertambangan berduka mendengar kepergiannya. Selamat jalan Budi, selamat jalan Disan. Tempat terbaik untukmu di sisi-Nya.

PT LINK NET Tbk

OPTIMASI PRODUKTIVITAS PERTAMBANGAN DARI HULU HINGGA HILIR

Transformasi digital sebelumnya sebatas topik pembicaraan, kini menjadi kebutuhan dan solusi. Pelaku industri tambang pun berbenah dalam strategi. Kondisi yang semakin menantang beberapa tahun terakhir membutuhkan upaya ekstra bagi sektor tambang untuk tetap bertahan dan mempercepat laju pertumbuhan bisnis. Transformasi digital menjadi solusi yang paling realistis saat ini. Industri pertambangan perlu menggandeng mitra yang tepat untuk memaksimalkan produktivitas dari hulu hingga hilir.

Digitalisasi telah membawa perubahan pada seluruh aspek kehidupan, membantu setiap aktivitas manusia menjadi lebih mudah. Di Indonesia, pemanfaatan kecanggihan digital diterjemahkan dalam agenda *Making Indonesia 4.0*. Sasaran utamanya, mendorong pemanfaatan digital di sektor industri nasional, termasuk sektor pertambangan yang mulai melakukan optimasi teknologi/ICT dalam upaya transformasi digital. Optimasi dapat dilakukan dengan penggunaan aplikasi berbasis internet hingga ICT *Solution*.

Kesiapan internal dalam pembenahan transformasi digital menjadi topik yang sangat hangat dibicarakan di kalangan pelaku industri khususnya pertambangan pada saat ini. Banyak perusahaan melakukan inovasi dalam hal *technology adoption*, sebagai langkah strategis untuk melakukan transformasi digital ke-

giatan operasional. Hal ini penting untuk menopang keberlangsungan usaha dan siap dalam menghadapi berbagai tantangan yang sangat berat terutama di masa pandemi COVID-19.

Teknologi digital akan menggilas perusahaan yang enggan berbenah mengikuti perkembangan zaman. Untuk bisa bertahan di era digital dan memenangkan persaingan global, perusahaan harus mampu menghadapi arus perubahan melalui strategi khusus yaitu strategi bisnis, target pertumbuhan, dan rencana investasi yang tentunya melibatkan teknologi.

Program digitalisasi tambang di Indonesia sendiri sudah diterapkan dan dibuktikan menyangkut kepentingan operasional di antaranya, seperti pengendalian instrumen jarak-jauh, pemanfaatan GPS, penggunaan *drone* dalam pengawasan area tambang, hingga pemanfaatan satelit untuk komunikasi.

Digitalisasi dalam industri pertambangan tidak hanya sekedar mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih semata. Sejak beberapa dekade lalu hingga saat ini, tambang selalu dihadapi berbagai isu dan tantangan, seperti akses terhadap energi untuk menunjang operasi pertambangan, keselamatan kerja, hingga isu lingkungan.

Terkait kondisi geografis Indonesia khususnya lokasi pertambangan yang terletak di area rural, optimasi digital tentu sangat membutuhkan konektivitas yang ringkas, *mobile* dan adaptif terhadap cuaca yang ekstrim sekalipun agar tidak menghambat aktivitas sektor kritikal seperti *energy & resources* untuk tetap produktif dan bereksplorasi.

Sebagai solusi untuk menjembatani kebutuhan optimasi digital secara maksimal, Link Net hadir dengan inovasi yang dilengkapi berbagai sarana untuk mempermudah konektivitas sebagai penunjang produktivitas.

Sebagai perusahaan penyedia layanan, Link Net dengan produk dan solusinya hadir dalam menunjang konektivitas yang mengoptimalkan operasional bisnis pertambangan dari hulu ke hilir melalui sarana komunikasi yang dapat diandalkan bahkan dalam cuaca ekstrim sekalipun.

Pembenahan transformasi digital yang kini semakin nyata dan menjadi tantangan tersendiri bagi kalangan pelaku industri di Indonesia.

Link Net memahami sulitnya berkomunikasi di area yang minim akses komunikasi, terlebih lagi dalam penggunaan teknologi dalam upaya memaksimalkan operasional pertambangan yang memiliki *supply chain* cukup panjang. Maka dari itu, Link Net hadir dengan produk dan solusi andalannya untuk industri *energy & resources*, seperti *Internet Dedicated, VSAT, Remote Solution* serta berbagai layanan lainnya untuk mendukung transformasi digital saat ini hingga di masa depan.

Kebutuhan akan jaringan yang besar stabil, eksklusif dan aman dalam dunia bisnis mampu dipenuhi oleh Link Net melalui layanan *Internet Dedicated*. Berbeda dengan jaringan *broadband, Internet Dedicated* memiliki *bandwidth* yang simetris untuk kelancaran data dan komunikasi.

Untuk area rural seperti *mining site & production* yang sulit terjangkau oleh akses maupun jaringan kabel internet, Link Net menghadirkan solusi konektivitas yang stabil dan tetap mengutamakan keamanan saat berkomunikasi layanan VSAT untuk memaksimalkan komunikasi via satelit dengan aman, nyaman, dan lancar.

Layanan VSAT dari Link Net mampu menghadirkan kapasitas *bandwidth* hingga 100 Mbps, sehingga pengguna dapat memaksimalkan komunikasi dengan aman dan lancar. Mengingat teknologi VSAT sangat prima dalam segala kondisi cuaca bahkan disaat ekstrim sekalipun serta ukurannya yang ringkas, satelit ini layak untuk dijadikan solusi dalam melancarkan operasional bisnis dengan mobilitas yang tinggi.

Industri pertambangan dengan karakteristiknya yang unik, kini semakin terbuka peluangnya dan dapat mewujudkan optimasi usahanya dari hulu ke hilir, mulai dari eksplorasi hingga distribusi melalui teknologi dan aplikasi sistemik.

Sudah saatnya bagi pelaku bisnis tambang untuk lebih mengutamakan kesiapan internal dalam pembenahan transformasi digital yang kini semakin nyata dan menjadi tantangan tersendiri bagi kalangan pelaku industri pertambangan di Indonesia.

Dengan kehadiran Link Net sebagai solusi dan mitra di bisnis Anda, langkah bisnis pertambangan akan semakin mudah untuk melaju di kancah dunia.

For further information, please contact the office closest to you:

ORGANISERS INDONESIA
Rachel Pardede
+6221 2525 320/+62 81298509799
rachel@pamerindo.com

INFORMA MARKETS - ASIA
SINGAPORE
Mel Siaulyte
+65 62 33 6762
mel.siaulyte@informa.com

INFORMA MARKETS - WORLDWIDE
LONDON
Shaun White
+44 20 7560 4040
shaun.white@informa.com

Media Partner

TAMBANG
THE INDONESIAN ENERGY & MINING MAGAZINE

EMAS PETER DI LANTAI BURSA

EGENIUS SODA
egen@tambang.co.id

Perusahaan tambang emas Archi Indonesia masuk bursa. Hasil penjualan saham sebagian besar untuk pengembalian hutang. Sisanya 10% untuk pengembangan usaha.

DI tengah ekonomi yang lesu akibat hantaman Covid-19, perusahaan tambang emas dan perak PT Archi Indonesia resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan milik Peter Sondakh ini menjadi emiten dengan kode saham ARCI. Di sesi awal perdagangan saham, akhir Mei lalu, ARCHI melejit 13% dari harga awal Rp750.

ARCHI melepas sebanyak 3.725.250.000 saham biasa, mewakili 15 % dari modal yang ditempatkan dan disetor perseroan setelah penawaran saham perdana.

Wakil Direktur Utama ARCHI, Rudy Suhendra menyampaikan rasa syukur atas dukungan yang didapatkan perseroan. ARCHI telah lama merencanakan IPO. "Kami sangat bersyukur atas kepercayaan seluruh pihak terkait yang mendukung perseroan merealisasikan IPO ini," ujar Rudy.

Kehadiran perusahaan tambang emas ini mendapat respons positif pasar. Ini terlihat saat penawaran awal (*bookbuilding*), dari Senin, 31 Mei 2021 sampai 9 Juni 2021. Peminat sahamnya berlebih.

Dari prospektusnya dijelaskan bahwa tidak semua dana hasil penjualan saham masuk ke kantong Archi. Pasalnya, dana hasil divestasi saham bakal dibayarkan ke PT Rajawali Corpora selaku penjual. Rajawali Corpora dan ARCHI akan sama-sama menanggung secara proporsional beban biaya emisi saham sehubungan dengan pelaksanaan IPO ini.

Sisa dana yang diterima Archi setelah IPO ini, sekitar 90% akan digunakan perusahaan dan anak usahanya untuk membayar sebagian pokok utang bank. Sisanya sebesar 10% akan digunakan oleh ARCHI dan anak

usahanya untuk membiayai kegiatan operasional dan modal kerja.

"Sedangkan sisa dana yang diperoleh akan digunakan perseroan serta entitas anak untuk pembiayaan kegiatan operasional dan modal kerja," ucap Direktur Keuangan (*Chief Financial Officer (CFO)* Archi Indonesia, Adam Jaya Putra Adam.

Archi mencatatkan total pendapatan sebesar USD393,3 juta di tahun 2020, merupakan penyumbang nilai pajak dan royalti terbesar dari sektor industri pertambangan emas di Provinsi Sulawesi Utara. Sekitar 98% dari total pendapatan perseroan dihasilkan dari penjualan bijih emas, sisanya dari penjualan produk emas batangan.

Selain itu, perusahaan terus melakukan efisiensi biaya yang berdampak positif terhadap kondisi keuangan perseroan. Langkah ini membuat Archi berhasil mencatatkan Laba Bersih sebesar USD 123,3 juta pada tahun 2020 lalu.

Sebagaimana diketahui komoditi emas sedang berbinar karena harganya yang terus menguat. Kondisi ekonomi yang belum pulih akibat pandemi Covid-19 yang belum usai menjadi salah satu alasan. Sebagian kalangan memproyeksikan harga emas pada 2021-2022 akan berada pada level USD 1.800-2.000 per oz.

Pasar emas juga mendapat sentimen positif dari langkah pemerintah Amerika Serikat yang masih mempertahankan stimulus, dan berpotensi mendorong permintaan emas lebih tinggi. Ketidakpastian global dapat menjadikan komoditas emas lebih fluktuatif, menjadi sentimen negatif untuk sektor ini.

Profil Tambang ARCHI

ARCHI memiliki tambang yang sudah beroperasi sejak 2011. Sampai tahun 2020, perseroan telah mencapai total produksi hingga 1,9 juta ounces, setara 58 ton emas. Tambang emas milik perusahaan bernaung di bawah Tambang Emas Toka Tindung. Lokasinya 35 km arah timur laut dari ibukota Sulawesi Utara, Manado.

Tambang Emas Toka Tindung ini punya dua entitas yakni PT Meares Soputan Mining (MSM) dan PT Tambang Tondano Nusajaya (PT TTN). Dalam prospektus dijelaskan bahwa Tambang Emas Toka Tindung merupakan salah satu produsen emas yang paling kompetitif dari sisi biaya secara global berdasarkan CRU.

Dari sisi potensi, Tambang Emas Toka Tindung memiliki sumber daya mineral sekitar 145,8 juta ton dari 1,2 g/t emas yang mengandung sekitar 5,5 juta ons emas, tersebar di enam pit. Ini merupakan cadangan bijih emas yang sudah terbukti dan terkira. Rata-rata kadar emas sebesar 1,2 g/t yang mengandung kurang lebih 3,9 juta ons emas. Data ini telah dinilai oleh SRK, sebagai konsultan teknikal independen.

Total luas wilayah mencampai 39.817 hektare. Kedua perusahaan, yakni PT Meares Soputan Mining dan PT Tambang Tondano Nusajaya (PT TTN), telah menandatangani amandemen KK, berlaku hingga

ARCHI melepas sebanyak 3.725.250.000 saham biasa, mewakili 15 % dari modal yang ditempatkan dan disetor perseroan setelah penawaran saham perdana.

2041. Sesuai amanat UU Minerba, perusahaan pemegang KK masa kontraknya dipastikan bakal diperpanjang setelah beralih menjadi IUPK. Perusahaan diberi jaminan mendapat perpanjangan 10 tahun pertama dan jaminan perpanjangan untuk masa 10 tahun berikut.

Setelah kurang lebih 10 tahun beroperasi produksi, saat ini masih kurang dari 10% dari wilayah konsesi perseroan yang telah dieksplorasi dan ditambang. Ini menunjukkan bahwa perseroan masih memiliki potensi yang menjanjikan di masa mendatang.

Perseroan juga mengintegrasikan kegiatan pengambangan dengan kegiatan pengolahan. Produk akhir dari proses adalah dore batang –bakalan emas Batangan-- yang terdiri dari sekitar 30% sampai 45% emas, dan 55% hingga 70% perak. Kapasitas proses terus berkembang dari 1,7 Mtpa tahun 2011 menjadi 3,6 Mtpa pada akhir tahun 2020. Perusahaan pun berencana akan meningkatkan kapasitas produksi.

Hasil proses pengolahan dalam bentuk *dore* dikirim ke pabrik pemurnian untuk dimurnikan dengan kadar emas hingga 99,99% dan perak hingga 99,95%.

Pewarta Indonesia

Rudy Suhendra, Wakil Direktur Utama ARCHI

BANJIR INSENTIF UNTUK INVESTOR

AGAR MINYAK TERUS MENGGELONTOR

EGENIUS SODA
egen@tambang.co.id

Investasi di hulu migas didorong demi mengejar target sejuta barel per hari. Sejumlah insentif disiapkan. Masih dibutuhkan kepastian hukum.

Di tengah upaya berpindah dari energi berbasis fosil ke energi baru dan terbarukan, sektor migas masih mendapat perhatian besar. Maklum minyak dan gas tetap dibutuhkan, meski perannya tidak lagi dominan.

Meski perannya makin berkurang, toh dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) konsumsi minyak Indonesia masih diasumsikan terus meningkat. Dalam rancangan itu, peningkatan sampai lebih dari 130% pada 2050. Saat ini konsumsi 1,6 juta barel minyak per hari (BOPD). Pada 2050 meningkat menjadi 3,9 juta BOPD.

Selain minyak, konsumsi gas juga meningkat. Bahkan lebih tinggi dibanding minyak. Dari konsumsi gas, 6 miliar standar kaki kubik saat ini, menjadi 25 miliar standar kaki kubik gas pada 2050.

Di tengah konsumsi BBM yang makin meningkat, produksi nasional masih tetap terseok. Saat ini hanya sekitar 700 ribu BOPD. Sisanya, harus impor. Karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan produksi minyak dalam negeri.

Targetnya, produksi minyak dalam negeri mampu mencapai 1 juta barel per hari pada 2030. Untuk meraih target itu, pemerintah terus mendorong peningkatan investasi pada sektor hulu migas.

Ada dua catatan penting yang harus diperbaiki agar bisa menggandeng investor, yaitu sistem fiskal dan risiko investasi. Indonesia perlu merumuskan rencana induk yang jelas.

Sejauh ini beberapa lembaga riset seperti Woodmac, IHS dan Rystad, menilai Indonesia masih menjadi tempat menarik untuk investasi. Daya tarik ini terletak pada prospek sumber daya migas yang dimiliki Indonesia. Tapi dengan syarat tertentu.

Ada dua catatan penting yang harus diperbaiki agar bisa menggandeng investor, yaitu sistem fiskal dan risiko investasi. "Indonesia perlu merumuskan rencana induk yang jelas," tulis lembaga riset PricewaterHouseCoopers Indonesia dalam sebuah publikasinya.

Selain itu, masih menurut lembaga tersebut, Indonesia juga harus membuat peta jalan menuju ekosistem investasi yang lebih menarik dan insentif fiskal yang dibutuhkan.

"Perhatian utama pada upaya meningkatkan penggantian cadangan dan meningkatkan produksi. Hal ini guna memberi lebih banyak keamanan energi ke negara, karena permintaan terus tumbuh sejalan ekspansi ekonomi. Sementara produksi dalam negeri mandek," tulis laporan tersebut.

Lembaga yang populer disebut PwC ini menyebutkan, Indonesia memiliki keanekaragaman cekungan geologi yang menawarkan potensi eksploitasi migas. Ada sekitar 60 cekungan sedimen. Termasuk 36 cekungan di Indonesia bagian barat. Dari jumlah ini, 14 di antaranya memproduksi minyak dan gas.

Selama ini kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas lebih banyak dilakukan di Indonesia bagian barat, Jawa dan Sumatera. Memang, ada juga di Kalimantan Timur dan Natuna. Sementara di Indonesia Timur, terbilang masih minim kegiatan eksploitasi. Padahal, menurut Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, Indonesia memiliki prospek sumber daya migas yang masih potensial di wilayah tersebut.

"Saat ini merupakan momentum yang tepat dalam pemberian insentif. Tujuannya, meningkatkan iklim investasi Indonesia agar semakin menarik bagi investor. Termasuk mendorong *International Oil Company* (IOC) agar menempatkan kembali Indonesia sebagai tujuan investasi," kata Dwi.

Dwi Soetjipto, Kepala SKK Migas

Investasi di sektor migas dalam beberapa tahun terakhir menurun. Terlebih lagi dengan adanya pandemik Covid-19. Secara global realisasi investasi pada 2020, saat pandemik Covid 19 mulai merebak, turun sekitar 30%.

Realisasi investasi di Indonesia sampai Mei 2021, sebesar USD 3,93 miliar. Jumlah ini hanya 31,7 persen dari target yang dicanangkan Pemerintah. Ini menjadi tantangan berat dalam upaya mencapai produksi 1 juta barel minyak per hari.

"Dengan naiknya harga minyak, kami berharap situasi membaik karena dari sisi potensi, Indonesia masih menjanjikan. Sebagai bukti, kita masih menyaksikan temuan yang cukup menggembirakan dalam pengeboran sumur Maha di Perairan Makasar," kata Sekretaris SKK Migas Taslim Yunus.

Diamping itu, kata Yunus, juga adanya temuan tambahan cadangan di lapangan Banyu Urip yang berli-pat dari perkiraan semula. "Semoga usaha bersama ini dapat meningkatkan kegiatan produksi di tanah air," kata Taslim Yunus

Taslim menambahkan, SKK Migas berharap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) segera meningkatkan investasi, dengan memanfaatkan momentum harga minyak yang menguat. Harga minyak saat ini meningkat di level USD73 per barel, dan Indonesia Crude Price (ICP) sekitar USD68 per barel.

"Kami berharap harga yang tinggi ini bisa mendorong KKKS meningkatkan kegiatan investasi, dengan segera merealisasikan proyek-proyek yang sebelumnya ditinggalkan. Sekarang, proyek tersebut sudah memiliki keekonomian pada harga USD50 atau USD60 per barel," lanjut Taslim.

Peningkatan investasi ini menurut Taslim diharapkan terlihat dari pembahasan-pembahasan *Work, Programme and Budget* (WP&B) yang akan segera dilakukan SKK Migas dengan KKKS pada Juli hingga September 2021.

Insentif Demi Menuju 1 Juta Barel

Di sela-sela acara *Oil & Gas Investment Day* yang dihelat pada pertengahan Juni silam, Pemerintah merilis 6 insentif untuk industri hulu migas. Pemerintah secara khusus memberi insentif dan fasilitas perpajakan kepada PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) yang menjadi operator Blok Mahakam, sebagai implementasi PP No.27/2017.

Sebelumnya, industri hulu migas mengusulkan 9 jenis insentif dan sudah 6 insentif dikabulkan. Paket insentif dan fasilitas perpajakan untuk WK Mahakam berupa relaksasi *First Trance Petroleum* (FTP), kredit investasi, percepatan depresiasi, fasilitas pembebasan PPN dan pengurangan PBB untuk bawah permukaan dan biaya pemanfaatan BMN.

Investasi di sektor migas dalam beberapa tahun terakhir menurun. Terlebih lagi dengan adanya pandemi Covid-19. Secara global realisasi investasi pada 2020, saat pandemi Covid 19 mulai merebak, turun sekitar 30%.

Di sela-sela acara Oil & Gas Investment Day yang dihelat pada pertengahan Juni silam, Pemerintah merilis 6 insentif untuk industri hulu migas.

Ketentuan fiskal baru telah dituangkan dalam amandemen PSC Mahakam yang berlaku efektif 1 Januari 2021. "Selanjutnya SKK Migas bersama Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan membahas rumusan opsi-opsi kebijakan fiskal yang lebih kompetitif dan menarik," kata Dwi Soetjipto.

"Dengan demikian, akan dapat meningkakan iklim investasi hulu migas sebagai upaya mendukung capaian target produksi 1 juta BOPD dan 12 BSCFD pada 2030," tambah Dwi saat meluncurkan paket insentif tersebut.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro menilai insentif yang diberikan itu, positif dan merupakan terobosan bagus dari pemerintah. "Insentif itu berpotensi meningkatkan keekonomian proyek dan meningkatkan investasi," katanya.

Sektor migas, kata Komaidi, memiliki rantai bisnis panjang. Sehingga, hasil dari insentif itu tidak bisa tampak dalam waktu dekat. Untuk masa eksplorasi mungkin dampaknya masih 2-3 tahun ke depan. Namun untuk masa produksi, mungkin bisa langsung dilihat pada tahun sama.

Masih menurut Komaidi, masalah perizinan lintas sektor juga perlu mendapat perhatian. "Meskipun sudah berupaya disederhanakan, namun prakteknya masih ditemukan sejumlah kendala. Apalagi ditambah adanya pandemic Covid 19 ini." Tidak kalah penting, konsistensi kebijakan pemerintah. "Kebijakan yang berubah-ubah membuat investor berpikir ulang untuk berinvestasi," tegas Komaidi.

Senada dengan Komaidi, Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, juga menilai insentif pemerintah akan berdampak positif pada investasi sektor hulu migas. Selain itu, *flexibility* dari pemerintah dengan memberi pilihan menggunakan skema *gross split* atau *cost recovery*, merupakan upaya menarik investasi, terutama untuk lapangan baru dan yang akan habis masa kontraknya.

"Melalui *flexibility* ini, calon investor akan benar-benar berhitung mengenai skema mana yang paling bagus bagi mereka," kata Mamit. Selain itu, ia menilai insentif fiskal sangat penting dalam mendorong investasi sektor hulu migas. Misalnya dalam soal pajak, diberikan fasilitas yang menguntungkan bagi KKKS seperti keringanan pajak, bahkan mungkin *tax holiday*.

Hal lain yang juga disebut Mamit, soal sewa lahan dimana ada keringanan untuk area yang masuk dalam barang milik negara. Juga kebijakan seperti kemudahan perijinan, kemudahan pengambilan keputusan

Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reforminer Institute

serta adanya kerjasama antar *stakeholder* dalam rangka meningkatkan investasi.

"Yang utama juga saya kira adalah kepastian hukum, mengingat saat ini revisi UU Migas masih belum selesai dilakuan. Investor membutuhkan kepastian hukum dalam investasi mereka," kata Mamit tegas.

Ia menilai, insentif yang diberikan saat ini akan mulai dirasakan dalam beberapa tahun ke depan. Untuk Blok Mahakam setelah disetujui, akan berdampak secara langsung pada operasionalnya. Kegiatan pengeboran bisa bertambah, potensi peningkatan cadangan migas semakin besar dan pastinya *government take* akan meningkat juga.

"Jika insentif ini diberikan kepada Blok migas lain yang sudah mature tetapi cadangannya masih cukup besar, maka bisa sangat membantu investasi KKKS disana," kata Mamit. Ia menegaskan, penurunan investasi saat ini, hal utamanya karena pandemik.

Pandemi menyebabkan investasi migas mandek. Meski banyak juga faktor lain. Misalnya, insentif fiskal di sektor perpajakan. Menurutnya, saat ini KKKS menunggu keputusan Menteri Keuangan soal permintaan kelonggaran perpajakan. Bahkan mereka berharap ke arah *tax holiday*.

Ada juga faktor lahan. Kadang ada lahan yang berhubungan dengan instansi lain, sehingga sulit melakukan kegiatan hulu migas. "Faktor gangguan sosial juga menurut saya menjadi penghambat investasi migas, seperti protes masyarakat sekitar, dan *illegal taping*. Ini yang membuat KKKS mengurangi investasi mereka," kata Mamit.

Toh, Mamit tetap optimistis bahwa investasi hulu migas akan membaik seiring menguatnya harga minyak. "Saya optimistis target investasi tahun ini bisa tercapai. Selain faktor tadi, yang cukup penting saya kira terkait transparansi yang harus dilakukan semua pihak," kata Mamit . "Hal ini bisa meyakinkan investor bahwa Indonesia sudah transparan dan terdigitalisasi. Kontrol pun menjadi lebih mudah lagi."

Mamit juga yakin, target pemerintah mencapai produksi 1 juta barel minyak per hari, bakal tercapai. "Selain SKK Migas dan Kementerian ESDM yang berjuang, dukungan Kementerian lain seperti KLHK dan Keuangan juga sangat penting."

"Agar target tercapai, perlu terus dilakukan usaha menjaga produksi lapangan gas *existing* dengan pengeboran dan pekerjaan WOWS. Kemudian program EOR harus dimulai saat ini karena hasilnya dinikmati dalam jangka panjang. Jika terus molor, target 2030 bisa terganggu," tegas Mamit.

Tidak kalah penting lagi, kegiatan explorasi harus tetap dilakukan meski hasilnya tidak untuk 2030. Mengingat prosesnya sampai tahapan produksi butuh waktu lama.

Enam paket stimulus yang sudah mendapat persetujuan adalah:

- Penundaan sementara pencadangan biaya kegiatan pasca operasi atau *Abandonment and Site Restoration* (ASR).
- Pengecualian PPN LNG melalui penerbitan PP 48/2020 tentang impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dikecualikan dari Kewajiban PPN.
- Pembebasan biaya pemanfaatan barang milik negara yang akan digunakan untuk kegiatan hulu migas.
- Penundaan atau pengurangan hingga 100 persen pajak-pajak tidak langsung.
- Penerapan volume gas yang dapat dijual dengan harga market untuk semua skema di atas take or pay dan *'Daily Contract Quantity' (DCQ)*.
- Penerapan insentif investasi, di antaranya depresiasi dipercepat, perubahan *split* dan DMO *full price*.

Sedangkan 3 (tiga) insentif yang saat ini sedang dalam pembahasan, adalah :

- *Tax holiday* untuk pajak penghasilan di semua wilayah kerja migas
- Penyesuaian biaya pemanfaatan Kilang LNG Badak sebesar 0,22 dolar AS per MMBTU
- Dukungan dari kementerian yang membina industri pendukung hulu migas (industri baja, rig, jasa dan service) terhadap pembahasan pajak bagi usaha penunjang kegiatan hulu migas

Organizer:

Co-organizer:

www.dyandra.com
member of Dyandra&Co.

SAVE THE DATE !!!

The 45th IPA Convex 2021

1-3 SEPTEMBER 2021

VIRTUAL

VISIT AT CONVEX.IPA.OR.ID

@ipaconvex_

@IPAConvex

Convex.ipa.or.id

Indonesian Petroleum Association

PT BORNEO INDOBARA

DORONG DESA BINAAN JADI CONTOH DESA KREATIF TINGKAT NASIONAL

Desa binaan PT Borneo Indobara yang dicanangkan sebagai program agrowisata. Diajukan sebagai percontohan desa kreatif oleh Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif dan Kementerian Koordinator Kemaritiman & Investasi RI. Program PPM dan CSR merupakan bagian komitmen khususnya terhadap aspek sosial dan lingkungan, hingga terwujudnya masyarakat pasca tambang yang maju dan sejahtera, serta berintelektual tinggi melalui agro-ekowisata.

Pemerintah mendorong agar desa-desa yang ada di Indonesia menjadi proyek percontohan program pengembangan desa kreatif dengan turut menghadirkan produk unggulan yang otentik sesuai dengan potensi daerah masing-masing.

Program yang turut didorong adalah seperti halnya produk unggulan yang dimiliki pada desa tersebut untuk terus kembangkan, dimana potensi yang ada dan dimiliki dapat memberikan nilai tambah.

Seperti yang dijelaskan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), nilai tambah yang dimaksud adalah sesuatu yang bisa dilihat *(to see)*, sesuatu yang bisa dilakukan *(to do)*, sesuatu yang bisa dipelajari *(to learn)*, dan sesuatu yang bisa dibeli *(to buy)*.

Pemerintah melalui Kemenparekraf, dan juga Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI serta didampingi Lembaga Administrasi Negara juga Kementerian ESDM, pada pertengahan bulan Juni 2021 melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, untuk melakukan survei terhadap desa yang dapat menjadi proyek percontohan program pengembangan desa kreatif.

Pemerintah melalui Kemenparekraf, dan didukung oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI, pada pertengahan bulan Juni 2021 melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, untuk melakukan survei terhadap desa yang dapat menjadi proyek percontohan program pengembangan desa kreatif. Pada kesempatan ini, Kementerian ESDM serta Lembaga Administrasi Negara (LAN) juga turut mendampingi.

Desa yang dikunjungi langsung adalah Desa Mustika, yang terletak di Kecamatan Kuranji, dan Desa Sumber Baru di Kecamatan Angsana. Kedua desa tersebut memenuhi kriteria sebagai desa pengembangan menjadi desa ekonomi kreatif. Desa Mustika dan Sumber Baru berlokasi di kawasan Ring 1, dan merupakan desa binaan PT Borneo Indobara (BIB) yang dipromosikan di Kemenparekraf sebagai desa percontohan dengan menonjolkan program agrowisata dan kuliner yang meliputi produk-produk khas *ecofriendly*.

Dindin Makinuddin, *Senior Manager Corporate Social Responsibilty* CSR PT Borneo Indobara mengungkapkan, "Dua desa binaan kami, sedang di survei oleh tiga kementerian serta lembaga administrasi negara. Konsep desa kreatif ini merupakan gagasan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang disinkronisasi dengan program CSR di lintas sektor termasuk sektor pertambangan dan akan diluncurkan di tingkat nasional untuk target 1.000 desa kreatif".

Dindin menambahkan, sebelum diluncurkan perlu adanya desa yang dijadikan sebagai desa percontohan yang sudah terukur sesuai indikator yang ditetapkan oleh kementerian itu sendiri. Menurut kementerian, ada tiga zona yang akan menjadi percontohan program pengembangan desa kreatif yaitu, Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan.

Desa Mustika dan Desa Sumber Baru diharapkan dapat menjadi desa percontohan yang mewakili wilayah Kalimantan. PT Borneo Indobara pun terus beru-

Dindin Makinuddin, *Senior Manager Corporate Social Responsibilty* CSR PT Borneo Indobara

HM Zairullah Azhar, Bupati Tanah Bumbu

paya mempromosikannya kedua desa kandidat tersebut sebagai desa percontohan tingkat Nasional.

"Mudah-mudahan dua desa ini setelah dilakukan penilaian dapat memenuhi syarat dan menjadi inspirasi desa lain di tingkat nasional," pungkas Dindin.

Pada kesempatan lain, Bupati Tanah Bumbu HM Zairullah Azhar saat menerima perwakilan tiga kementerian mengatakan, sangat bersyukur dan menyambut baik. "Kami sangat bersyukur, desa di wilayah kami ditetapkan sebagai desa kreatif oleh Kemenparekraf. Diharapkan, ini mampu menjadi motivasi bagi semua desa yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Tujuannya, menjadi dorongan semangat dalam berinovasi demi kesejahteraan bagi semua, khususnya masyarakat desa".

Sementara Direktur Akses Perbankan Kemenparekraf, Yuke Sri Rahayu menyatakan dua desa yang ditunjuk adalah desa yang layak dijadikan desa kreatif.

"Suatu saat nanti kekayaan alam seperti batu bara dan minyak bumi akan habis, untuk itu sejak dini kami meluncurkan program desa kreatif sebagai penyanggah perekonomian di dalam masyarakat pedesaan. Tentu diharapkan kepada seluruh *stakeholder* mampu melakukan kerja sama baik itu pemerintah dan swasta dalam pengembangan desa kreatif tersebut," ujar Yuke.

Hasil olahan menjadi produk wisata kuliner yang banyak dilirik seluruhnya dikemas sedemikian rupa dan menjadi tahan lama dan layak dikembangkan.

Desa Binaan BIB

Sebagai desa binaan PT Borneo Indobara dan bagian dari program pemerintah dalam pengembangan 1.000 desa kreatif 2021. Banyak potensi yang bisa dikembangkan dan mampu menghadirkan sesuatu yang berbeda dari desa lainnya.

Di tengah masa pandemi, masyarakat melalui Kelompok Rumah Tangga mampu mengembangkan bermacam-macam kuliner seperti halnya pengolahan tanaman Kelor menjadi produk kuliner yang berkhasiat bagi tubuh. Tanaman ini diolah dan ternyata mampu turut meningkatkan imunitas, kalsium tinggi, dan vitamin C.

Hasil olahan tanaman kelor diubah menjadi produk yang banyak dilirik seperti halnya Stik Kelor, Pudding Kelor, dan Bingka Kelor. Seluruhnya dikemas sedemikian rupa dan menjadi tahan lama dan layak dikembangkan.

Selamet Kurniawan selaku Kepala Desa mengungkapkan, 70% anggaran desa dialokasikan untuk kepentingan ketahanan pangan. Masyarakat terus dibudidayakan untuk mengelola potensi desa yang dimiliki. Program perkebunan, dengan menganjurkan masyarakat menanam sayuran untuk kebutuhan seharhari.

BIB terus membina dan mendukung di antaranya dengan memberikan bantuan berupa bibit tanaman Kopi Robusta, Kelor, Kunyit, Jahe dan Temulawak serta bibit ikan. Masyarakat juga diberikan penyuluhan tekait pupuk kompos, sehingga warga yang sudah memasuki masa pensiun bisa mengolah pupuk kompos dan hal

Pengolahan pupuk kompos mampu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Mustika.

Selamet Kurniawan, Kepala Desa Mustika bersama bibit kopinya.

ini mampu menciptakan lapangan kerja serta peningkatan ekonomi.

Selamet Kurniawan menambahkan, bersama jajarannya membentuk kelompok-kelompok untuk berternak Sapi. Dengan memberikan bantuan induk sapi, diharapkan dan dikembang biakan. Hal ini dilakukan berkaca pada tahun 2005, pernah diberikan bantuan satu ekor induk sapi kemudian terus mampu beranak pinak menjadi 10 ekor.

Terkait bibit ikan yang disebar pada kolam-kolam yang ada, BIB bukan hanya memberikan bantuan berupa bibit, namun tenaga penyuluh dari perguruan tinggi ternama. Ikan sungai merupakan jenis ikan yang dibudidayakan.

Desa Mustika bukan hanya melakukan inovasi-inovasi yang mampu mengangkat tingkat ekonomi masyarakatnya saja, tetapi saat kita memasuki wilayah desa, masyarakat dengan ramah menyambut dan hamparan penghijauan tanaman memanjakan kita saat memasuki setiap wilayah. Lingkungan pun menjadi asri.

Sementara di desa Sumber Baru, selain tanaman Kelor, yang terus dikembangkan adalah Padi Organik, Tanaman Hortikultura, untuk mensuplai kebutuhan sayur mayur wilayah kecamatan dimana nantinya akan dicanangkan menjadi desa agrowisata.

Delapan Pilar BIB

Dengan delapan pilar yang dicanangkan, BIB senantiasa mengawal pemberdayaan masyarakat khususnya di lingkar tambang. Disamping menjadi perusahaan pertambangan terkemuka dengan menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dan pemangku kepentingan, juga fokus kepada keunggulan kegiatan operasional dengan membangun pertumbuhan yang berkesinambungan melalui standar keselamatan kerja, kemudian pengembangan program kemasyarakatan yang baik dan pengelolaan lingkungan hidup yang tangguh.

Keberhasilannya dalam program PPM dan CSR merupakan bagian komitmen dari perusahaan khususnya terhadap aspek sosial dan lingkungan. BIB berharap akan dapat terwujudnya masyarakat pasca tambang yang maju dan sejahtera, serta berintelektual tinggi melalui agro-ekowisata.

BIB tidak hanya memberikan bantuan berupa bibit, baik bibit tanaman, juga bibit ikan yang disebar ke kolam-kolam, tetapi juga memberikan bantuan terkait penyuluhan agar masyarakat mampu mengelola bibit dengan baik.

Diharapkan pula BIB dapat memfasilitasi transformasi ekonomi masyarakat dari berbasis pertambangan menjadi agroindustri perdagangan pariwisata. Dukungan pengembangan infrastruktur ekologis juga berperan serta dalam mempersiapkan SDM.

Tidak luput terkait teknologi untuk pengembangan kapasitas, juga advokasi terhadap kebijakan pemerintah untuk mendukung pengembangan sektor agroindustri perdagangan dan pariwisata.

Dengan menginisiasi dua desa binaan BIB masuk kandidat 1.000 desa kreatif, diharapkan mampu menjadi desa percontohan program pengembangan desa kreatif yang menonjolkan program agrowisata dengan keberhasilan menciptakan produk-produk yang *eco-friendly.* T

LITIUM

MELEJIT DIPACU KENDARAAN LISTRIK

EGENIUS SODA
egen@tambang.co.id

Litium, salah satu komponen penting dalam produksi baterai kendaraan listrik. Permintaan terus meningkat. Konon, Indonesia memiliki cadangan besar. Tapi belum ada datanya. Australia dan negara-negara Amerika Latin sudah bersaing di Pasar Dunia.

Mimpi Indonesia menjadi Raja Baterai Kendaraan Listrik mulai diujudkan. Setidaknya langkah kecil sudah dimulai dengan peresmian *smelter* pertama yang lokasinya di Maluku Utara. *Smelter* ini, mengo-lah nikel jadi bahan baku baterai kendaraan listrik. Pabrik ini mengolah nikel kadar rendah menjadi *Mixed Hidroxide Percipitate* (MHP).

Selain nikel, untuk baterai kendaraan listrik, dua komoditi penting lainnya kobalt dan litium. Bagi dunia pertambangan Indonesia, litium mungkin belum banyak dikenal. Kabarnya, Indonesia punya cadangan besar sehingga bisa merajai dunia. Tapi seberapa besar cadangan yang dimiliki belum ada datanya.

Padahal, kelak komoditi ini akan menjadi salah satu yang penting seiring pengembangan kendaraan listrik. Sementara Indonesia masih belum tampak menggarap Litium, sejumlah negara sudah mulai menguasai pasar Global. Bahkan mereka, Australia dengan negara-negara Amerika Latin ditambah Cina, sudah bersaing untuk memimpin pasar

Cadangan litium memang tersebar di Australia, Cili, Argentina, Cina, Bolivia, Brasil dan beberapa negara lainnya. Cili merupakan negara dengan deposit litium terbesar. Tapi, justru Australia dan Cina yang menguasai pasar litium global yang mencapai hampir 60% dari total produksi dunia.

Australia diperkirakan masih menjadi yang teratas sebagai produsen litium dunia dalam beberapa tahun ke depan. Data per Desember 2017, cadangan

Litium, salah satu komponen penting dalam produksi baterai kendaraan listrik.

tebukti dan terkira litium Australia sebesar 1.662 kiloton (kt). Ada empat tambang litium yang beroperasi yakni, tambang Greenbushes, Tambang Wodgina, tambang Mount Marion, dan tambang Mount Cattlin. Sedang, 4 lainnya dalam pengembangan pada tambang Bald Hill, tambang Earl Grey, dan dua lainnya bernama Tambang Pilgangoora.

Kondisi berbeda terjadi di Cili, Argentina dan Bolivia. Ke tiga negara ini, diketahui memiliki cadangan litium cukup besar, tapi belum dieksploitasi optimal. Sebabnya, ada penolakan masyarakat adat dan pemerintah lokal disana. Sehingga ke tiga negara yang disebut *Segitiga Lithium* ini belum bisa mengoptimalkan kekayaannya.

Pada 2018, total produksi litium global mencapai 85.000 ton. Naik 23% dari tahun sebelumnya. Seiring berkembangnya kendaraan listrik dan energi baru dan terbarukan, permintaan litium terus meningkat. Sebuah lembaga riset, Fitch Rating, memperkirakan produksi lithium global akan meningkat lebih dari tiga kali lipat. Dari 442.000 ton lithium carbonate-equivalent (LCE) pada 2020 menjadi 1,5 juta ton LCE pada 2030.

Diperkirakan, negara-negara yang selama ini menjadi produsen litium akan meningkatkan produksi. Cina dan Cili diperkirakan akan meningkatkan kapasitas produksinya lebih dari dua kali lipat. Sementara produksi Brasil akan tumbuh lima kali lipat. Demikian juga dengan Argentina diramal meningkat tajam dalam 10 tahun ke depan.

Kenaikan produksi ini sejalan dengan kenaikan permintaan litium. Dalam beberapa tahun terakhir, kenaikan permintaan litium ditopang perkembangan kendaraan listrik. Fitch Rating menyebutkan, selama 2020 pejualan mobil listrik telah meningkat 20%.

Periode 2020-2030 diperkirakan penjualan kendaraan listrik meningkat dari 3,1 juta unit menjadi 21,2 juta unit pada 2030. Pertumbuhan ini didukung subsidi pembelian yang besar, kontrol emisi yang lebih ketat dan meningkatnya minat konsumen.

Australia diperkirakan masih menjadi yang teratas sebagai produsen litium dunia dalam beberapa tahun ke depan.

Sejalan dengan peningkatan penjualan mobil listrik, konsumsi litium juga ikut naik. Selama periode 2020-2030 itu, diperkirakan konsumsi litium naik tujuh kali lipat. Sektor kendaraan listrik akan menjadi konsumen terbesar dari litium dengan menguasai hampir 80% pada 2030. Saat ini baru menyerap 40-45%.

Cina diperkirakan tetap menjadi produsen baterai terbesar. Terhitung sekitar 80% dari kapasitas produksi terpasang pada 2020. Tapi, produsen lain yang berasal dari Jepang, Korea Selatan, AS, dan Hongaria kemungkinan besar mencatat kenaikan seiring tumbuhnya manufaktur baterai di negara mereka. Kemudian ada juga negara yang disebut sebagai pendatang baru seperti Jerman, Polandia, Swedia, Prancis, Inggris, dan Thailand. Indonesia masuk dalam kelompok ini.

Seiring dengan permintaan yang terus meningkat, persaingan juga makin ketat untuk mendapatkan pasokan litium. Perusahaan otomotif, raksasa teknologi baterai, perusahaan manufaktur bahan kimia akan makin gencar memburu litium. Pastinya, investasi sektor ini juga makin menggelontor.

Bukan tidak mungkin ke depannya, bakal ada aliansi strategis antara perusahaan produsen mobil dengan perusahaan pertambangan. Selentingan itu sudah mulai terdengar, bahwa produsen mobil listrik seperti Volkswagen Group dan Mercedes-Benz, sedang merintis gerakan mengamankan rantai pasok litium dengan masuk ke sektor tambang.

Di luar sektor otomotif, pemanfaatan baterai untuk keperluan lain, seperti perangkat elektronik *portable* dan perangkat *e-bikes*, juga akan berkontribusi terhadap meningkatnya kebutuhan litium.

Tantangan Ke depan

Ada beberapa tantangan yang perlu diantisipasi ke depan terkait dengan litium. Di antaranya, soal harga komoditi ini. Pergerakan harga akan sangat bergantung pada perkembangan teknologi kendaraan listrik ke depan. Tantangan lain, kemajuan teknologi ekstraksi litium yang akan lebih cepat dari saat ini. Juga, adanya teknologi daur ulang baterai yang bisa memenuhi kebutuhan pasar.

Tantangan lainnya, bagaimana kegiatan pertambangan litium lebih ramah lingkungan. Seiring perkembangan teknik ekstraksi baru ini, struktur industri, bentuk kurva biaya, dan pertimbangan lingkungan, sosial, serta tata kelola (ESG) juga terus berkembang. Penyedia litium yang lebih ramah lingkungan dengan penggunaan air dan emisi karbon rendah akan jadi pilihan.

Selama ini kegiatan penambangan dilakukan di batuan mineral keras, seperti di Australia. Di Chile dan Argentina, penambangan dilakukan pada air asin bawah tanah yang terdapat di permukaan dasar danau yang sudah kering. Diperkirakan sekitar 65% produksi global berasal dari tambang litium hard-rock Australia. Sementara 35% dari air asin Amerika Latin dan Cina. Saat ini, banyak pendatang baru mengerjakan teknik ekstraksi dengan air asin panas bumi dan endapan sedimen tanah liat.

Cina diperkirakan tetap menjadi produsen baterai terbesar. Terhitung sekitar 80% dari kapasitas produksi terpasang pada 2020.

SEKILAS TENTANG LITIUM

Komoditi litium dalam beberapa waktu terakhir semakin diminati. Litium ini merupakan logam alkali yang merupakan logam ringan. Logam berwarna putih keperakan memiliki unsur sangat reaktif dan mudah terbakar.Litium ada juga dalam bentuk mineral.

Ketika diekstraksi, mineral litium menunjukkan warna kilau logam. Karena sifat keaktifan yang tinggi, warna putih keperakan berubah warna kusam abu-abu keperakan hingga seperti noda hitam.

Litium tidak pernah terdapat sebagai unsur bebas di alam, tapi hanya sebagai senyawa, seperti mineral pegmatit yang dulunya merupakan sumber utama litium. Litium hadir dalam air laut dan biasanya diperoleh dari air asin, karena kelarutannya sebagai ion.

Logam litium diisolasi secara elektrolisis dari campuran litium klorida dan kalium klorida. Ada lima sumber utama litium: Spoudumen yakni mineral yang mengandung litium dengan rumus senyawa kimia berupa ($LiAlSi_2O_6$).Saat ini, mineral tersebut sudah berhasil ditemukan di Afghanistan, Australia, Brasil, Madagaskar, Pakistan, dan Amerika Serikat.

Kedua, Zinnwaldit yakni mineral dengan lithium yang dalam rumus senyawa kimia berupa $KLiFeAl(AlSi_3)O_{10}(F,OH)_2$. Ditemukan di perbatasan Jerman-Republik Ceko, Inggris, Madagaskar, Amerika Serikat, dan Jepang.

Ketiga, mineral yang mengandung litium dalam rumus senyawa kimia berupa $K(Li,Al)_3(Si,Al)_4O_{10}(F,OH)_2$. Sudah berhasil ditemukan di Brasil, Rusia, Amerika Serikat, Kanada, dan Madagaskar.

Keempat, Amblygonit dengan rumus senyawa kimia berupa $(Li,Na)Al(PO_4)(F,OH)$. Sudah berhasil ditemukan di California, Spanyol, dan Dakota Selatan.

Kelima, Petalit mengandung lithium dalam rumus senyawa kimia berupa $LiAlSi_4O_{10}$. Ditemukan di Australia, Brasil, Namibia, Kanada, dan Zimbabwe.

Pada 2019 Akademi Sains Kerajaan Swedia menganugerahkan penghargaan Nobel Kimia kepada tiga ilmuwan, John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham dan Akira Yoshino, karena berjasa mengembangkan baterai Litium-Ion.

MENAMBANG DI JANTUNG PARIWISATA

MUFLIHUN HIDAYAT
muflihhidayat@tambang.co.id

Di ujung Raja Ampat, Papua Barat, terdapat sebuah daratan kecil bernama Pulau Gag. Lokasinya hampir mendekati Maluku Utara. Pulau kecil yang dihuni sekitar 1000 jiwa ini, menyimpan sumber daya alam cukup menjanjikan. Di dasar perutnya, tersimpan kekayaan mineral nikel.

Adalah PT Gag Nikel, anak usaha pelat merah PT Antam yang menambang di Pulau Gag. Operasinya menantang lantaran berdampingan dengan salah satu jantung pariwisata di Tanah Air, Raja Ampat. Butuh waktu tempuh sekitar 4 jam lebih untuk mencapai Pulau Gag, menyeberang dari pelabuhan di Kabupaten Sorong.

Pada akhir Juni lalu, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyambangi tambang Gag Nikel. Kedatangan Mandacan disambut meriah oleh anak-anak Pulau Gag, dengan menyajikan berbagai macam tarian tradisional.

Dalam kunjungan itu, Mandacan meresmikan lokasi penangkaran penyu di Wisata Pantai Tuturuga. Salah satu destinasi wisata yang dikembangkan dari hasil kolaborasi Pemerintah Daerah Papua Barat dengan Gag Nikel. Ia mengapresiasi kinerja Gag Nikel. Menurutnya, kegiatan industri pertambangan ternyata dapat menjadi modal untuk mengembangkan berbagai potensi daerah.

"Ada sumber daya alam tambang di sini, ada nikel. Kita manfaatkan secara baik dan bijaksana. Di tempat ini juga, kita harap bisa jadi destinasi wisata yang menarik di Raja Ampat," ungkapnya.

Selain menandatangani prasasti peresmian Pantai Tururuga, Dominggus juga melakukan pelepasan penyu ke alam liar. Sebelumnya, penyu tersebut dirawat di lokasi penangkaran sejak masih telur. Kemudian menetas jadi anakan penyu atau tukik hingga cangkangnya kuat dan siap dilepas ke alam liar.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyambangi tambang Gag Nikel. Kedatangan Gubernur disambut meriah disertai berbagai agenda kegiatan seperti peresmian lokasi penangkaran penyu di Wisata Pantai Tuturuga juga melakukan pelepasan penyu ke alam liar.

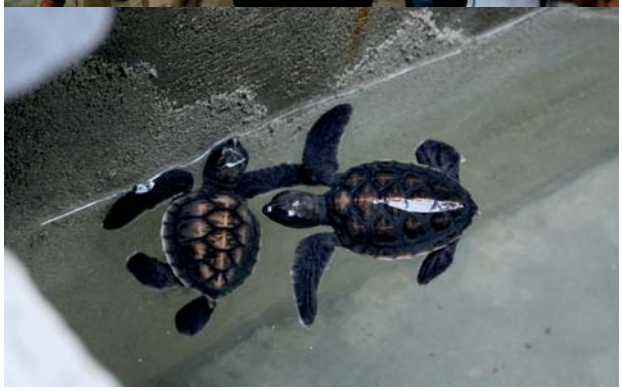

Proses penangkaran dilakukan secara mandiri oleh penduduk Pulau Gag dengan didampingi tim Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dari Gag Nikel.

"Ini sesuai dengan program Pemerintah Papua Barat, Pulau Gag sebagai lokasi konservasi dan pembangunan yang berkelanjutan. Masyarakat di sini dukung operasi Gag Nikel," beber Mandacan.

Selain demi menjaga kelestarian lingkungan, pelepasan penyu itu dinilai dapat menguntungkan di masa mendatang. Para wisatawan asing dan domestik yang berkunjung ke Raja Ampat, nantinya dapat menikmati alternatif wisata penyu di Pulau Gag.

"Kita lestarikan bersama supaya bisa kita manfaatkan. Kalau kita jaga alam, alam akan jaga kita," ujar Dominggus.

Bagi masyarakat Pulau Gag, cukup mudah menjumpai penyu. Pulau ini dikenal sebagai tempat singgah penyu untuk bertelur. Dulu, warga setempat kurang memperhatikan kelestarian penyu karena kurangnya edukasi. Masyarakat lokal terbiasa mengonsumsi penyu, mulai dari telur hingga dagingnya. Jauh dari kehidupan kota, dan terbiasa hidup di tengah laut, membuat warga Pulau Gag memakan apa saja yang hidup di laut, termasuk penyu.

Gag Nikel menuntun masyarakat belajar mengenal lebih dekat tentang arti penyu bagi kehidupan generasi mendatang. Gag Nikel mengedukasi bahwa penyu merupakan hewan purba yang dilindungi.

Dengan membangun penangkaran penyu di Tuturuga, diharapkan Pulau Gag dapat menjadi destinasi wisata unggulan di Raja Ampat. Gag Nikel membantu merealisasikan cita-cita itu, di mana keindahan terumbu karang yang tersebar di perairan Raja Ampat, akan semakin memikat berkat adanya tambahan wisata penyu. T

LINI PRODUK UNTUK MEMAKSIMALKAN PROFIT

Volvo Construction Equipment menawarkan tiga model excavator kelas 20 ton–EC200D, EC210D, dan EC220D–ke pasar Asia untuk meminimalkan biaya kepemilikan dan operasi, sekaligus meningkatkan profit sesuai tuntutan aplikasi kerja.

Sebagai upaya peningkatan keuntungan bagi pelanggan, Volvo Construction Equipment (Volvo CE) menawarkan tiga model *crawler excavator* kelas 20T untuk memenuhi kebutuhan pasar Asia Tenggara. Lini produk ini dirancang untuk memaksimalkan profit bisnis pelanggan, baik untuk aplikasi ringan, medium, maupun berat.

Rangkaian excavator Volvo ini dari segi keamanan, kenyamanan operator, keandalan, dan kemudahan perawatan sangat menonjol. EC200D, EC210D dan EC220D dilengkapi dengan kabin yang nyaman serta perawatan yang mudah, sehingga dipercaya menjadi pelengkap armada konstruksi.

Ketiga excavator ini juga dibekali dengan tiga keunggulan, yakni tenaga, kecepatan, dan kapasitas *bucket* untuk penyesuaian aplikasi kerja. Hal ini tentunya dapat dimaksimalkan pelanggan untuk meraih profitabilitas.

Pilihan Ideal

EC200D, dengan bobot operasi 19.800-20.300 kg (versi standar), merupakan seri paling ringan dari ketiga model. Namun, bukan berarti alat ini kurang tangguh untuk diajak bekerja di sektor konstruksi atau demolisi. Dengan efisiensi bahan bakar, siklus yang cepat, dan kemudahan operasi, EC200D menjadi pilihan ideal dalam konstruksi umum, pembangunan jalan, dan banyak lagi.

Dengan bobot operasi 18.100-22.800 kg (versi standar), Volvo EC210D adalah excavator medium yang ideal untuk digunakan bersama *breaker*. Desainnya dikhususkan agar awet dan mampu mendongkrak produktivitas di lingkungan kerja yang menuntut, termasuk konstruksi berat dan tambang kuari.

Crawler excavator Volvo 20 ton: EC200D, EC210D, dan EC220D

Crawler excavator Volvo EC210D

Dengan bobot operasi sebesar 20.900-24.400 kg (versi standar), menjadikan excavator Volvo EC220D menjadi tangguh di kelas ini dengan kemampuan operasi di kondisi paling berat tanpa kehilangan output optimalnya. Alat ini cocok digunakan untuk hampir semua aplikasi, mulai dari pembangunan, utilitas, dan infrastruktur berat hingga demolisi tambang dan daur ulang. Selain itu, EC220D juga mendukung penggunaan *hydraulic breaker*.

Pilihan di antara ketiga seri ini bergantung pada tugas yang dibebankan dan jumlah jam operasi yang diharapkan di lingkungan kerja, termasuk apakah pelanggan menginginkan skema pembayaran per jam atau per total proyek.

Diharapkan pelanggan di kelas 20 ton dapat menganalisis lebih lanjut terkait bagaimana excavator akan digunakan.

Menurut Muralidharan AM, *Managing Director* Volvo CE Singapura, "Excavator yang paling berat tidak selalu menjadi pilihan paling tepat, karena bisa jadi nilai investasinya terlalu besar dibandingkan pekerjaan aktualnya".

Produktivitas

Volvo EC220D patut menjadi andalan berkat kapasitas angkut maksimal per jam. Hal ini berkat mesin 6 silinder yang melontarkan torsi tinggi, hidraulis bertenaga, dan kapasitas angkut yang besar. Hasilnya, EC220D ideal bagi pelanggan yang mengincar produktivitas dan ingin pekerjaannya selesai secepat mungkin untuk mendapatkan profit per jam yang optimal.

Namun, jika excavator hanya digunakan untuk mengangkut pasir di sebuah tambang dalam hitungan beberapa menit per jamnya, atau jika proyek dihitung dalam satuan jam, penggunaan EC220D dengan performa sebesar itu menjadi pilihan yang kurang tepat.

Untuk kasus penggunaan yang jarang atau waktu siklus tidak begitu krusial, EC210D atau EC200D menjadi pilihan investasi yang tepat.

"Kunci profitabilitas yang optimal adalah mencocokkan spesifikasi alat dengan aplikasi kerja. Tidak kurang, tidak lebih. Ini akan menjamin biaya total kepemilikan sepadan dengan biaya operasi," lanjut Muralidharan menerangkan.

Terlepas dari apa pun yang menjadi pilihan, excavator dijamin mendapatkan dukungan aftermarket dari jaringan dealer Volvo. Tersebar merata di seluruh pasar Asia, dealer Volvo memiliki banyak teknisi mahir dan ketersediaan suku cadang berkualitas untuk memastikan semua masalah terkait mesin dapat didiagnosis dan diselesaikan sesegera mungkin. Dealer Volvo selalu siap menjawab semua kebutuhan bisnis pelanggannya. T

Crawler excavator Volvo 20 ton: EC220D

MEDCO DI KUARTAL I-2021

RAIH LABA BERSIH USD5,1 JUTA

EGENIUS SODA
egen@tambang.co.id

Membuka tahun 2021, PT Medco Energi Internasional,Tbk, (MEDC) membukukan kinerja yang membaik. Ini terlihat dari capaian kinerja di kuartal I. Perusahaan mencatat laba bersih sebesar USD5,1 juta. Laba ini diperoleh dari operasi minyak dan gas serta dari kegiatan usaha pertambangan tembaga dan emas lewat PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

Capaian laba usaha ini ditopang pendapatan positif yang berhasil dibukukan perusahaan dalam tiga bulan awal tahun ini. Di kuartal I tahun ini,perusahaan dengan kode saham MEDC ini berhasil membukukan pendapatan sebesar USD 300,23 juta. Dibanding periode yang sama tahun lalu ada kenaikan 8,58%. Di periode yang sama tahun lalu perusahaan memcatat pendapatan sebesar USD276,49 juta.

Dari sisi kinerja operasi, perusahaan berhasil memproduksi minyak dan gas sebesar 101 mboepd. Ini menunjukkan kinerja perusahaan yang stabil dari tahun ke tahun. Meski portofolio gas lebih besar namun permintaan gas tetap rendah terutama di Aceh dan Jawa Timur.

Di sektor migas juga diiformasikan bahwa Sauth Natuna Sea Blok B mendapat perubahan terms keekonomian setelah menyelesaikan pengembangan lapangan minyak Forel yang sedang dilaksanakan. Dalam tiga bulan pertama tahun ini juga perusahaan menyelesaikan program *Acid Fracturing* pada dua sumum Alur Siwah untuk optimalisasi produksi gas masa depan Aceh.

Di sektor pertambangan, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di kuartal I tahun ini telah memproduksi 48 Mlbs tembaga dan 34 Koz emas dengan terus mengakses bijih dari Fase 7. Di sisi lain perusahaan juga tengah melakukan pengembangan fase 8.

Selain itu pada Januari 2021, AMNT juga telah memperoleh perpanjangan selama setahun izin ekspor untuk konsentrat tembaga. Perusahaan mendapat kuota ekspor sebesar 579.444 Wet Metric Ton. Izin ini diberikan karena perusahaan dalam membangun *smelter* telah mencapai kemajuan hingga 27%.

Medco juga bergerak di sektor pembangkit listrik lewat anak usahanya Medco Power. Medco Power sejauh ini telah menghasilkan penjualan sebesar 666 GWh. Terjadi penurunan 4% jika dilihat tahun ke tahun. Ini terutama terjadi karena permintaan listrik yang lebih rendah. Dari jumlah tersebut 32% dihasilkan dari energi terbarukan.

Sementara perkembangan *combined cycle power plant* (CCPP) 275 megawatt (MW) Riau telah mencapai 97%. Sejauh ini *Fase commissioning* terus berlanjut dan masih sesuai rencana untuk operasi komersial di kuartal empat tahun ini.

Lalu aliansi strategis dengan Kansai Electric Power Company yang diteken pada 31 Maret 2021, akan memperkuat daya saing Medco Power pada proyek pembangkit listrik tenaga gas di masa datang.

Sedangkan pembangunan fasilitas Solar PV sebesar 26 megawatt peak (MWp) di Sumbawa sedang berlangsung dengan operasi komersial diharapkan pada kuartal pertama 2022.

”Saya senang melaporkan hasil kinerja yang membaik dengan laba bersih positif dan EBITDA yang meningkat. Harga komoditas terlihat telah berangsur pulih, namun permintaan gas masih rendah. Kinerja operasional dan keselamatan kerja kami tetap kuat, meskipun pandemi jelas belum berakhir, kami terus menjaga protocol kesehatan dengan ketat,” tandas CEO Medco Energi Internasional Roberto Lorato.

INDIKA ENERGY

AKUISISI NUSANTARA RESOURCES LIMITED

EGENIUS SODA
egen@tambang.co.id

Perusahaan energy terintegrasi, PT Indika Energy Tbk. (Indika Energy) telah menandatangani suatu *Scheme Implementation Deed* untuk mengambilallih Nusantara Resources Limited (Nusantara). Nusantara sendiri merupakan perusahaan yang mengelola tambang emas Awak Mas di Luwu, Sulawesi Selatan. Proses pengambilalihan ini dilakukan melalui mekanisme *Scheme of Arrangement*.

Rencana transaksi ini merupakan langkah strategis Indika Energy untuk meningkatkan eksposur di sektor pertambangan emas dan memperkuat diversifikasi bisnis perusahaan. Indika Energy akan membayar AU$ 0,35 per saham untuk 168.041.107 saham yang belum dimiliki perusahaan. Sehingga total transaksinya adalah sebesar AU$ 58,8 juta atau ekuivalen dengan US$ 45,3 juta untuk sekitar 72% saham di Nusantara.

Adapun rencana transaksi ini tunduk pada pemenuhan persyaratan, antara lain persetujuan pemegang saham Nusantara pada rapat umum pemegang saham yang rencananya akan diselenggarakan pada September 2021. Juga harus atas persetujuan pengadilan di Australia serta pemenuhan kondisi lainnya dalam dokumen sehubungan dengan rencana transaksi. Rencana transaksi ini juga menerima dukungan penuh dari semua anggota Independent Board Nusantara.

Untuk diketahui, Indika Energy, dan/atau melalui anak usahanya PT Indika Mineral Investindo (IMI) saat ini memiliki sekitar 28% saham di Nusantara serta kepemilikan saham secara langsung di PT Masmindo Dwi Area (Masmindo), yang mengelola tambang emas Awak Mas sebanyak 25%. Melalui transaksi ini, Indika Energy akan mengendalikan Masmindo sepenuhnya sehingga secara efektif meningkatkan eksposur perusahaan di sektor pertambangan emas.

Direktur Utama Indika Energy Arsjad Rasjid menjelaskan transaksi ini merupakan langkah strategis Indika Energy untuk memperkuat diversifikasi bisnis di sektor non batu bara yang terus diupayakan sejak 3 tahun terakhir. Ia berharap transaksi ini dapat menciptakan nilai jangka panjang yang menguntungkan bagi seluruh pemangku kepentingan.

”Sejak kami melakukan investasi awal di akhir 2018, *reserves* dan *resources* dari Masmindo sudah meningkat sebanyak 34% dan 18% yang sekarang berada di level 1,5 juta ons dan 2,35 juta ons. Kami percaya prospek emas kedepannya masih baik,” tutur Arsjad.

Sebagai bagian dari langkah strategis, anak perusahaan Indika Energy yaitu PT Petrosea Tbk. (Petrosea) juga terlibat di dalam proyek Awak Mas untuk mewujudkan sinergi usaha dalam rangka penciptaan nilai. Petrosea bertindak sebagai kontraktor untuk pengerjaan *Front End Engineering and Design* (FEED) yang akan dilanjutkan dengan negosiasi pengerjaan *Engineering, Procurement and Construction* (EPC). T

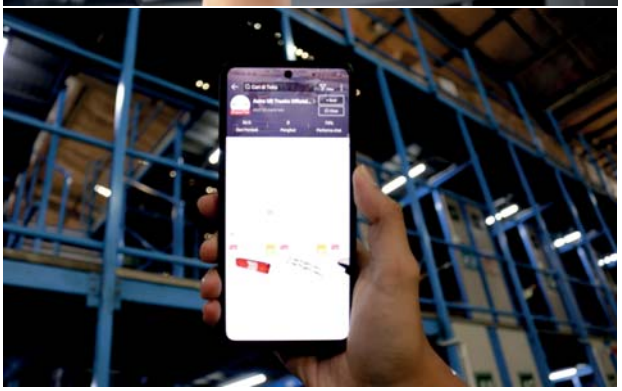

ASTRA UD TRUCKS

PERLUAS JARINGAN DIGITAL DAN NON DIGITAL

Astra UD Trucks, bali hadir memberikan alternatif kemudahan pembelian kepada pelanggan melalui penambahan kerjasama dengan salah satu *marketplace* terbesar di Indonesia, yaitu Shopee.

Astra UD Trucks menawarkan solusi bagi kebutuhan transportasi pelanggan. Di saat kondisi pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung selama 2 tahun ini, tidak hanya berpengaruh dalam industri otomotif tapi juga dalam industri logistik. Pasalnya, di masa pembatasan kegiatan, penjualan dari *marketplace* memberikan kontribusi transaksi terbesar kedua dalam penjualan suku cadang. Astra UD Trucks memberikan kemudahan pembelian suku cadang dan paket purna jual dengan memperluas *channel* digital purna jual di *marketplace* dan menambah jaringan outlet untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan Kuzer dan Quester.

Setelah sebelumnya kami hadir di 3 *marketplace*, Blibli.com, Tokopedia, dan Seva.id, kini hadir di Shopee Indonesia.

Pelanggan dapat dengan mudah melakukan transaksi di mana pun dan kapan pun yang terpercaya dan dapat diadandalkan. Selain itu, untuk memperluas jangkauan *outlet*, Astra UD Trucks melakukan inovasi dengan pengusaha lokal mendirikan *channel* atau jaringan kerjasama baik penjualan unit dan atau purna jual.

PT KAPUAS PRIMA COAL (ZINC)

RAIH LABA BERSIH DI KUARTAL I-2021

PT Kapuas Prima Coal Tbk (ZINC), emiten yang bergerak di bidang pertambangan bijih besi (Fe) dan Galena di Indonesia, membukukan pertumbuhan kinerja pada Kuartal I-2021. Hingga akhir Maret 2021, ZINC berhasil mencatat penjualan sebesar Rp228,4 miliar, atau naik 36,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu Rp166,7 miliar.

Sementara laba kotor naik 124,5% menjadi Rp113,2 miliar, dan laba bersih melesat 304,4% menjadi Rp64,6 miliar dari Rp15,9 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Padli Noor selaku Direktur Independen ZINC mengungkapkan, pencapaian tersebut tak lepas dari hasil peningkatan kapasitas produksi yang sudah mulai dijalankan sejak akhir tahun 2020, serta tren peningkatan harga komoditas yang terus berlanjut hingga pertengahan tahun 2021 ini.

Hingga Kuartal I-2021, ZINC memproduksi ore sebesar 126.000 ton, meningkat 57,5% jika dibandingkan dengan produksi ore pada periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 80.000 ton.

Melihat tren kenaikan harga komoditas dan permintaan untuk konsentrat yang masih tinggi, Padli optimis hingga akhir tahun dapat mempertahankan kinerja yang positif.

Realisasi kinerja yang positif selama Kuartal I-2021, ditunjukan oleh peningkatan penjualan komoditas yang diproduksi oleh ZINC. Tercatat, per Maret 2021 penjualan konsentrat seng sebesar Rp108,6 miliar, atau naik 35,6% dari Rp80 miliar pada periode yang sama di tahun sebelumnya (YoY). Penjualan komoditas perak tumbuh 19,5% (YoY) dari Rp36,6 miliar menjadi Rp43,8 miliar.

VLGC PERTAMINA GAS II

KIBARKAN MERAH PUTIH TANDAI LOADING PERDANA

Kapal Pertamina Gas 2 (PG 2) yang dioperasikan oleh PT Pertamina International Shipping (PIS) - merupakan Subholding Company dari PT Pertamina (Persero), melakukan pelayaran perdana untuk mengangkut kargo LPG dari benua Amerika dengan FOB basis di LPG Export Terminal milik Phillips 66 di Freeport, Texas. PG 2 mulai berlayar dari Indonesia sejak 27 April dan tiba di Houston, Amerika Serikat pada 5 Juni 2021. Pelayaran ini menjadi tonggak sejarah bagi kapal berbendera Indonesia yang dapat disandarkan di terminal LPG Amerika

Mengangkut total 45.000 MT LPG milik *Subholding Commercial and Trading*, Kapal PG 2 dengan 27 orang kru, di mana 60 persennya berusia dibawah 40 tahun. Kapal ini menempuh perjalanan lebih dari 28.000 *nautical miles* dengan lebih dari 80 hari *round trips days*, dari Indonesia ke Amerika Serikat, lalu kembali ke Indonesia.

Perjalanan melewati 3 benua dan 2 samudra tersebut merupakan sebuah tantangan tersendiri, mengingat Kapal PG 2 harus lolos sertifikasi pemerintah AS. *Certificate of Compliance Examination*, merupakan sertifikat pengakuan dari pemerintah AS untuk Kapal PG 2 yang telah memenuhi aturan dan syarat.

Sertifikat yang diperoleh menunjukkan bahwa Pertamina Gas 2 dapat melakukan segala aktivitas terutama di perairan Amerika Serikat.

PT INTRACO PENTA, TBK (INTA)

SUSUN STRATEGI BERTAHAN DI TENGAH BADAI

PT Intraco Penta Tbk (INTA) emiten penyedia alat berat, alat konstruksi dan pendukungnya terus melanjutkan berbagai upaya untuk bertahan di tengah badai akibat pandemi. Dalam kegiatan paparan publiknya, telah melakukan berbagai strategi konsolidasi dan restrukturisasi anak usaha, khususnya PT Intan Baruprana Finance, Tbk (IBFN) selama setahun terakhir ini dan rencana perbaikan kinerjanya tahun ini.

Menurut Eddy Rodianto, selaku Direktur INTA, selain sektor pertambangan yang selama ini sudah menjadi spesialisasi utamanya, mendorong peluang-peluang penjualan pada pasar baru seperti halnya sektor infrastruktur, pertanian, kehutanan, dan industri umum lainnya.

Disamping itu, INTA juga terus merambah sektor tambang selain batu bara seperti nikel, emas serta

bauksit dan mineral lainnya. Selama kuartal pertama tahun ini, per akhir Maret 2021, penjualan alat berat di luar sektor tambang telah meningkat 43%.

Tak hanya alat berat, pada tahun ini juga mendorong penjualan suku cadang yang merupakan produk dengan profitabilitas yang baik untuk meningkatkan margin INTA ke depan.

"Melihat tren harga komoditas yang saat ini masih menunjukkan peningkatan, serta pembangunan infrastruktur yang mulai kembali digerakkan oleh pemerintah, Perseroan optimis realisasi penjualan alat berat di tahun ini akan membaik dibandingkan penjualan pada tahun 2020," ungkap Eddy.

Untuk tahun 2021, melihat proses pemulihan ekonomi pasca Covid19 terus berjalan, dan proses vaksinasi juga terus digencarkan, INTA optimis akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan pada tahun 2020 yang lalu.

INDIKA ENERGY

MULAI PROGRAM VAKSINASI GOTONG ROYONG

Indika Energy memulai pelaksanaan program Vaksinasi Gotong Royong untuk mendukung Pemerintah mencapai target vaksinasi nasional dan wujudkan Indonesia yang lebih sehat. Vaksinasi Gotong Royong dilakukan bagi karyawan Indika Energy Group dan perusahaan afiliasinya, secara bertahap yang dimulai pada 9 Juni 2021 dengan total 21.650 karyawan dan keluarga yang telah didaftarkan.

Tahap pertama dilakukan terhadap 3.000 karyawan di Jabodetabek dan berbagai wilayah operasional lainnya. Pada tahapan ini, vaksin yang digunakan adalah Sinopharm, yang telah lolos standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta telah mendapatkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Direktur Utama Indika Energy, Arsjad Rasjid menuturkan "Sejak awal pandemi, keselamatan dan kesehatan karyawan selalu menjadi prioritas utama perusa-

haan. Vaksinasi ini merupakan salah satu upaya kita bersama, sebagai elemen masyarakat, untuk membantu pemulihan ekonomi nasional," tuturnya.

PT PAMAPERSADA NUSANTARA (PAMA)

BANGUN HARMONI POSITIF DENGAN MASYARAKAT LINGKAR TAMBANG

Pelaksanaan program-program CSR PAMA, seperti Pengembangan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat, Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Manajemen Pengelolaan Lingkungan, Pendidikan, Peningkatan Keterampilan dan Kursus, serta Sosial, Budaya, Agama dan Sarana Sosial. Semua program telah dijalankan di semua site PAMA di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan dan Jakarta.

PT. Pamapersada Nusantara (PAMA), sebagai kontraktor penambangan berupaya untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar melalui berbagai program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Program CSR merupakan wujud dari misi PAMA untuk menjadi bagian dari masyarakat, terutama tempat PAMA beroperasi.

Program CSR PAMA seperti halnya lima bidang yang dimiliki seperti, Pengembangan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat, Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Manajemen Pengelolaan Lingkungan, Pendidikan, Peningkatan Keterampilan dan Kursus, serta Sosial, Budaya, Agama dan Sarana Sosial. Program-program telah dijalankan di *site* Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan dan Jakarta.

Gunawan Setiadi, *Security dan External Relation Dept. Head,* PT Pamapersada Nusantara mengatakan, menjaga keseimbangan alam dan membangun harmoni dengan masyarakat telah menjadi ciri khas PAMA. "Membangun dan memberdayakan masyarakat sekitar sama pentingnya dengan membangun negeri. Untuk itu, kami mengembangkan program CSR terpadu yang mencakup berbagai bidang mulai dari ekonomi, pendidikan hingga kesehatan."

Selama masa pandemi, PAMA juga berupaya untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat dengan berbagi sembako kepada masyarakat kurang mampu yang terdampak pandemi serta memberikan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) kepada instansi pemerintahan untuk membantu para tenaga kesehatan (Nakes) maupun Satuan Petugas (Satgas) Covid-19.

GUBERNUR KALTIM KUNJUNGI KEGIATAN CSR BERAU COAL

Gubernur Kaltim mengunjungi pabrik pengolahan kakao "Berau Cocoa", salah satu unit usaha PT Berau Coal. Ini merupakan bagian dari Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT Berau Coal.

Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor di sela-sela kunjungan ke wilayah utara, berkesempatan mengunjungi pabrik pengolahan kakao "Berau Cocoa" dan Politeknik Sinar Mas Berau Coal. Keduanya merupakan bagian dari Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT Berau Coal.

Isran Noor mengapresiasi PT Berau Coal, dalam pengembangan kakao di Berau yang telah memberikan kontribusi besar hingga produk kakao Berau bisa tembus ke pasar internasional. "Apalagi informasinya, Kakao Berau ini memiliki kualitas nomor 4 di dunia," jelasnya.

Ia berharap agar pengembangan kakao terus ditingkatkan. Dengan bantuan dan kerja sama PT Berau Coal, hasil produksi kakao Berau juga dapat lebih berkembang. Saat ini Berau masih mengirim barang mentah ke luar daerah atau ke luar negeri, namun seiring berjalannya waktu sudah bisa mengirim berupa hasil produksi.

"Saya kira hasil produksi kakao di Berau memiliki keunikan tersendiri. Karena, meskipun sudah menjadi hasil produksi, namun aroma dan rasa kakaonya masih sangat terasa. Ini yang membedakan dari daerah lain," ungkapnya.

Terkait keberadaan Politeknik Sinar Mas Berau Coal. Gubernur Isran menilai sangat besar manfaat dari sisi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Berau.

"Karena kita tahu bahwa hanya dengan pembangunan SDM, kita bisa memanfaatkan Sumber Daya Alam. Tanpa adanya SDM yang berkualitas maka otomatis tidak akan bisa mengembangkan potensi SDA yang begitu besar, banyak dan melimpah," tutupnya. T

PERTAMINA UMK ACADEMY 2021 RESMI DIGELAR

PT Pertamina (Persero) resmi menggelar ajang Pertamina UMK Academy 2021. Acara yang menjadi Program Pendanaan UMK dibuka secara virtual pada Rabu (23/6) tersebut bakal digelar selama 6 (enam) bulan hingga pertengahan Desember 2021. Ditargetkan, 645 mitra binaan akan naik kelas melalui program UMK Academy tahun ini.

Sekretaris Perusahaan Pertamina Brahmantya Satyamurti Poerwadi membuka langsung kegiatan Kick Off Pertamina UMK Academy 2021 tersebut. Dalam sambutannya, Brahmantya memaparkan sejumlah tujuan digelarnya kegiatan ini. "Tentunya, yakni membantu para mitra binaan agar dapat naik kelas secara intensif," tuturnya Brahmantya.

Selain itu, juga sebagai sarana untuk membantu meningkatkan jangkauan pasar produk mitra binaan. Lalu, meningkatkan pengetahuan usaha dalam pemasaran produk secara *online*. Serta memberikan *knowledge* berwirausaha untuk menciptakan wirausahawan yang tangguh dan mandiri.

Di kesempatan itu *Vice President* CSR and SMEPP *Management* Pertamina, Arya Dwi Paramita memberi penjelasan teknis terkait pelaksanaan program Pertamina UMK Academy. Menurutnya, sama seperti gelaran UMK Academy tahun 2020, para mitra binaan yang terpilih menjadi peserta akan dikelompokkan menjadi empat kelas.

"Mereka akan dikelompokkan berdasarkan kondisi usahanya. Yakni kelas *Go Modern* yang mayoritas diisi oleh UMK dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Kemudian kelas *Go Digital* dan *Go Online* dari sektor perdagangan, jasa, dan industri. Serta kelas *Go Global* bagi UMK yang benar-benar siap mengisi pasar dunia melalui kegiatan ekspor," ungkap Aria.

ANAK USAHA J RESOURCES GELAR KHITANAN MASSAL

PT Arafura Surya Alam (PT ASA), Anak Usaha PT J Resources Asia Pasifik,Tbk (PSAB) melaksanakan kegiatan khitanan massal gratis. Kegiatan ini dilakukan di Desa Kotabunan, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara.

Untuk kegiatan ini, PT ASA menggandeng Puskesmas Kotabunan. Puskesmas Kotabunan memiliki tenaga professional yang terampil dan terlatih dalam melakukan khitan. Selain itu, Puskesmas Kotabunan juga merupakan mitra Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT ASA.

Kegiatan khitanan massal ini dibuka Camat Kotabunan, Ahmad Al Heid yang didampingi perwakilan management PT ASA, Andreas Harysaputra Bolitobi selaku *Manager External Relations*. "Puskesmas Kotabunan menyiapkan 4 tempat khitan dengan waktu proses khitan masing-masing kurang lebih 30 menit. Sejumlah 49 anak telah mengikuti khitanan massal yang disupport penuh oleh PT ASA. Para keluarga tentu sangat terbantu, anak-anaknya bisa dibantu khitan oleh PT ASA," ungkap Ahmad Al Heid, Camat Kotabunan.

Sementara Andreas Harysaputra Bolitobi selaku Manager External Relations mengatakan kegiatan ini juga membantu keluarga yang tidak mampun melaksanakan khitanan. "Kami menyadari bahwa kesehatan anak-anak ke depan itu sangat penting. Di masa pandemi ini, kami memahami bahwa sulitnya untuk melaksanakan khitanan karena masalah biaya. Disini ASA ingin berbagi bersama masyarakat terutama anak-anak, untuk melaksakanan Khitanan Massal Anak Desa Lingkar Tambang," terang Andreas.

AMMAN GELAR VAKSINASI BUAT KARYAWAN

PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN) melakukan vaksinasi terhadap seluruh karyawan dan keluarga yang berlokasi di *site* Batu Hijau dan wilayah lain dalam Provinsi NTB. Proses vaksinasi ini berlangsung sejak tanggal 22 hingga 30 Juni 2021.

Head of Corporate Communications AMMAN, Kartika Octaviana menjelaskan keberhasilan pelaksanaan program vaksinasi ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah dan kesadaran seluruh karyawan untuk melindungi diri sendiri, keluarga, rekan kerja, serta masyarakat sekitar.

"Kami sangat mengapresiasi bantuan dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi NTB. Hingga hari Rabu, 30 Juni 2021, kami berhasil menggunakan seluruh dukungan vaksin dari Dinkes NTB untuk seluruh karyawan dan keluarga di dalam *site* Batu Hijau dan fasilitas akomodasi tambahan di Pulau Lombok. Kami juga mendapatkan bantuan vaksinator dari Dinkes Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), sehingga rekan-rekan karyawan yang sedang *field break* dan berada di luar pagar Batu Hijau juga bisa mendapatkan vaksinasi," jelas Kartika.

Kartika juga menegaskan bahwa aspek kesehatan dan perlindungan bagi karyawan dan keluarga selalu menjadi prioritas perusahaan, terutama di tengah kondisi pandemi saat ini. "Melalui berbagai upaya pencegahan dan protokol kesehatan yang telah dilakukan, kami berusaha menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehingga dapat memotivasi karyawan untuk memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan, bangsa, dan negara," tambah Kartika.

Dinas Kesehatan Provinsi NTB mendukung kegiatan ini selain menyediakan vaksin juga membantu menyediakan vaksinator yang merupakan tenaga medis dari Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM,. MARS, menyebutkan bahwa upaya vaksinasi massal ini dilakukan agar semakin banyak masyarakat yang dapat terlindungi dari COVID-19 sehingga mengurangi laju penyebaran virus.

"Kami juga mengingatkan agar jangan lupa untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan 5M, antara lain memakai *masker*, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi bepergian, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer*," tandas dr. Fikri. T

BAKTI ELNUSA PETROFIN UNTUK LANSIA

PT Elnusa Petrofin (EPN) anak usaha PT Elnusa Tbk (ELSA) merayakan pertambahan usia menjadi 25 Tahun. Menandai ulang tahun perusahaan pada tahun ini, EPN menggelar beberapa acara untuk memperingatinya antara lain mengadakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Petrofin Peduli.

Untuk itu sebagai wujud syukur atas pancapaian perusahaan di usia 25 tahun, Elnusa Petrofin menggelar kegiatan CSR Petrofin Peduli dengan tema "Bakti Elnusa Petrofin Untuk Lansia Indonesia" yang dilaksakan sepanjang 20 Juni-3 Juli 2021 diseluruh wilayah operasi EPN di Indonesia.

Kegiatan CSR yang dikhususkan bagi Lansia dhuafa yang tinggal disekitar wilayah operasi Elnusa Petrofin ini, berangkat dari keprihatinan mendalam akan wabah Covid-19 yang kembali meningkat di masyarakat, dimana orang lanjut usia tentu sangat rentan terpapar virus ini. T

Kegiatan CSR Petrofin Peduli di Panti Sosial Cipayung.

DJI LUNCURKAN AGRAS T10 DAN T30

DRONE PENYEMPROTAN AREA REKLAMASI

DJI, meluncurkan dua solusi baru untuk sektor pertanian maupun program reklamasi di pertambangan, DJI Agras T30, sebagai *drone* dengan sistem penyemprotan dan distribusi benih berkapasitas 30L, sementara *drone* DJI Agras T10, memiliki kapasitas 10L, dengan biaya investasi yang lebih ekonomis dan ideal untuk area skala kecil.

Diluncurkan bersama dengan Halo Robotics, penyedia peralatan dan layanan *drone* komersial, rangkaian teknologi baru DJI akan dapat diakses sepenuhnya oleh pelanggan

Kehandalan dan kualitas yang diharapkan dari DJI diwujudkan dalam produk *spraying drone* DJI Agras T30 dan DJI Agras T10 lengkap dengan berbagai peningkatan fitur, seperti *omnidirectional* radar, kemampuan untuk terbang mengikuti kontur lahan, serta dapat melakukan penerbangan otomatis secara penuh untuk penyemprotan di berbagai tipe tanaman dan kondisi area.

Spraying drone DJI Agras T10 dan T30 dilengkapi dengan *spreader system* terbaru, memungkinkan *drone* untuk menyemprotkan benih dan pupuk secara efektif dalam jumlah besar.

DJI Agras T30 dapat membawa beban 30kg, dengan berat total 26,4kg dan mempunyai pompa *plunger* baru, dapat memberikan laju aliran besar hingga 8L/menit dengan penyebaran penyemprotan hingga 7 meter, dimana *spraying drone* tersebut dengan *lancer* menyemprotkan cairan hingga berukuran 300 μm, jadi 1 ton pupuk bisa ditebar hanya dalam 1 jam. DJI Agras T30 memiliki 16 *nozzle* baru untuk memastikan keseragaman penyemprotan. *Drone* ini memiliki radar berpresisi tinggi dan *flow* meter dengan mesin A.I canggih untuk perencanaan operasi 3D.

Tangki semprot DJI Agras T30 berkapasitas 30 liter, yang dengan mudah dapat dibongkar pasang untuk pengisian ulang. Selain itu, *drone* tersebut juga dapat menyemprotkan cairan dengan jarak 7-9 meter. Baterai dari *spraying drone* DJI Agras T30 juga mudah untuk dilepas pasang, mempersingkat mobilitas pengguna dari satu tempat ke tempat lain dilapangan. Kecepatan penerbangan dari *drone* tersebut bisa dipantau secara *real-time* sekaligus melihat informasi volume penyemprotan secara bersamaan. T

TRUK BARU, ERA BARU SERI LISTRIK

Mercedes-Benz Trucks meluncurkan perdana eActros baterai-listrik untuk angkutan barang *heavy-duty*. Dengan menggembar-gemborkan era baru peluncuran pertama produksi truk seri listrik dengan logo bintang.

Diakui, pada masa perubahan iklim seperti pada saat ini, transportasi tidak terlepas dari masalah. Dibutuhkannya solusi yang tepat untuk menjawab tantangan.

Selangkah demi selangkah membantu perusahaan jasa pengangkutan, untuk beralih ke transportasi listrik, Mercedes-Benz Trucks telah memasukkan eActros ke dalam sistem komprehensif yang mencakup konsultasi dan produk jasa untuk pelanggan sehingga pemanfaatan kendaraan bisa digunakan sebaik mungkin, optimalisasi total biaya dan pengaturan infrastruktur pengisian daya. Selain itu, truk listrik ini memiliki digitalisasi dan konektivitas tingkat tinggi.

Pengembangan eActros difokuskan pada kemitraan, dibandingkan dengan prototipenya, beberapa fitur seperti jangkauan, tenaga penggerak, dan keselamatan telah jauh lebih baik dalam model produksi seri.

Inti pada teknologi eActros adalah unit penggerak dengan dua motor listrik terintegrasi bersama dengan transmisi dua kecepatan. Kedua motor memberikan kenyamanan berkendara yang mengesankan dan dinamika kendaraan yang hebat, sementara penggerak listrik yang senyap dan bebas emisi berarti truk juga dapat digunakan untuk kondisi malam.

Bergantung pada versinya, eActros mendapatkan dayanya dari tiga atau empat paket baterai – masing-masing berkapasitas sekitar 105 kWh. Berkat kapasitas maksimum 420 kWh2, jangkauan hingga 400 kilometer menjadi realistis. eActros dapat diisi hingga 160 kW: Saat terhubung ke stasiun pengisian 400A DC, ketiga paket baterai perlu sedikit lebih lama dari 1 jam untuk mengisi daya dari 20 hingga 80 persen.

HEAVY DUTY-TRUCK RAMAH LINGKUNGAN

- Musim gugur menjadi awal pembuatan model seri-produksi eActros di Wörth am Rhein.
- Memiliki jangkauan hingga 400 kilometer; kapasitas baterai hingga 420 kWh.
- Kendaraan dinamis dan kenyamanan berkendara berkat *e-axle* dengan dua motor listrik yang bertenaga
- Karin Rådström, *Member of the Board of Management at Daimler Truck AG* dan bertanggung jawab untuk Mercedes-Benz Truck: "Kami akan menjadi bagian dari solusi. Dengan eActros yang telah menempuh lebih dari setengah juta kilometer di jalan umum. Truk eActros dan layanan khususnya menjadi langkah besar bagi Mercedes-Benz Truck dan bagi pelanggan kami untuk menuju transportasi yang netral CO_2"
- Andreas von Wallfeld, *Head of Sales & Marketing* di Mercedes-Benz Trucks: "Pengembangan eActros berfokus pada kemitraan dengan pelanggan kami. Dibandingkan dengan prototipe, beberapa fitur seperti jangkauan, tenaga penggerak, dan keselamatan telah ditingkatkan secara signifikan di model seri-produksi".

Dalam generasi terbaru Actros dengan penggerak diesel konvensional, Mercedes-Benz Trucks telah memberikan demonstrasi yang mengesankan tentang standar keselamatan yang dimungkinkan, dan apa yang dilakukan pabrikan dalam mengejar visinya tentang berkendara bebas kecelakaan.

Dengan eActros, Mercedes-Benz Trucks tidak hanya memperhatikan keselamatan aktif, misalnya dalam bentuk sistem yang dipasang sebagai standar seperti *MirrorCam, Sideguard Assist* S1R atau *Active Brake Assist* (ABA) generasi kelima dengan deteksi pejalan kaki, tetapi juga pada tantangan yang terkait dengan kendaraan listrik dan sistem tegangan tinggi.

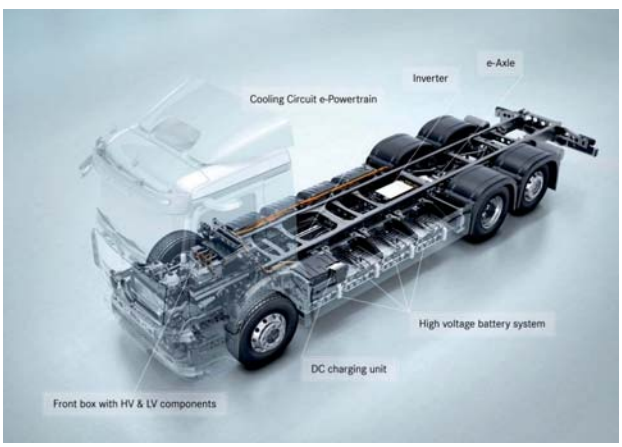

FOCUS GROUP DISCUSSION

SATU TAHUN MINERBA: RPP MINERBA DAN KEPASTIAN BERUSAHA PERTAMBANGAN

Majalah TAMBANG bekerjasama dengan Kantor Penasihat Hukum Armila & Rako pada tanggal 16 Juni 2021 lalu di Jakarta, menyelenggarakan *Focus Group Discussion* dengan tema Satu Tahun UU Minerba: RPP Minerba dan Kepastian Berusaha Pertambangan. Kegiatan yang dilangsungkan secara *offline* ini diikuti oleh peserta terbatas dan mengikuti aturan protokoler kesehatan.

Hadir sebagai narasumber adalah Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Ridwan Djamaluddin, Irwandy Arif Staf Khusus Menteri ESDM/Ketua Indonesia Mining Istitute, Ido Hutabarat Ketua Umum Indonesia Mining Association (IMA), Rizal Kasli Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI), Muhammad Burhannurdinnur Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Hendra Sinadia Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Bambang Tjahjono Direktur Eksekutif Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia, Singgih Widagdo Ketua Indonesia Mining and Energy Forum, dan dipandu oleh Moderator, Eva Armila Djauhari Praktisi Hukum Armila and Rako Law Firm.

Diskusi ini diawali sambutan Direktur Utama Majalah TAMBANG, Atep Abdu Rofiq dan dilanjutkan dengan pembahasan yang disampaikan oleh para narasumber. T

I. PERKEMBANGAN PERATURAN PELAKSANAAN UU NOMOR 3 TAHUN 2020
Status penyusunan peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 3 Tahun 2020 per tanggal 15 Juni 2021 adalah sebagai berikut:
RPP Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
RPP Wilayah Pertambangan
RPP Pembinaan dan Pengawasan serta Reklamasi dan Pascatambang dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
RPerpres Pendelegasian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
Status
Proses Penetapan Bapak Presiden
Proses Harmonisasi
Proses Pembahasan Panitia Antarkementerian
Selesai Harmonisasi
TAMBANG
ARMILA RAKO
SATU TAHUN UU MINERBA: RPP MINERBA DAN KEPASTIAN BERUSAHA PERTAMBANGAN

TAMBANG

TRANSFORMASI **DIGITAL**

Untuk Berlangganan:

bit.ly/FormBerlangganan**TAMBANG**

GIIF
GLOBAL INFRASTRUCTURE INVESTMENT FORUM 2021
28 - 29 JULY 2021

Supported by | Endorsed by | Hosted by

ELEVATING TOGETHER: INFRASTRUCTURE NEW PARADIGM FOR A WINNING FUTURE

Keynote Speakers

HE Ir. Joko Widodo*
President of The Republic of Indonesia

M. Mahfud MD*
Coordinating Minister for Political, Legal, and Security Affairs

Airlangga Hartarto*
Coordinating Minister for Economic Affairs

Muhadjir Effendy
Coordinating Minister for Human Developments and Cultural Affairs

Luhut Binsar Pandjaitan
Coordinating Minister of Maritime and Investment Affairs

Suharso Monoarfa
Minister of National Development Planning/ Head of Bappenas

Sri Mulyani Indrawati
Minister of Finance

M. Basuki Hadimoeljono
Minister of Public Works and Public Housing

Sofyan A. Djalil*
Minister of Agrarian and Spatial Planning /National Land Agency

Sandiaga Salahuddin Uno*
Minister of Tourism and Creative Economy

Arifin Tasrif
Minister of Energy and Mineral Resources

Agus Gumiwang Kartasasmita
Minister of Industry

Reynaldi Hermansjah
CEO of PT Indonesia Infrastructure Finance

Hendri Mulya Syam
President Director of Telkomsel

Utami Prastiana
Country Representative of AECOM Indonesia

Bernardus Djonoputro
EY Indonesia Strategy and Transactions Executive Director

Isran Noor*
Governor of East Kalimantan

Garibaldi Thohir*
President Director of PT. Adaro Energy Tbk

Vegard Kaale
Norway Ambassador to Indonesia

Hendricus Andy Simarmata
President of Indonesian Association of Urban and Regional Planners (IAP)

Ismail
Director General of Spectrum Management and Standardization of Post and ICT, Ministry of ICT

Khoirul Anwar
Associate Professor Telkom University

Mohammad Ridwan Effendi
Telecommunications Expert Bandung Institute of Technology

*to be confirmed
And Many More...

Media Partner:

TAMBANG
THE INDONESIA ENERGY & MINING MAGAZINE

giifevent | giifevent_ | On Us Asia | onus.asia